



**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET DIGITAL
SEBAGAI *INTANGIBLE ASSETS* DALAM AKUNTANSI
*CRYPTOCURRENCY***

SKRIPSI

Oleh:

Michael Chandra Gunawan

190810301162

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JEMBER

2023

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu, Keluarga, Kerabat dekat & jauh
2. Teman-teman seperjuangan di S1 Akuntansi FEB UNEJ '19
3. Pegiat dan peneliti keilmuan Akuntansi
4. Pengguna keilmuan Akuntansi



MOTO

“Ikatan memiliki tanggung jawab, Kebebasan memiliki konsekuensi”

- Penulis-



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Michael Chandra Gunawan

NIM : 190810301162

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Pengakuan dan Pengukuran Aset Digital sebagai Intangible Assets dalam Akuntansi Cryptocurrency* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2023

Yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPORER', and the serial number '65EAKX737110852'.

Michael Chandra Gunawan

NIM.190810301162

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Pengakuan dan Pengukuran Aset Digital sebagai Intangible Assets dalam Akuntansi Cryptocurrency* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 November 2023
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Nining Ika Wahyuni, S.E. M.Sc, Ak.

NIP : 198306242006042001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Indah Purnamawati, S.E., M.Si., Ak

NIP : 196910111997022001

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.

NIP : 197705232008011012

2. Penguji Anggota

Nama : Dr. Alfi Arif, SE., M.AK., Ak.

NIP : 197210041999031001

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Cryptocurrency telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di Indonesia dan dunia. Peraturan dan lisensi telah dikeluarkan untuk memastikan legalitas perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia, namun masih terdapat ketidakpastian mengenai pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* dalam akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengakuan *cryptocurrency* dalam akuntansi dan menentukan metode pengukuran yang tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal akademik, buku, dan artikel terkait *cryptocurrency* dan akuntansi. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa *cryptocurrency* secara definisi telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset digital pada akun aset tak berwujud. Namun, perihal pengukurannya masih belum dapat diukur secara pasti karena melibatkan banyak faktor. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk transaksi *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan dan belum ada standar akuntansi yang jelas. Oleh karena itu, badan pembuat standar akuntansi perlu mengembangkan standar yang jelas dan spesifik untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang relevan dan berguna bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan. Selain itu, literasi kripto di Indonesia masih lemah, sehingga penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi kripto dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang *cryptocurrency* dalam konteks akuntansi.

Kata kunci: *cryptocurrency*, akuntansi, pengakuan, pengukuran, aset digital, standar akuntansi, literasi kripto.

ABSTRACT

Cryptocurrency has become a hot topic in Indonesia and around the world. Regulations and licenses have been issued to ensure the legality of cryptocurrency trading in Indonesia, but there is still uncertainty regarding the recognition and measurement of cryptocurrency in accounting. This research aims to identify the recognition of cryptocurrency in accounting and determine the appropriate measurement method in the company's financial statements. The research method used is qualitative descriptive by collecting data from reliable sources such as academic journals, books, and articles related to cryptocurrency and accounting. From the results of the study, it was found that cryptocurrency has met the requirements to be recognized as a digital asset in the intangible asset account. However, its measurement is still uncertain due to involving many factors. The appropriate accounting treatment for cryptocurrency transactions is still a debate, and there is no clear accounting standard. Therefore, accounting standard-setting bodies need to develop clear and specific standards to reduce uncertainty and provide relevant and useful guidance for financial statement users. In addition, crypto literacy in Indonesia is still weak, so it is important for the public to increase

crypto literacy and gain a deeper understanding of cryptocurrency in the context of accounting.

Keywords: cryptocurrency, accounting, recognition, measurement, digital asset, accounting standards, crypto literacy.



RINGKASAN

Pengakuan dan Pengukuran Aset Digital sebagai *Intangible Assets* dalam Akuntansi *Cryptocurrency*; Michael Chandra Gunawan; 190810301162; 37 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi yang pesat sehingga muncul sebuah mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*. Hingga saat ini belum ada standar tertentu yang mengatur keberadaan *cryptocurrency* dalam sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat sebuah penelitian dengan berdasarkan masalah (1) pengakuan *cryptocurrency* dan (2) pengukurannya. Banyak teori-teori yang mendasari bagaimana suatu objek akuntansi diakui. Teori-teori tersebut dibangun seiring dengan perkembangan waktu. Kemunculan masalah-masalah ekonomi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan menyebabkan akuntansi terus berevolusi agar tercapai prinsip keandalan serta relevansinya. Pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* melibatkan kerangka konseptual, definisi, pernyataan-pernyataan para ahli, teori-teori terkait penilaian dari sebuah aset. *Cryptocurrency* secara empiris telah diakui sebagai aset digital. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis membatasi ranah pembahasan *cryptocurrency* sebagai aset. Metode-metode yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara, dengan menggunakan pengungkapan secara deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa literatur-literatur yang ada belum menyepakati bagaimana aset digital dalam rupa *cryptocurrency* itu terkategori dalam akun apa. Namun, beberapa penelitian telah mengerucut pada pengakuan *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud, karena memang pada umumnya aset digital diakui sebagai aset tak berwujud. Namun, hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan landasan. *Cryptocurrency* hanya memenuhi definisi dari aset tak berwujud, namun tidak dengan bagaimana mengukurnya. Nilai *cryptocurrency* yang volatil dan tidak memiliki *underlying*, menyebabkan para pembuat standar tidak bisa memberikan masukan (*input*) bermakna terhadap pernyataan atau standar yang ada. Keterbatasan regulasi juga menjadi salah satu faktor mengapa tidak ada standar akuntansi *cryptocurrency* tertentu hingga saat ini. Penulis berharap melalui fakta-fakta empiris yang disajikan pada penelitian ini dapat menjadi referensi yang baik bagi penelitian dalam bidang akuntansi *cryptocurrency* yang akan datang.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Skripsi berjudul “Pengakuan dan Pengukuran Aset Digital sebagai *Intangible Assets* dalam Akuntansi *Cryptocurrency*” ini merupakan perjuangan panjang penulis untuk membuahakan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan akuntansi dalam menyikapi perkembangan teknologi keuangan yang begitu cepat. Buah pemikiran ini tak lepas dari mereka-mereka yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun morel. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA., CSRA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, M.Si. Ak. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dosen pembimbing, Ibu Dr. Nining Ika Wahyuni, S.E. M.Sc, Ak. dan Ibu Indah Purnamawati, S.E., M.Si., Ak. yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaganya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Hendrawan Santosa Putra SE, M.Si, Ak selaku Dosen Wali (DPA) selama penulis menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Wahyu Agus Winarno, S.E., M.Sc., Ak., dan Bapak Drs. Ketut Indraningrat, M.Si yang sudah menjadi rekan berdiskusi sekaligus sampel wawancara untuk terselesaikannya pembahasan tugas akhir ini;
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
7. Ayah, Sugiarto Chandra Gunawan, Ibu, Meliana Hadi Prijono, Adik, Michelle Chandra Gunawan, yang terus mendukung dan mendoakan di setiap waktu;
8. Terkhusus kepada Wakil Dekan I, Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.CA,CPA., yang sudah seperti Ibu sendiri di kampus bagi penulis

9. Terkhusus juga Bapak Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak. dan Dr. Alfi Arif, SE., M.AK., Ak., selaku dosen penguji yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan diskusi, serta menguji substansi dan sistematika karya tulis ini hingga terselesainya tugas akhir ini.
10. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNEJ;
11. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen Jember;
12. Rekan-rekan pada seluruh angkatan S1 Akuntansi FEB UNEJ;
13. Rekan-rekan Momogi Band, yang menjadi wadah untuk relaksasi di kala penat mengerjakan tugas akhir;
14. Rekan-rekan Musisi se-Jember, yang selalu mendukung perkembangan karir bermusik penulis, sehingga penulis tidak kekurangan hal materiil dalam menyelesaikan perkuliahan

Pembahasan mengenai akuntansi *cryptocurrency* akan selalu menyisakan ruang-ruang perdebatan dan argumentasi, bagaimana nalar dan psikologi akuntan menyikapi sebuah objek akuntansi yang bahkan terus berevolusi. Penelitian ini tidak akan berakhir hingga pada saatnya tercipta suatu standar tetap yang tidak dapat diperdebatkan kembali, namun, layaknya ilmu sosial yang dinamis, perkembangan keilmuan akuntansi juga harus dinamis mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dengan kritik, masukan, dan saran. Penelitian lebih lanjut juga akan menjadi suatu diskusi yang menarik bagi para peneliti-peneliti berikutnya.

Jember, 1 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK	vi
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Nilai Wajar (<i>Fair Value</i>)	5
2.2 Teori <i>Historical Cost</i>	5
2.3 Teori <i>Impairment</i> (Penurunan Nilai)	5
2.4 Definisi Mata Uang Kripto	6
2.5 Sejarah Mata Uang Kripto	7
2.6 Karakteristik Mata Uang Kripto	8
2.7 Pengertian Aset Digital	10
2.8 Peran Akuntansi Pada Aset Digital	10
2.9 Pengertian Instrumen Finansial	12
2.10 Penelitian Terdahulu	14
2.11 Kerangka Berfikir	14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Desain Penelitian.....	17
3.2 Pendekatan Penelitian	17
3.3 Populasi dan Sampel	18
3.4 Metode Pengumpulan Data	18
3.5 Metode Analisis Data	19
BAB IV PEMBAHASAN	21
4.1 Pendekatan-pendekatan Pengakuan Cryptocurrency sebagai Aset Digital	21
4.1.1 Pendekatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Instrumen Finansial	21
4.1.2 Pendekatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Tak Berwujud.....	24
4.2 Alternatif Pandangan Lain Pengakuan dan Pengukuran <i>Cryptocurrency</i> ..	30
4.1.1 Pendekatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Persediaan	30
4.2.1 Pendekatan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Kas/Setara Kas atau Unit Moneter	
.....	32
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	42

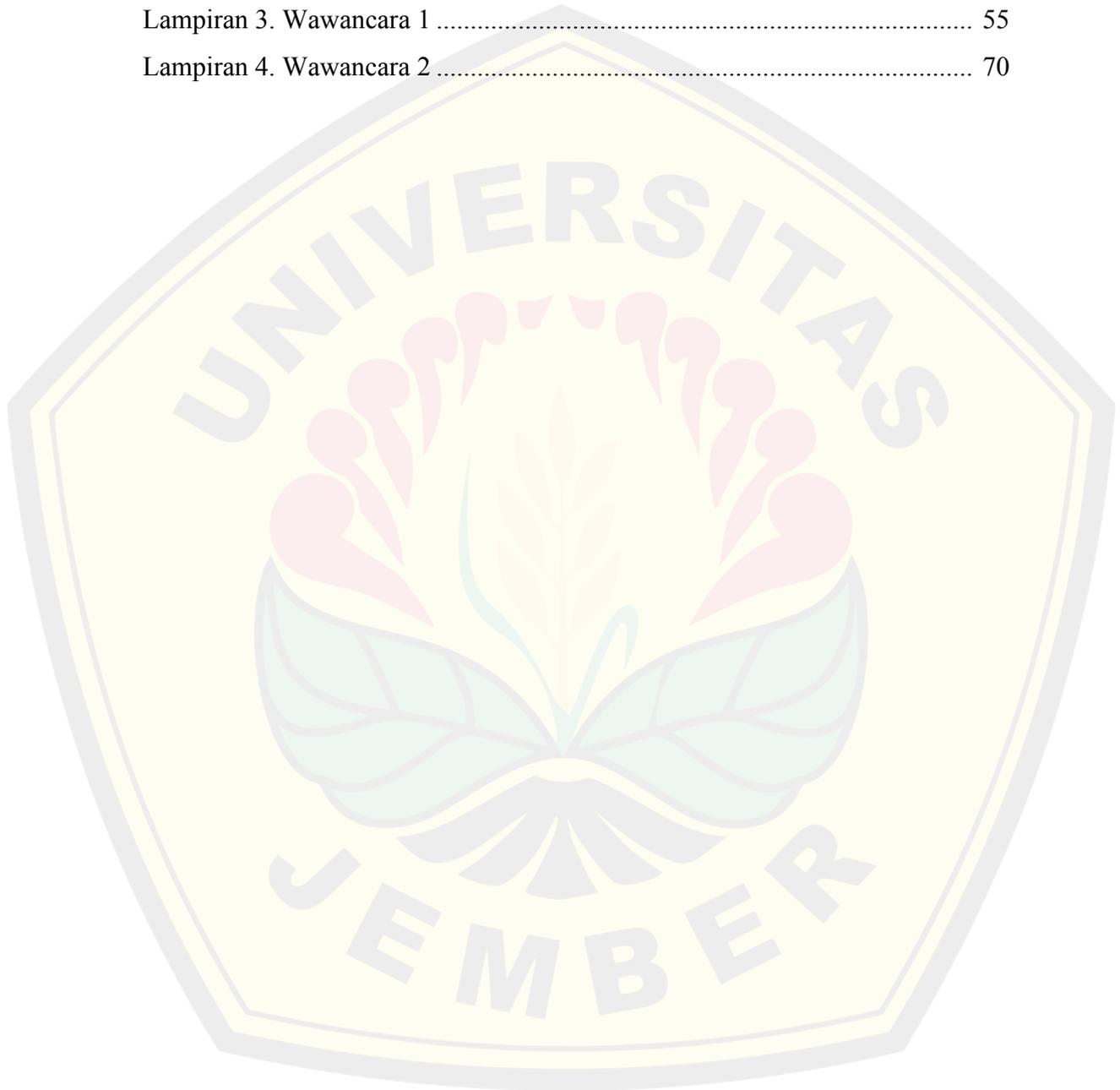
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	15



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Tabel.....	41
Lampiran 2. Daftar Gambar.....	52
Lampiran 3. Wawancara 1.....	55
Lampiran 4. Wawancara 2.....	70



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cryptocurrency adalah bentuk uang digital yang telah mengambil dunia keuangan dengan cepat (Li et al., 2019). Mereka menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi serta mengontrol penciptaan unit-unit baru (Li et al., 2019). Perjalanan *cryptocurrency* di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 2013-an dengan pengenalan *Bitcoin* sebagai mata uang digital pertama yang dikenal luas (Bidari & Nurviana, 2022). Seiring berjalannya waktu, *cryptocurrency* lainnya seperti *Ethereum*, *Ripple*, dan sebagainya mulai mendapatkan popularitas (Handoko et al., 2021).

Cryptocurrency atau aset kripto merujuk pada suatu mata uang virtual yang tercipta oleh karena diperkenalkannya teknologi *blockchain* (Giudici et al., 2020). Kripto diharapkan dapat menggantikan peran uang kertas yang sepenuhnya dikendalikan oleh suatu otoritas (Cvetkova, 2018). Sistem sentralisasi mata uang kertas (*fiat*) dan logam yang dikeluarkan oleh suatu otoritas sentral atau yang ditunjuk oleh pemerintahan suatu negara mendorong terjadinya monopoli permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri (Gros & Siebenbrunner, 2019). Sentimen-sentimen geopolitis mempengaruhi nilai dari mata uang itu akibat penawaran yang berlebih setelah pencetakan uang, atau pun kebijakan moneter lainnya seperti kenaikan suku bunga untuk menekan laju inflasi (Xu et al., 2023). Selain itu, keamanan dalam bertransaksi melalui sistem perbankan maupun secara fisik menggunakan uang *fiat* menimbulkan ide untuk transaksi langsung *peer to peer*. Keinginan manusia untuk bertransaksi secara aman dan efisien terpenuhi pada sistem teknologi *blockchain* yang tidak membutuhkan peranan jembatan seperti bank, pemerintah, ataupun otoritas sentral (Javaid et al., 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang *cryptocurrency* dengan sikap yang berhati-hati dan menganggapnya sebagai aset yang berisiko. Beberapa sudut pandang OJK terhadap *cryptocurrency* adalah: Tidak memiliki nilai intrinsik: OJK menyatakan bahwa *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, tidak memiliki nilai intrinsik.

Hal ini berarti nilai aset tersebut tidak didasarkan pada faktor-faktor fundamental seperti pendapatan atau aset fisik. Tidak tunduk pada peraturan dan otoritas pengatur pusat: Transaksi menggunakan *cryptocurrency* dianggap mengandung risiko yang "tidak dapat dibatalkan" karena aset kripto tidak tunduk pada peraturan atau mekanisme pengawasan otoritas pengatur pusat. Fluktuasi nilai pasar yang tinggi: Nilai pasar *cryptocurrency* dapat sangat fluktuatif, yang berarti nilainya dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini dapat menyebabkan risiko investasi yang tinggi bagi para pemegang aset kripto (Woebeking, 2021).

Cryptocurrency dalam sudut pandang akuntansi dianggap sebagai aset digital. Namun, perubahan dalam teknologi dan regulasi telah menghadirkan tantangan bagi para akuntan dalam mengakui dan mengukur nilai aset digital ini. Pengakuan *cryptocurrency* dalam laporan keuangan perusahaan merupakan topik yang sangat penting dalam konteks akuntansi (Alsalmi et al., 2023).

Pengukuran aset digital seperti *cryptocurrency* melibatkan pemahaman yang mendalam tentang teori-teori akuntansi yang relevan (Ramassa & Leoni, 2022). Teori Nilai Wajar (*Fair Value*): Dalam konteks aset digital seperti *cryptocurrency*, teori nilai wajar adalah teori yang sangat relevan. Teori ini berfokus pada penilaian aset berdasarkan nilai pasar saat ini (Osho & Ajetunmobi, 2020). Akuntan perlu memahami bagaimana menghitung nilai wajar aset kripto yang sangat fluktuatif ini. Teori *Historical Cost*: Teori ini lebih tradisional dan melibatkan pengukuran aset berdasarkan biaya historis pembelian (Rahmawati, 2006). Namun, dalam kasus *cryptocurrency*, di mana nilai aset dapat berubah dengan cepat, pertanyaan muncul tentang sejauh mana teori ini relevan. Teori *Impairment* (Penurunan Nilai): Dalam situasi di mana nilai *cryptocurrency* telah mengalami penurunan yang signifikan, teori *impairment* digunakan untuk menilai apakah aset tersebut perlu diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan keuangan (Hoesada, 2021).

Fenomena terkait *cryptocurrency* di Indonesia mencakup pertumbuhan pesat bursa *cryptocurrency*, tingkat adopsi yang semakin tinggi, serta potensi risiko dan manfaat yang terkait. Di samping pesatnya pertumbuhan bursa di Indonesia, nilai mata uang kripto yang masih volatil, dibandingkan dengan mata uang *fiat*, hal

ini menyebabkan kemampuan mata uang kripto untuk menyimpan nilai dipertanyakan oleh para kalangan (Handoko et al., 2021). Kemudian, daripada sekedar menunggu atau memperdebatkan volatilitas nilai tersebut, para pelaku pasar mencoba mempergunakan kesempatan tersebut untuk membuat mata uang kripto sebagai salah satu instrumen investasi maupun komoditas berjangka (Giudici et al., 2020). Kenaikan salah satu mata uang kripto pendahulu, Bitcoin, sejak 2010 ke tahun 2020 menunjukkan antusiasme pasar yang begitu menggairahkan terhadap pasar kripto. Bahkan terbaru, dilansir dari kumparan.com, investor kripto tanah air ada di angka 16,55 juta mengalahkan investor pasar modal yang jumlahnya sekitar 10,3 juta. Hal ini tentunya membawa penilaian tersendiri bagaimana memanfaatkan kripto (Jeris et al., 2022).

Penelitian terdahulu telah menyimpulkan bahwa belum ada perlakuan akuntansi yang jelas untuk transaksi *cryptocurrency*, baik jika *cryptocurrency* tersebut diperlakukan sebagai uang tunai, aset, atau inventaris (Nuraliati & Azwari, 2018). Dalam konteks karakteristik uang, *cryptocurrency* mungkin dapat diterima, namun dari perspektif ekonomi, *cryptocurrency* tidak sepenuhnya memenuhi karakteristik mata uang karena volatilitas harga yang tinggi (Meliza & Sadalia, 2021). Ketika perusahaan memiliki *cryptocurrency*, klasifikasinya sebagai aset dapat mengikuti standar akuntansi seperti IFRS dan PSAK. Oleh karena itu, badan pembuat standar akuntansi perlu mengembangkan standar yang jelas dan spesifik untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang relevan dan berguna bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan (Pamungkas & Firmansyah, 2021). Dengan demikian, perlakuan akuntansi yang konsisten dan tepat untuk *cryptocurrency* menjadi penting dalam konteks pelaporan keuangan.

Berdasar dari latar belakang di atas, didapatkan hasil bahwasanya keilmuan akuntansi memiliki cara pandang tersendiri terkait bagaimana pengakuan atas kripto. Latar belakang dan penelitian terdahulu di atas juga menegaskan bahwa pengakuan atas kripto perlu ditelaah lebih lanjut, penulis yakin bahwasannya mata uang kripto akan menjadi suatu hal yang merubah perekonomian serta gaya pelaporan akuntansi di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Pengakuan dan Pengukuran Aset Digital sebagai *Intangible Assets* dalam

Akuntansi *Cryptocurrency*” dengan harapan munculnya suatu kerangka berpikir atas pengakuan mata uang kripto di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini merumuskan masalah utama yakni:

Bagaimana pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* dalam ranah keilmuan akuntansi, apakah dapat diakui dan diukur sebagai aset digital dalam akun *intangible assets*?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

Mengidentifikasi pengakuan dan pengukuran aset digital *cryptocurrency* sebagai *intangible assets*.

1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat mendalam tentang *cryptocurrency* dalam konteks akuntansi. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana *cryptocurrency* dapat diakui dan diukur dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini juga bermanfaat bagi universitas sebagai rujukan sitasi dan referensi dalam domain keilmuan akuntansi terkait *cryptocurrency*. Hal ini penting mengingat tulisan ilmiah tentang *cryptocurrency* dalam konteks akuntansi masih sangat terbatas di Indonesia.

3. Bagi DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia)

Penelitian ini dapat menjadi referensi berpikir serta diskusi bagi DSAK IAI dalam memutuskan perlakuan *cryptocurrency* di laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu DSAK IAI dalam menjawab tantangan pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* dalam praktik akuntansi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Nilai Wajar (*Fair Value*)

Teori Nilai Wajar (*Fair Value*) adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi yang digunakan untuk menilai aset dan kewajiban perusahaan. Teori ini menyarankan bahwa aset dan kewajiban harus diukur berdasarkan nilai pasar saat ini atau nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang dapat diterima oleh pihak yang bertransaksi dalam kondisi pasar yang sehat dan normal. Pendekatan ini menekankan transparansi dalam pelaporan keuangan dengan memungkinkan aset dan kewajiban tercermin dalam laporan keuangan dengan nilai yang paling aktual (Osho & Ajetunmobi, 2020).

Pendekatan ini menciptakan dasar yang solid untuk mengukur aset digital seperti *cryptocurrency*. Nilai wajar *cryptocurrency* adalah harga pasar saat ini di bursa terkait. Dalam konteks *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif, pemahaman tentang bagaimana menghitung nilai wajar dengan akurat menjadi penting. Pada dasarnya, teori nilai wajar menciptakan kerangka kerja yang relevan untuk mengakui *cryptocurrency* sebagai aset dan mengukurnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku (Corbet et al., 2019).

2.2 Teori *Historical Cost*

Teori *Historical Cost* adalah pendekatan yang lebih tradisional dalam akuntansi. Teori ini berdasarkan pengukuran aset dan kewajiban berdasarkan biaya historis pembelian atau biaya perolehan. Dalam konteks ini, aset dinyatakan dalam laporan keuangan dengan nilai yang sama dengan biaya awal pembelian (Rahmawati, 2006). Namun, dalam kasus *cryptocurrency*, di mana nilai aset dapat berubah dengan cepat, pertanyaan muncul tentang sejauh mana teori ini relevan. Karena *cryptocurrency* sering mengalami fluktuasi nilai yang signifikan, pengukuran mereka berdasarkan biaya historis mungkin tidak mencerminkan nilai intrinsik atau aktual dari aset tersebut (Tkachuk, 2019).

2.3 Teori *Impairment* (Penurunan Nilai)

Teori *Impairment* atau Penurunan Nilai adalah teori yang digunakan untuk menilai apakah suatu aset telah mengalami penurunan nilai yang signifikan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika nilai wajar atau nilai terpulihkan suatu aset turun di bawah nilai buku (nilai historis biaya perolehan), maka aset tersebut harus diakui sebagai rugi penurunan nilai dalam laporan keuangan. Dalam konteks *cryptocurrency*, di mana nilai pasar bisa sangat fluktuatif, teori *impairment* dapat menjadi relevan jika nilai *cryptocurrency* telah turun secara signifikan di bawah biaya historis pembelian. Dengan menerapkan teori *impairment*, perusahaan dapat mengakui penurunan nilai tersebut dalam laporan keuangan mereka, mencerminkan kerugian yang sebenarnya yang mungkin dialami akibat fluktuasi harga *cryptocurrency* (Hoesada, 2021).

2.4 Definisi Mata Uang Kripto

Mata uang kripto didasarkan pada suatu terjemahan bahasa dari yang populer di kalangan masyarakat yakni *cryptocurrency*. Secara etimologis, *cryptocurrency* merupakan gabungan dari dua suku kata, *crypto* dan *currency*. *Crypto*, kosakata turunan dari kata *cryptography* (kriptografi=bahasa persandian) merujuk kepada sebuah kesepakatan dari para pengguna dan proses penyimpanan yang diamankan oleh sandi-sandi yang kuat, sedangkan *currency* adalah sistem mata uang sebagai alat pertukaran yang berlaku di masyarakat (Nuraliati & Cahaya Azwari, 2018). Mata uang kripto, seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan sebagainya, adalah uang virtual yang mana wujudnya tidak ada dalam bentuk unit fisik (Ramassa & Leoni, 2022). Mata uang kripto tidak tersentralisasi seperti halnya mata uang yang dipakai negara-negara pada umumnya. Oleh karena itu, mata uang kripto secara teknis, sangat berbeda dengan mata uang kertas atau logam yang dipakai sebagai instrument moneter sehari-hari oleh masyarakat.

PricewaterhouseCoopers, salah satu Kantor Akuntan Publik “*Big Four*”, melalui dewan-dewan penulisnya menyebut mata uang kripto sebagai aset kripto. Aset Kripto diartikan sebagai representasi-representasi digital dapat ditransfer yang didesain dalam rangka menghindari tiruan atau duplikasi (Leopold & Vollman, 2019). Aset digital tersebut dapat ditransfer sebab menggunakan suatu fasilitas

teknologi “*blockchain*”. Blockchain merupakan buku besar digital dengan catatan runtut dari transaksi-transaksi yang tersedia untuk semua yang memiliki akses (Gürünlü, 2018). Semua data dalam blockchain dapat dilihat oleh pihak-pihak yang bertransaksi tetapi menyalin maupun mengubah data tidak diizinkan dalam sistem blockchain (Gürünlü, 2018).

Aset kripto tersebut dipergunakan dalam berbagai tujuan, di antara lain sebagai alat tukar, ataupun media untuk bertransaksi jasa ataupun barang yang berkaitan dengan teknologi berbasis *blockchain*. Adapun per tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.37 WIB, banyaknya aset kripto adalah 24.937 dengan total valuasi \$1,159,201,911,167 (dilansir dari situs web [Global Cryptocurrency Market Charts | CoinMarketCap](#)). Jumlah ini akan terus bertambah seiring berkembangnya literasi dan pengalaman masyarakat menggunakan aset kripto tetapi untuk saat ini, dua dari yang kapitalisasinya terbesar adalah *Bitcoin* dan *Ethereum*.

2.5 Sejarah Perkembangan Mata Uang Kripto

Pada tahun 2008, nama samaran “Satoshi Nakamoto” memposting buku putih yang menjelaskan implementasi mata uang digital yang disebut bitcoin yang menggunakan teknologi blockchain. 10 tahun kemudian, ratusan *cryptocurrency* dan aplikasi lain yang tak terhitung banyaknya teknologi *blockchain* sudah tersedia. Munculnya *cryptocurrency* menimbulkan ancaman eksistensial terhadap banyak fungsi keuangan tradisional. *Cryptocurrency* merangkul mekanisme *peer-to-peer* dan secara efektif menghilangkan “perantara”, yang bisa jadi adalah lembaga keuangan. Misalnya, tidak ada rekening bank atau kartu kredit diperlukan untuk bertransaksi di dunia *cryptocurrency*. Hal ini kemudian menjadi pilihan bagi seseorang mengingat lebih dari dua miliar orang tidak memiliki rekening bank (World Bank, 2017)

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, untuk mengontrol penciptaan unit nilai tambahan, dan untuk memverifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* seperti bitcoin dapat dianggap sebagai organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), jaringan digital *peer-to-peer open-source* yang menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pengaturan DAO ini, jumlah uang

beredar telah diatur oleh aturan algoritme, dan integritas jaringan menggantikan kebutuhan untuk mempercayai integritas manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan teknologi *cryptocurrency* menimbulkan tantangan terhadap moneter otoritas tradisional dan bank sentra. Bank sentral memahami hal ini, dan banyak bank telah memulai inisiatif *cryptocurrency* nasional mereka sendiri (Bech & Garrat, 2017).

Terdapat berbagai macam manfaat yang hadir dari adanya mata uang *cripto* seperti biaya transaksi yang rendah, keamanan, dan janji pemrosesan yang cepat, mudah diukur. Tetapi, seperti halnya teknologi baru, maka terdapat pula risiko. Di pasar *cryptocurrency* yang baru lahir, satu kekhawatiran melibatkan sifat anonim dari transaksi di beberapa *cryptocurrency*, yang dapat memungkinkan pelaku kejahatan untuk melakukan bisnis ilegal, atau lebih buruk lagi, menimbulkan dampak yang lebih luas ancaman bagi masyarakat dan institusi (Foley et al., 2019). Statistik deskriptif mengungkapkan bahwa perdagangan mata uang kripto menjadi semakin populer di kalangan perempuan dan laki - laki dan di berbagai kelompok umur dan pedagang dengan perdagangan yang berbeda pola (Hasso et al., 2019).

2.6 Karakteristik Mata Uang Kripto

Cryptocurrency memiliki banyak kesamaan dengan uang konvensional, tetapi juga menawarkan beberapa keuntungan menarik. Keduanya dapat digunakan untuk pembayaran dan sebagai penyimpan nilai. Keduanya mengandalkan kepercayaan konsumen yang tersebar luas agar berfungsi sebagai alat pertukaran. Uang konvensional dikeluarkan dan dikendalikan oleh bank (pusat) dan pemerintah. Bitcoin diproduksi dan didistribusikan melalui proses yang disebut penambangan dan tidak dikendalikan oleh otoritas terpusat. *Bitcoin* dapat dipercaya karena anti rusak dan tidak dapat dibelanjakan dua kali. Transaksi Bitcoin tidak dapat dibatalkan, dibatalkan, atau ditagih kembali (Bitpanda, 2023). Sementara itu, dalam sebuah artikel yang dikeluarkan oleh conotoxia disebutkan bahwa terdapat 7 karakteristik mata uang kripto antara lain (Conotoxia.com, 2023):

1. Keamanan

Cryptocurrency dapat disimpan dalam dompet virtual khusus, diamankan dengan kunci pribadi. Artinya, hanya pemegang yang memiliki akses ke akumulasi dana. Untuk meningkatkan keamanan, pemilik mata

uang virtual harus menggabungkan teknologi enkripsi pada perangkat penyimpanan mereka.

2. Tidak Ada Sentralisasi

Tidak ada otoritas yang mengendalikan aliran atau kutipan *cryptocurrency*. Perdagangan mata uang virtual tidak terletak di satu tempat. Hal ini guna mencegah gangguan perdagangan setelah upaya peretasan. Data transaksi tersebar di seluruh jaringan karena disimpan langsung oleh pemegang *cryptocurrency*.

3. Cara Bertransaksi Kripto Berbeda

Metode transaksi *cryptocurrency* berbeda secara signifikan dari metode mata uang tradisional. Transfer mata uang virtual tidak bergantung pada lokasi pengguna dan prosesnya hampir seketika.

4. Transaksi Tidak Dapat Diubah

Dibalik instannya mata uang kripto, terdapat kelemahan yakni karena kurangnya pengawasan institusional atas transaksi pasar, maka uang virtual tidak dapat dibatalkan. Jika terjadi kesalahan, misalnya detail penerima salah, tidak ada siapapun maupun lembaga yang dapat membantu mengatasi kesalahan tersebut.

5. Pesatnya Perkembangan

Pemegang dapat menggunakan *cryptocurrency* mereka melalui alat dan layanan yang berkembang pesat. Mengubah dan menukar *cryptocurrency* menjadi dolar atau euro. Mata uang ini dapat dikonversi langsung menjadi mata uang tradisional pada umumnya.

6. Anonim

Mata uang kripto tidak membutuhkan identitas pemiliknya untuk melakukan transaksi. Transaksi terikat pada urutan karakter acak dan bukan pada identitas pemilik, termasuk data pribadi atau perusahaan.

7. Tidak Ada Perantara Maupun Badan Pengawas

Tidak adanya kontrol dan peraturan pemerintah menghilangkan biaya dan batasan yang dapat merugikan pengguna. Aliran transaksi *cryptocurrency* tidak diatur oleh otoritas atau lembaga keuangan. Ini

membatasi biaya dan batasan yang tidak menguntungkan. Namun, disisi lain, terdapat masalah dimana pemilik *cryptocurrency* tidak mendapat manfaat dari perlindungan otoritas keuangan. Hal inilah yang menyebabkan bahwasanya mata uang virtual sangat rentan atas tindakan peretasan.

2.7 Pengertian Aset Digital

Aset digital secara luas didefinisikan sebagai representasi nilai digital apa pun yang dicatat pada buku besar terdistribusi yang diamankan secara kriptografis atau teknologi serupa apa pun yang ditentukan oleh Sekretaris (IRS, 2023). Aset digital bukanlah mata uang riil (juga dikenal sebagai "fiat") karena bukan koin dan uang kertas dan tidak diterbitkan secara digital oleh bank sentral pemerintah (FSB, 2022).

Aset digital yang memiliki nilai setara dalam mata uang nyata, atau bertindak sebagai pengganti mata uang nyata, disebut sebagai mata uang virtual yang dapat dikonversi. *Cryptocurrency* adalah contoh mata uang virtual yang dapat dikonversi yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk barang dan jasa, diperdagangkan secara digital antar pengguna, dan ditukar dengan atau menjadi mata uang nyata atau aset digital (IRS, 2023).

Aset digital termasuk di dalam wajib pajak, oleh karena itu, transaksi ini mungkin harus diungkapkan oleh wajib pajak pada SPT-nya. Dalam situasi tertentu, aset ini dapat berfungsi serupa dengan koin dan uang kertas suatu negara yang diklasifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah atau uang tunai nyata. Mata uang virtual yang dapat dikonversi adalah istilah yang digunakan Internal Revenue Service untuk mendeskripsikan aset digital yang sebanding dengan atau sebagai pengganti uang sungguhan. Salah satu jenis mata uang virtual yang dapat dikonversi adalah Bitcoin, yang dapat diperdagangkan secara digital antara pengguna dan dibeli atau ditukar dengan mata uang nyata (Vaidya, 2022).

2.8 Peran Akuntansi Pada Aset Digital

Transformasi digital dalam akuntansi adalah pemrosesan hutang dan piutang, Digitalisasi dalam Proses Pengadaan, Digitalisasi dalam proses audit, dan lain sebagainya. Akuntan menurutnya, dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan dan proses audit secara digital. Oleh karena itu, diharapkan kemampuan akuntan

dalam aspek digital harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman (Sony, 2021). peran akuntansi dalam pengelolaan aset digital:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Aset Digital: Akuntansi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset digital yang dimiliki oleh perusahaan. Ini mencakup *cryptocurrency*, *domain*, hak kekayaan intelektual, software, dan aset digital lainnya. Dengan mengklasifikasikan aset digital, akuntansi dapat memastikan bahwa aset-aset tersebut diperlakukan dengan benar dalam catatan keuangan.
2. Penilaian Aset Digital: Akuntansi harus menentukan nilai yang tepat untuk aset digital. Penilaian aset digital bisa melibatkan penggunaan metode seperti harga pasar, biaya historis, atau penilaian profesional dari pihak ketiga. Penilaian yang akurat penting untuk mencerminkan nilai aset digital yang sebenarnya dalam laporan keuangan.
3. Pencatatan dan Pelaporan: Akuntansi harus mencatat dan melaporkan aset digital secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Ini melibatkan mencatat nilai aset digital, perubahan nilai dari waktu ke waktu, dan mencerminkan transaksi terkait aset digital tersebut dengan benar.
4. Perlakuan Pajak: Aset digital juga memiliki implikasi pajak yang perlu dipertimbangkan. Akuntansi perlu memahami peraturan pajak yang berkaitan dengan aset digital dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku. Ini termasuk pelaporan kegiatan perdagangan atau investasi dalam aset digital dan perhitungan pajak yang sesuai.
5. Pengendalian Internal: Akuntansi memiliki peran dalam memastikan adanya pengendalian internal yang memadai terkait aset digital. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan dan prosedur yang mengatur penggunaan, perlindungan, dan keamanan aset digital. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan aset digital perusahaan.

Dengan memainkan peran ini, akuntansi membantu perusahaan dalam mengelola aset digital secara efektif, memastikan pemantauan dan pengendalian yang tepat, serta memenuhi persyaratan pelaporan dan peraturan yang berlaku.

2.9 Pengertian Instrumen Finansial

Instrumen keuangan adalah instrumen kebijakan publik seperti pinjaman bersubsidi, jaminan kredit dan skema pembiayaan ekuitas yang dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar dialami oleh usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produktif investasi dengan cara yang tidak akan menghasilkan interaksi pasar saja (Brown & Lee, 2017).

Instrumen finansial digunakan untuk tujuan investasi, lindung nilai (*hedging*), spekulasi, atau pengelolaan risiko. Masing-masing instrumen finansial memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda terkait dengan pembayaran, jangka waktu, tingkat pengembalian, risiko, dan peraturan yang mengaturnya (Brown & Lee, 2017). Berikut adalah beberapa contoh instrumen finansial yang umum:

1. Saham: Mewakili kepemilikan sebagian dalam suatu perusahaan. Saham dapat diperdagangkan di pasar saham dan memberikan hak kepada pemilikinya untuk memperoleh dividen dan menghadiri rapat pemegang saham.
2. Obligasi: Surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Obligasi membayar bunga tetap kepada pemegangnya dan memiliki tanggal jatuh tempo di mana pokok obligasi harus dikembalikan.
3. Opsi: Kontrak yang memberikan pemegangnya hak (tetapi tidak kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi dapat digunakan untuk mengelola risiko atau untuk tujuan spekulasi.
4. Futures: Kontrak yang mengikat dua belah pihak untuk membeli atau menjual aset pada tanggal dan harga tertentu di masa depan. Futures digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap fluktuasi harga dan juga digunakan untuk tujuan spekulasi.

5. Swap: Kontrak antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau instrumen finansial selama periode waktu tertentu. Swap umumnya digunakan untuk mengelola risiko suku bunga, nilai tukar mata uang, atau risiko kredit.

Instrumen finansial memainkan peran penting dalam aktivitas pasar keuangan, memungkinkan transfer risiko, alokasi modal, dan kesempatan investasi. Penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami karakteristik, risiko, dan manfaat dari instrumen finansial sebelum terlibat dalam transaksi atau investasi yang melibatkan instrumen tersebut.

Dalam konteks instrumen finansial, akuntansi memainkan peran penting dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan instrumen finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek peran akuntansi dalam instrumen finansial:

1. Pencatatan Transaksi: Akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan instrumen finansial, seperti pembelian, penjualan, penerimaan bunga, atau pembayaran dividen. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu penting untuk memastikan informasi keuangan yang akurat dan terpercaya.
2. Penilaian dan Pengakuan: Akuntansi harus menentukan nilai instrumen finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Ini melibatkan penilaian nilai pasar, nilai wajar, atau metode lain yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah nilai instrumen ditentukan, akuntansi mengakui instrumen tersebut dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
3. Pelaporan Keuangan: Instrumen finansial harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan. Akuntansi memastikan bahwa informasi yang relevan tentang instrumen finansial termasuk nilai, risiko, dan kebijakan akuntansi yang digunakan diungkapkan dengan tepat dan transparan.
4. Pengungkapan Risiko: Akuntansi juga memiliki peran dalam mengungkapkan risiko yang terkait dengan instrumen finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Pengungkapan ini melibatkan mengidentifikasi

dan menggambarkan risiko, seperti risiko pasar, risiko kredit, atau risiko likuiditas, yang dapat mempengaruhi nilai atau kinerja instrumen finansial.

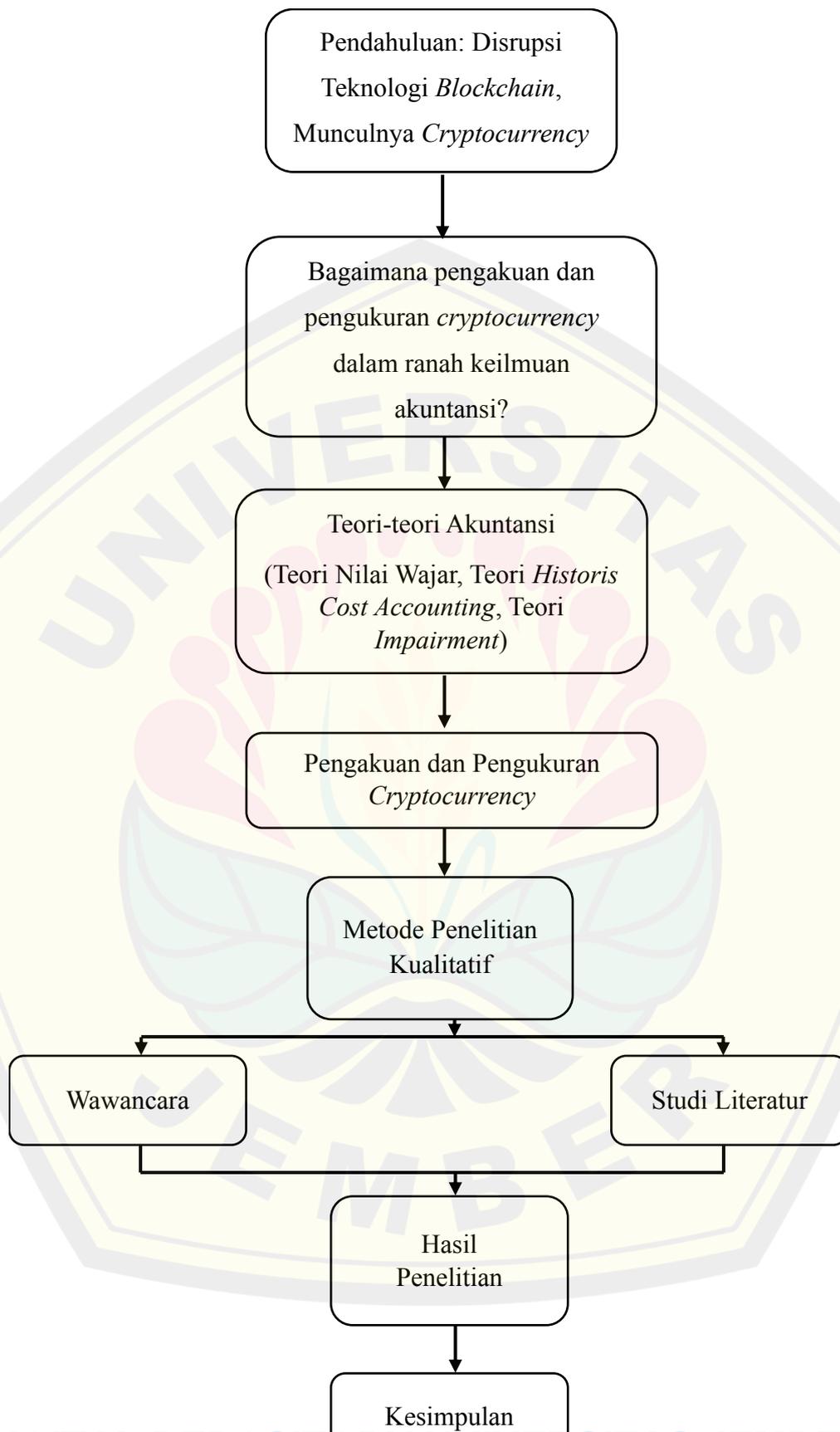
5. Audit dan Pemeriksaan: Akuntansi memberikan dasar data dan informasi yang diperlukan untuk dilakukan audit dan pemeriksaan oleh pihak ketiga. Instrumen finansial perlu diverifikasi dan dikonfirmasi untuk memastikan keberadaan, kepemilikan, serta keabsahan dan keakuratan informasi terkait instrumen tersebut.

Melalui peran ini, akuntansi memastikan bahwa instrumen finansial dikelola dan dilaporkan dengan benar, sehingga memberikan informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan berguna bagi pengambilan keputusan keuangan. Standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau International Financial Reporting Standards (IFRS), memberikan pedoman mengenai perlakuan akuntansi instrumen finansial yang konsisten dan transparan. Peran akuntansi dalam instrumen finansial adalah sebuah konsep yang diakui dan diatur oleh standar akuntansi yang dikeluarkan oleh badan-badan penyusun standar seperti Financial Accounting Standards Board (FASB) di Amerika Serikat dan International Accounting Standards Board (IASB) di tingkat internasional. Standar akuntansi tersebut mengatur prinsip dan kebijakan akuntansi yang harus diikuti oleh perusahaan dalam mengelola instrumen finansial dan melaporkannya dalam laporan keuangan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel penelitian terdahulu dapat dilihat pada (Lampiran 1, Tabel 2.1 Penelitian terdahulu). Penelitian terdahulu mengacu pada pandangan standar-standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini. Namun, keberadaan *cryptocurrency* telah jauh mengungguli keberadaan standar. Maka dari itu, penelitian terdahulu menyiratkan bahwa terdapat kecenderungan *cryptocurrency* diterima sebagai aset, meskipun belum ada standar atau aturan mengenai klasifikasi akun aset manakah yang paling sesuai dengan *cryptocurrency*.

2.11 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 menampilkan kerangka berfikir yang membahas disrupti teknologi blockchain, khususnya terkait dengan pengakuan cryptocurrency dalam konteks keilmuan akuntansi. Kerangka berfikir ini mencakup pertanyaan kunci, yaitu apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai aset digital, dan bagaimana seharusnya cryptocurrency diukur dalam laporan keuangan perusahaan.

Elemen-elemen Kunci dalam Kerangka Berfikir:

1. **Disrupsi Teknologi *Blockchain*:** Merupakan titik awal dalam kerangka berfikir, menyoroti perubahan yang signifikan yang dihadirkan oleh teknologi blockchain dalam konteks keuangan dan akuntansi.
2. **Pengakuan *Cryptocurrency*:** Fokus pada pertanyaan apakah cryptocurrency dapat diakui sebagai aset digital. Pada bagian ini, kerangka berfikir menggali teori-teori akuntansi yang relevan, seperti Teori Nilai Wajar, Teori Historis Cost Accounting, dan Teori Impairment.
3. **Pengukuran dalam Laporan Keuangan:** Menyajikan pertanyaan tentang bagaimana cryptocurrency seharusnya diukur dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap fluktuasi nilai yang tinggi dan bagaimana teori-teori akuntansi dapat diterapkan.
4. **Definisi *Cryptocurrency*:** Memberikan landasan konseptual dengan merinci definisi cryptocurrency, memastikan pemahaman yang konsisten sebelum memasuki diskusi lebih lanjut.
5. **Metode Penelitian Kualitatif:** Menyajikan pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini, yaitu metode penelitian kualitatif. Ini mencakup wawancara dan studi literatur sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.
6. **Hasil Penelitian:** Menyajikan temuan atau hasil dari penelitian, yang kemudian akan membentuk dasar untuk menyimpulkan apakah cryptocurrency dapat dianggap sebagai aset digital dan bagaimana seharusnya diukur dalam laporan keuangan.
7. **Kesimpulan:** Menyajikan rangkuman dari temuan penelitian dan menjawab pertanyaan kunci dalam kerangka berfikir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian didesain menggunakan metode kualitatif wawancara dan studi literatur. Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari-dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian (Moleong, 2017).

Studi literatur, atau dibahasakan studi pustaka atau riset kepustakaan (Zed, 2014) ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Pendekatan deskriptif ditujukan untuk mengulas pemanfaatan objek mata uang kripto sesuai variabilitas variabel yang tersedia. Ulasan atas variabel-variabel yang ada menjadi landasan penulis dalam menentukan kesimpulan akan hasil penelitian ini. Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan objek mata uang kripto, antara sebagai aset digital dan unit moneter.

Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017). Penulis melaksanakan wawancara tanya jawab secara informal, tanpa menggunakan pertanyaan baku, namun disertai pendekatan petunjuk umum, sehingga topik wawancara tidak melebar daripada topik utama. Wawancara ini bertujuan mengambil fenomena yang terjadi dalam lingkup spesifik.

3.2 Pendekatan Penelitian

Chua (1986) membagi penelitian akuntansi menjadi 3 asumsi pendekatan, yaitu *mainstream*, interpretatif, dan kritik. Penelitian akuntansi *mainstream*

mendasarkan pada penelitian yang dapat berguna dan diterapkan di organisasi untuk memprediksi dan mengontrol fenomena empiris. Penelitian akuntansi interpretatif membuka jalan yang lebih lebar daripada penelitian *mainstream* oleh karena menjadikan akuntansi sebagai objek yang diteliti sebagai sesuatu yang bervariasi di situasi yang berbeda. Makna akuntansi tidak hanya dibentuk oleh proses dan struktur interpretatif yang kompleks, tetapi juga membantu menyusun realitas sosial yang diobyektifikasi. (Chua, 1986).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi interpretatif. Fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu terkait dengan topik penelitian. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi interpretatif akan membantu peneliti memahami bagaimana pelaku *cryptocurrency* dan perspektif *standard setter* memahami dan menginterpretasikan pengakuan *cryptocurrency* dalam konteks akuntansi. Interpretasi ini akan membantu menggali makna dan pandangan yang mendasarinya.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku *cryptocurrency*, yang meliputi investor, pengguna, dan individu yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency*. Populasi juga mencakup perspektif *standard-setter* terkait *cryptocurrency*.

2. Sampel

Sampel akan dipilih secara purposif. Artinya, peneliti akan memilih responden yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan tentang *cryptocurrency*. Sampel akan mencakup beragam perspektif dari pelaku *cryptocurrency*, termasuk yang berinvestasi dalam *cryptocurrency* dan yang menggunakannya sebagai alat transaksi. Selain itu, perspektif *standard-setter* juga akan menjadi bagian dari sampel, yang akan dipilih berdasarkan relevansi penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode studi pustaka, peneliti mengambil data kepustakaan melalui sumber primer dan sekunder. Dalam metode wawancara, peneliti berupaya menangkap fenomena langsung dari pelaku *cryptocurrency* serta perspektif *standard-setter* terkait *cryptocurrency*.

1. Studi Literatur

Data akan dikumpulkan melalui studi literatur terkait dengan pengakuan *cryptocurrency* dalam akuntansi. Ini mencakup literatur tentang teori akuntansi yang relevan, panduan standar setter terkait mata uang kripto, dan publikasi resmi yang membahas isu-isu *cryptocurrency*. Mestika Zed (2014) mencirikan metode studi pustaka melalui 4 ciri yaitu,

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks
- b. Data pustaka merupakan ‘siap pakai’
- c. Data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, maka penulis mencari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diulas penulis. Pencarian sumber-sumber kepustakaan dilakukan pada internet, perpustakaan digital, maupun jurnal-jurnal dengan melibatkan kata kunci ‘mata uang kripto’ dan ‘akuntansi’. Oleh karena keterbatasan penelitian topik ini di Indonesia, maka penulis melakukan pencarian tidak hanya terbatas di sumber-sumber kepustakaan lokal, tetapi juga internasional sehingga melibatkan kata kunci serupa dalam bahasa Inggris yaitu ‘*cryptocurrency*’ dan ‘*accounting*’.

2. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pelaku *cryptocurrency* yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang *cryptocurrency*. Wawancara akan mencakup pertanyaan terkait pengakuan *cryptocurrency* dalam akuntansi, pengalaman pribadi mereka dengan *cryptocurrency*, dan pandangan mereka terhadap perspektif standar setter. Wawancara akan direkam untuk analisis lebih lanjut.

Wawancara dilaksanakan pada detail berikut:

Wawancara	I	II
Narasumber (inisial)	Dr. Wahyu Agus Winarno, M. Si, Ak. CPA. (W)	Drs. Ketut Indraningrat, M.Si. (K)
Peran/Jabatan	Representatif IAI / Ketua IAI Komisariat Jember Wilayah Jawa Timur	Pemegang <i>Cryptocurrency</i> , Investor / Dosen Jurusan Manajemen FEB UNEJ
Umur	40 tahun	62 tahun
Tanggal	9 Oktober 2023	4 Oktober 2023
Waktu	11.00 – 13.00 WIB	14.00 – 16.00 WIB
Tempat	Ruang Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNEJ	Ruang Dosen Jurusan Manajemen FEB UNEJ

3.5 Metode Analisis Data

Analisis Fenomenologi Interpretatif: Data dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi interpretatif. Analisis akan berfokus pada mengidentifikasi pola-pola makna, tema-tema umum, dan interpretasi individu terkait dengan pengakuan *cryptocurrency*. Peneliti akan mencari persamaan dan perbedaan dalam pandangan dan pengalaman pelaku *cryptocurrency* serta perspektif *standar-setter*.

BAB IV PEMBAHASAN

Cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan banyak lainnya, telah menjadi topik yang semakin penting dalam dunia keuangan dan akuntansi. Pertumbuhan pesat dalam popularitas dan nilai *cryptocurrency* telah mendorong organisasi dan entitas bisnis untuk mempertimbangkan bagaimana mereka seharusnya memperlakukan *cryptocurrency* dalam akuntansi mereka. Bab ini akan mengulas berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengakuntansi *cryptocurrency* sebagai aset digital dalam akun *intangible assets*. Adapun sebelum menuju pada akun *intangible assets*, dalam penelitian penulis menemukan bahwa *cryptocurrency* juga memenuhi syarat sebagai instrumen finansial dalam kasus tertentu. Penulis juga memberikan alternatif-alternatif sudut pandang lainnya, meskipun bukan menjadi inti dari penelitian ini, sekedar untuk memberikan opsi kepada pembaca.

4.1. Pendekatan-pendekatan Pengakuan *Cryptocurrency* sebagai Aset Digital

4.1.1. Pendekatan *Cryptocurrency* sebagai Instrumen Finansial

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity

- IAS 32.11

Dari pernyataan di atas maka dapat dilihat bahwa pengertian tentang *cryptocurrency* yang menunjukkan kepemilikan atas entitas, baik perusahaan maupun individu, tidak dapat dikategorisasikan ke dalam instrumen finansial. Instrumen finansial mewajibkan adanya sebuah kontrak yang memberikan kenaikan pada aset finansial sebuah entitas dan menjatuhkan liabilitas finansial ataupun instrumen ekuitas kepada entitas lainnya. Berbeda dengan sistem pasar keuangan derivatif yang membuat sebuah kontrak keuangan dengan aset yang dijadikan sebagai nilai lindung, *cryptocurrency* tidak bisa menyajikan sebuah konsep *underlying asset*, nilainya pun berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Berikut adalah beberapa literatur yang menampilkan berkaitan atau berkata kunci *cryptocurrency* dan instrumen finansial.

(lihat lampiran 1, Tabel 4.1.)

Menurut IAS 32 *Financial Instrument: Presentation*, aset finansial adalah segala aset yang merupakan:

- (a) kas;
- (b) sebuah instrumen ekuitas dari entitas lain;
- (c) sebuah hak kontraktual:
 - i. untuk menerima kas atau aset finansial lainnya dari entitas lain; atau
 - ii. untuk menukar aset finansial atau liabilitas finansial dengan entitas lain di bawah kondisi-kondisi yang secara potensial baik untuk entitas; atau
- (d) sebuah kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan:
 - i. sebuah non-derivatif yang mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah variabel dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau
 - ii. derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan menukarkan kas atau aset keuangan lain dalam jumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dalam jumlah tertentu. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan dengan opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang membebaskan pada entitas kewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian pro rata atas aset neto entitas. hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk penerimaan atau penyerahan instrumen ekuitas milik entitas di masa depan.

Berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis-penulis terdahulu enggan mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai instrumen finansial, khususnya aset finansial. Keengganan tersebut namun menimbulkan pengecualian. Pengecualian-pengecualian tersebut adalah dalam beberapa kondisi tertentu. McGuire & Massoud (2018) mengungkapkan bahwa beberapa kontrak untuk membeli atau menjual *cryptocurrencies* dalam *future* (misal, kontrak *forward* atau opsi) atau dalam kontrak-kontrak lain yang yang diselesaikan secara tunai berdasarkan pergerakan mata uang kripto tertentu dapat memenuhi definisi derivatif dan menjadi subyek pada akuntansi instrumen keuangan. Luo & Yu (2022) juga menambahkan bahwa *cryptocurrency* bukan kas, tetapi itu dapat menjadi aset finansial untuk token-token sekuritas yang merepresentasikan sebuah kepentingan residu dari ekuitas (misalnya, hak atas sisa laba, dividen, atau hasil likuidasi) atau untuk *stablecoins* yang memberi pemegang hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menebus koin dengan kas.

Ada beberapa situasi dimana *cryptocurrency* bisa diklasifikasikan menjadi aset finansial. EY (2019) menanggapi bahwa aset kripto dapat menjadi instrumen ekuitas di bawah IFRS hanya jika hal tersebut melekat pada hak kontraktual pada kepentingan residu dari aset bersih (*net assets*) dari sebuah entitas tertentu. Instrumen ekuitas seharusnya memang dicatat dalam nilai wajar (*fair value*), tanpa menyesuaikan biaya transaksi, dan menurut IFRS 9, harus diukur dengan metode FVPL (*fair value through profit or loss*).

Lebih dalam lagi, dalam segmen ini *cryptocurrency* juga dapat dipertimbangkan sebagai derivatif. Hal tersebut menjawab keraguan sekaligus menjelaskan beberapa pendapat dalam penelitian terhadulu (Ersa, 2012; McGuire&Massoud, 2018). IFRS 9 memberikan definisi derivatif, sebagai berikut: *A financial instrument or other contract within the scope of this Standard with all three of the following characteristics.*

- (a) *its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable, provided in the case of*

a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the 'underlying').

(b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors.

(c) it is settled at a future date.

Pendekatan *cryptocurrency* sebagai derivatif dapat mengacu pada definisi di atas. Sebuah hak kontraktual untuk membeli atau menjual aset kripto (sebuah *forward* bitcoin masuk dalam sebuah bank investasi) bisa menjadi sebuah derivatif bahkan jika aset kripto itu sendiri bukan sebuah instrumen finansial dengan syarat aset kripto tersebut siap dikonversi menjadi kas atau kontraknya dapat diselesaikan dengan kas. Hal tersebut sama pendekatannya dengan akuntansi untuk kontrak-kontrak komoditas yang dipergunakan dalam model bisnis perdagangan (misal, kontrak *forward* minyak, emas, batu bara, dsb. meskipun mereka bukan termasuk instrumen finansial)

4.1.2. Pendekatan *Cryptocurrencies* sebagai Aset Tak Berwujud

Sebagaimana *cryptocurrency* adalah mata uang digital, tidak memiliki bentuk fisik, beberapa penulis memilih untuk mengakui *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud dalam laporan neraca, dengan model biaya sebagai perlakuan dasar dan model revaluasi sebagai alternatif yang tersedia (Berchowitz, 2017 dalam Prochazka, 2018). Dengan asumsi di atas, maka beberapa kajian dari penelitian terdahulu bisa menggolongkan *cryptocurrency* menjadi aset tak berwujud karena, secara khusus aset digital. Berikut hasil studi literatur yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan atau berkata kunci *cryptocurrency* dan aset tak berwujud: (lihat lampiran 1, Tabel 4.2.)

Faktanya, perusahaan sekaliber Tesla dan Microstrategy (keduanya ada di Amerika Serikat) memberlakukan Bitcoin sebagai *indefinite-lived intangible assets* meskipun kedua perusahaan tersebut membeli untuk dipegang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diperjualbelikan. Mereka mengakuntansikan Bitcoin sebagai *indefinite-lived intangible assets* sesuai dengan ASC 350 *Intangibles-Goodwill and Other* (Luo & Yu, 2022). Artinya, secara praktis *cryptocurrency* memang diakui

sebagai aset digital di bawah akun aset tidak berwujud. Pertanyaan mendasar mengenai *cryptocurrency* sebagai aset digital adalah selalu merupakan aset tak berwujud (*intangible assets*). Mengingat aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset yang tidak memiliki substansi fisik, banyak aset digital yang memenuhi definisi ini (PWC, 2023). Lebih jauh, Buyukkurt (2021) menyatakan bahwa *cryptocurrencies* memenuhi tiga kriteria besar yaitu bisa diidentifikasi, tanpa wujud fisik, dan non-moneter), maka *cryptocurrency* cocok untuk definisi aset tak berwujud sebagaimana memenuhi kriteria tercatat di IAS 38. Mendukung penelitian sebelumnya, Pramana (2023) menyebutkan ada 4 karakteristik *cryptocurrency* termasuk sebagai aset tak berwujud, yaitu (a) kontrol, (b) manfaat ekonomis masa depan, (c) tanpa wujud fisik, (d) dapat diidentifikasi. Adapun ketika mereferensikan kepada IAS 38, maka *cryptocurrency* ketambahan satu ciri lagi yaitu (e) non-moneter.

Kontrol berkaitan dengan kepemilikan aset tersebut untuk kepentingan atas sumberdaya atau pun manfaat ekonomis tertentu. Manfaat ekonomis masa depan merupakan harapan bagi pemegang *cryptocurrency* meskipun bukan merupakan hak kontraktual yang menjanjikan suatu manfaat ekonomis secara pasti. Adapun tanpa wujud fisik jelas sebab *cryptocurrency* direpresentasikan secara digital. Dapat diidentifikasi artinya mampu dijual atau dialihkan secara terpisah dari pemegangnya (EY, 2019). Adapun ciri terakhir, non-moneter, memiliki makna bahwa *cryptocurrency* bernilai fluktuatif dan nilainya didasarkan permintaan dan penawaran sehingga tidak bisa memenuhi definisi aset moneter yang secara pasti dapat ditentukan nilai uangnya. Pengukuran awal *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud tergantung pada saat mengakuisisi aset tersebut, diakui secara *at cost* (pada biayanya). Kemudian dalam pengukuran setelahnya untuk kepentingan amortisasi maupun *impairment*, maka entitas mesti memilih antara model biaya atau model revaluasi biaya. Adapun masing-masing model memiliki tantangan yang tentunya tidak dapat dibahas secara mendalam di sini.

Meskipun banyak dukungan terhadap pengakuan *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud, Prochazka (2018) memberikan pandangan berbeda. Dalam halnya mengakuisisi *cryptocurrency*, tidak ada standar yang bisa digunakan untuk

menjustifikasi *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud. Baik *cryptocurrency* tersebut ditambah maupun dibeli dari pihak eksternal, *cryptocurrency* tidak memenuhi karakteristik ekonomis dari aset tak berwujud. Tidak ada entitas yang dapat memenuhi semua 6 kondisi untuk fase pengembangan pada IAS 38.57 (Prochazka, 2018). Namun tetap, *cryptocurrency* memenuhi definisi dari aset tak berwujud, meskipun tidak memenuhi karakteristik ekonomis aset tak berwujud. Oleh karena itu, penyesuaian dan redefinisi dari standar di masa-masa mendatang harus diwujudkan untuk menyelesaikan isu *cryptocurrency*.

Penulis melaksanakan wawancara terbatas dengan dua narasumber. Narasumber pertama merupakan pemegang aktif *cryptocurrency* sekaligus pelaku pasar *cryptocurrency* (inisial K). Narasumber kedua merupakan Ketua IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Wilayah Jawa Timur Komisariat Jember, sekaligus dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Jember (inisial W). Narasumber K menjelaskan bahwa asal muasal *cryptocurrency* tidak lepas dari dunia virtual (maya) yaitu gim daring. Gim tersebut memerlukan kemudahan bertransaksi secara langsung (*direct payment*) untuk mempercepat proses bertransaksi di dunia gim tersebut. Semakin banyak pengguna membuat perputaran transaksi *cryptocurrency* semakin besar. Hal ini yang mendorong harga *cryptocurrency* semakin tinggi. Tak khayal lagi bahwa *cryptocurrency* dapat dikatakan sebagai alat pembayaran, karena sudah terbukti dari beberapa fenomena sebelumnya bahwa transaksi-transaksi sudah dilakukan baik individu maupun perusahaan. Perusahaan seperti Tesla, MicroStrategy, bahkan Ferrari, secara umum menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. Artinya, dari sisi ekonomi, *cryptocurrency* telah menjadi bagian perkembangan teknologi yang tak terhentikan.

Lebih lanjut, Suwardjono (2018) menyebutkan bahwa praktik akuntansi dipengaruhi oleh rerangka konseptual yang dibangun berdasarkan penalaran logis. Rerangka konseptual tersebut mengevaluasi dan membenarkan praktik akuntansi yang berjalan sekaligus mempengaruhi dan mengembangkan praktik akuntansi masa datang. Narasumber W menjelaskan bahwa standar-standar yang ada terkait dengan pengukuran dan pelaporan keuangan setidaknya ada 3 hal yang beliau kutip dari *Accounting Theory* (Wolk, 2013), digambarkan seperti berikut (lihat lampiran

2, Gambar 4.1.). Teori akuntansi, faktor politik, dan kondisi ekonomi secara simultan mempengaruhi pembuatan kebijakan akuntansi. Kondisi ekonomi yang mewajarkan adanya *cryptocurrency* ini membuat syarat kondisi ekonomi sudah terpenuhi (lihat lampiran 3, baris 54). Narasumber K menyampaikan bahwa *cryptocurrency* adalah suatu keniscayaan dari pengembangan teknologi itu sendiri (lihat lampiran 4, baris 175). Maka dari itu, ada *gap* antara kondisi ekonomi riil di lapangan dengan kebijakan pemerintah dan keilmuan teori akuntansi. Bagian 4.1 dari penelitian ini sudah mengulas bagaimana pengakuan *cryptocurrency* dipandang dari keilmuan akuntansi. Bagian 4.2 ini lebih banyak akan mengulas bagaimana validasi pengguna, mengarah pada *practical issues* dan padangan normatifnya. Isu-isu praktis berkenaan dengan penggunaan teknologi. Pandangan normatif berkaitan dengan regulasi-regulasi yang mengatur, baik dari dalam batas yuridis Undang-Undang, maupun *standard-setting* oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Secara praktis, narasumber K menjelaskan suatu contoh model jika *cryptocurrency* dipergunakan sebagai alat pembayaran (lihat lampiran 4, baris 385). Bisnis mengenal untung dan rugi. Untung dan rugi sesaat tidak bisa diukurkan pada volatilitas harga *cryptocurrency*. Bagi pebisnis, untung dan rugi merupakan hal yang biasa. Narasumber K menyatakan bahwa dalam 1 detik bisa saja seorang pebisnis untung dari kenaikan harga *cryptocurrency* tersebut, namun jika harga turun, ia tidaklah rugi (lihat lampiran 4, baris 390). Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena pebisnis tersebut memperoleh aset dan aset tersebut telah ditaksir harganya sekian setara dengan *cryptocurrency* yang ditukarkan. Pengukuran nilai suatu *cryptocurrency* diukurkan pada nilai wajarnya pada saat itu. Penggunaan *cryptocurrency* untuk ditukarkan menjadi sebuah aset yang lain memvalidasi fungsinya sebagai alat bayar, meskipun bukan suatu alat bayar yang sah. Namun narasumber W menjelaskan sisi normatif bahwasannya pemerintah jelas akan mengambil tindakan melawan hal tersebut (lihat lampiran 3, baris 350). Penggunaan masif dari *cryptocurrency* dapat membahayakan keberadaan mata uang suatu negara. Pemerintah masih dalam kapasitasnya untuk mengontrol keberadaan suatu mata uang beredar. Apabila rupiah tergantikan, maka akan

mempengaruhi neraca perdagangan. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mempengaruhi inflasi karena arahnya adalah menuju *single currency* (lihat lampiran 3, baris 375). Dari penjelasan di atas jelas bahwa dalam pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* sebagai kas/tunai/alat bayar/unit moneter, masih banyak pro-kontra. Pemegang dan pelaku pasar kripto optimis bahwa suatu saat *cryptocurrency* menjadi suatu mata uang yang dipergunakan, seiring dengan mata uang (lihat lampiran 4, baris 420). Hal itu dapat diberlakukan jika pemerintah secara penuh mendukung penggunaan *cryptocurrency* dan berperan sebagai regulator, bukan "pemain".

Lalu berkenaan dengan pengukuran *cryptocurrency* sebagai persediaan, narasumber K membenarkan bahwa ada barang-barang yang tak berwujud (*intangible goods*) (lihat lampiran 4, baris 495). Bisa saja perusahaan melakukan jual beli *cryptocurrency* karena memiliki *idle cash*. Namun, kembali lagi ke profil risiko dari bisnis tersebut. Kategori *risk-averse* cenderung tidak mengambil peluang untuk *trading* di *cryptocurrency*, sedangkan *risk-taker* cenderung berani memainkan *idle cash* untuk *trading* di *cryptocurrency*. Hal ini bisa berlaku semua entitas, baik individu maupun korporasi. Narasumber K juga memberikan perbedaan antara *cryptocurrency* dengan aset tak berwujud lainnya, seperti hak paten, *copyright*, dsb. (lihat lampiran 4, baris 516). *Cryptocurrency* memiliki kemungkinan untuk diperdagangkan di *market/exchanger* sedangkan aset tak berwujud lainnya tidak bisa. Namun, penilaian *cryptocurrency* sebagai aset tak berwujud jelas menimbulkan tanda tanya besar bagi para *standard-setter*. Narasumber W menyatakan bahwa yang dijual ke pasar adalah produk kriptonya, koinnya, bukan lagi teknologi *blockchain*-nya (lihat lampiran 3, baris 212). Padahal, secara pengakuan biaya, misal saja ada investor yang berinvestasi untuk pengembangan proyek *cryptocurrency*, itulah yang disebut *intangible asset*. Secara normatif, kapasitas *cryptocurrency* sebagai *intangible asset* adalah pada teknologinya itu yang kemudian diinvestasikan sejumlah sekian untuk kemudian dikembangkan. Nilainya diungkapkan, dan diberi goodwill, ketika muncul selisih harga, selisih tersebut dituangkan di OCI (*Other Comprehensive Income*). Hal ini selaras dengan studi literatur-literatur sebelumnya yang mendukung penggunaan

nilai FVOCI. Hanya saja, bagaimana menempatkan *cryptocurrency* dalam kapasitasnya itulah yang membuat pengakuan *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan di Indonesia.

Narasumber W mengakui sulit untuk mengumpulkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi *cryptocurrency* nantinya menjadi suatu aset yang diakui. Ketidadaan *underlying* dan kebergantungan terhadap *supply-demand* saja tidak bisa memunculkan kepercayaan sebagaimana saat ini uang fiat dipergunakan dalam transaksi sehari-hari. Orang-orang masih melihat nilai *cryptocurrency* yang diekualisasikan dengan rupiah (lihat lampiran 3, baris 371). Namun, jika kemudian dalam suatu saat *cryptocurrency* ini sudah dianggap menjadi alat tukar, bisa jadi masyarakat akan mengabaikan rupiah atau mata uang yang berlaku. Hal ini berkenaan dengan kepentingan perhitungan devisa dsb. Oleh karena itu narasumber W mengatakan bahwa dalam jangka panjang pemerintah mesti meregulasi hal tersebut (lihat lampiran 3, baris 385). Hanya saja, Pemerintah tidak mungkin bisa memonitor konsep *cryptocurrency* pada *blockchain* (lihat lampiran 3, baris 96). Jika pemerintah masuk meregulasi *cryptocurrency* tersebut, konsep *blockchain* akan hilang (lihat lampiran 3, baris 287).

Narasumber W juga mencemaskan perihal keandalan dari *cryptocurrency* (lihat lampiran 3, baris 407). Ada *trade-off* antara relevansi dan reliabilitas (lihat lampiran 3, baris 409). Relevansi laporan keuangan terhadap perkembangan kondisi ekonomi mengharuskan perusahaan mengakui transaksi *cryptocurrency* tadi, terlepas dari bagaimana pengakuannya. Hanya saja, hingga saat ini belum ada peraturan yang memadai. Jika akuntan menggunakan nilai wajar untuk mengukur sebuah *cryptocurrency*, ia mendapat relevansinya namun tidak dapat mendapat keandalannya. Terlepas dari *cryptocurrency* yang ada di pasar, bagaimana dengan *cryptocurrency* yang ditambang? Narasumber W menjelaskan ada *lag* antara biaya yang dikapitalisasi dengan nilai yang ada di pasar nantinya (lihat lampiran 3, baris 424). Nilai tersebut bukanlah *goodwill* sebagaimana biasanya aset tak berwujud diamortisasi selisih nilai akuisisinya menjadi *goodwill*. Nilai tersebut adalah nilai riil yang bisa direalisasikan untung-ruginya.

Asas *informativeness* merupakan hal yang esensial dalam pelaporan keuangan (Chen, 2019). Sejauh ini *cryptocurrency* memang dilaporkan secara "suka-suka" oleh pemegang atau pemilik karena memang belum ada aturan baku. Menghasilkan laporan keuangan yang *auditable* mengacu pada rerangka-rerangka konseptual yang sudah coba dituangkan di pembahasan sebelumnya juga merupakan salah satu langkah untuk menuju pelaporan keuangan yang lebih baik. Adapun fenomena-fenomena ekonomi tidak bisa lagi dibendung oleh karena teknologi itu terus berkembang. Konsep pengembangan *cryptocurrency* akan terus berlanjut hingga di suatu titik *standard-setter* maupun regulator memutuskan akan diberlakukan sebagai apa dan bagaimana. Sebagai "apa" mengacu pada kemungkinan pengakuan-pengakuan untuk *cryptocurrency*, sedangkan "bagaimana" mengacu pada pengukuran yang bisa diaplikasikan untuk *cryptocurrency* agar relevan tanpa mengabaikan prinsip reliabilitas.

4.2. Alternatif Pandangan Lain Pengakuan dan Pengukuran *Cryptocurrency*

4.2.1. Pendekatan *Cryptocurrency* sebagai Persediaan

Inventories are assets:

- (a) *held for sale in the ordinary course of business;*
- (b) *in the process of production for such sale; or*
- (c) *in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services.*

- IAS 2.6

IAS 2 berlaku untuk semua persediaan terkecuali instrumen finansial (IAS 32; IFRS 9) dan aset-aset biologis yang terkait dengan aktivitas pertanian dan produksi pertanian pada saat panen (IAS 41). IAS 2 tidak berlaku untuk pengukuran persediaan untuk (a) produsen produk pertanian dan hutan, hasil pertanian setelah panen, dan mineral dan produk mineral, sejauh diukur pada nilai realisasi bersih sesuai dengan praktik yang mapan di industri tersebut. Ketika persediaan tersebut diukur pada nilai realisasi bersih, perubahan nilai tersebut diakui dalam laba rugi pada periode perubahan; (b) Pedagang pialang komoditas yang mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Apabila persediaan tersebut diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual,

perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual diakui dalam laba rugi pada periode perubahan. Berikut adalah beberapa literatur yang menampilkan berkaitan atau berkata kunci *cryptocurrency* dan persediaan.

(lihat lampiran 1, Tabel 4.3.)

Ram (2016) dalam sebuah wawancara dengan Teknisi Akuntan menemukan bahwa terdapat suatu pandangan bahwa Bitcoin (*cryptocurrency* dengan kapitalisasi pasar terbesar) merupakan sebuah instrumen finansial. Namun, dalam sebuah analisis korepondensi, ketika *cryptocurrency* digunakan sebagai bagian dari operasi non-keuangan, maka penggunaan *cryptocurrency* lebih dekat dengan persediaan, bahkan juga bisa sebagai aset tetap (*Plant & Equipment*). Bersamaan dengan itu, Hyytia & Sundqvist (2019) juga dalam sebuah wawancara memunculkan pernyataan bahwa semua orang belum sepakat akan bagaimana *cryptocurrency* diklasifikasikan, tetapi jelas semua orang bisa sepakat bahwa itu (*cryptocurrency*) bukan kas. Hal yang mendukung ialah jika perusahaan menerbitkan *cryptocurrency*, maka itu dibuat (layaknya perusahaan manufaktur), dan jelaslah kemudian jika *cryptocurrency* diperlakukan sebagai persediaan. Hyytia & Sundqvist (2019) menjelaskan bahwa *cryptocurrency* dapat diperlakukan layaknya persediaan seperti perusahaan keuangan yang memperlakukan saham-sahamnya sebagai persediaan.

Hal ini didukung oleh McGuire & Massoud (2018) yang menyatakan bahwan akuntansi untuk pedagang pialang komoditas berbeda. CC juga diperlakukan sama sebagai barang dagangan atau sebagai komoditas yang dimiliki oleh pedagang pialang (Prochazka, 2018). Jika *cryptocurrency* dianggap layaknya komoditas yang dikumpulkan dengan tujuan dalam waktu dekat akan dijual dan menghasilkan laba dari fluktuasi harganya atau margin dari pedagang pialangnya, maka *cryptocurrency* bisa diklasifikasikan sebagai persediaan komoditas pada *fair value costs to sell* (EY, 2019). Nuraliati (2018), senada dengan yang dipaparkan oleh EY, menyebutkan bahwa bitcoin memenuhi kriteria sebagai persediaan, di mana pengukurannya menggunakan PSAK 14 tentang persediaan dimana entitas untuk mengukur komoditasnya dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan selisih nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Paparan di atas menunjukkan bahwa dukungan penelitian-penelitian terdahulu cukup meyakinkan *cryptocurrency* untuk dicatat sebagai persediaan, khususnya bagi pedagang pialang atau entitas jual-beli aset kripto. Namun, bagaimanakah dengan perusahaan penambangnya? *Cryptocurrency* bukan hanya beredar oleh sebab jual-beli, namun juga ada aktivitas para penambang yang tidak bisa luput diabaikan. Pedoman IAS 2 untuk biaya atas konversi seharusnya diterapkan untuk penerapan akuntansi *cryptocurrencies* yang diperoleh dari menambang (Prochazka, 2018). Biaya-biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, termasuk biaya *overhead* harus dihitung. Biaya-biaya langsung seperti biaya listrik dan tenaga kerja, kemudian biaya tidak langsung seperti biaya depresiasi alat dan perangkat lunak untuk menambang, dan lain-lain, menjadi biaya-biaya yang ditentukan untuk biaya (kos) produksi. Prochazka (2018) juga menambahkan penjelasannya bahwa jika *cryptocurrencies* ditambang kemudian segera dikonversikan menjadi uang fiat, maka penjualan tersebut dicatat sebagai pendapatan. Namun, jika *cryptocurrencies* ditambang untuk dimiliki untuk penjualan di kemudian hari (dengan harapan harga pasar lebih tinggi), model FVPL (*fair value through profit and loss*) atau FVOCI (*fair value-other comprehensive income*).

Walaupun banyak yang pendapat yang mendukung pencatatan *cryptocurrency* sebagai persediaan, nyatanya ada beberapa pihak yang memberikan pandangan kontra. Perlu digarisbawahi bahwa kepemilikan *cryptocurrency* dalam waktu yang lama memiliki arti yang berbeda. PWC (2019) menyebutkan bahwa jika sebuah entitas memegang token kripto untuk tujuan investasi (tentunya, kenaikan modal) melewati periode waktu yang panjang, hal tersebut tidak memenuhi definisi dari persediaan. Adapun US GAAP memiliki pandangan tersendiri bahwasannya, suatu persediaan haruslah dalam bentuk fisik, sehingga tidak ada cara untuk melaporkan *cryptocurrency* sebagai persediaan (Hartley, 2019).

4.2.2. Pendekatan *Cryptocurrency* Sebagai Kas/Setara Kas atau Unit Moneter

IFRS tidak memberikan pengertian yang eksplisit tentang pengertian kas. Namun dalam IAS 32, kas dijelaskan sebagai aset finansial yang dipergunakan sebagai alat pertukaran. IAS 32 juga mempergunakan istilah kas dan mata uang

secara selaras, sehingga dapat dimaknai bahwa kas dan mata uang adalah 2 hal yang berkaitan bersama dengan penggunaannya sebagai alat tukar. IAS 32 mengindikasikan bahwa kas merupakan alat pertukaran. Alat tukar yang dimaksudkan ialah media pembayaran yang digunakan sebagai nilai ganti barang atau jasa yang diperoleh, baik secara fisik maupun secara elektronik.

Oleh karena itu, kas beririsan definisinya dengan unit moneter sehingga dapat dibandingkan apakah suatu *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai unit moneter. Unit moneter sejatinya merupakan keluaran dari bank sentral suatu negara. Artinya, legalitas *cryptocurrency* dipengaruhi tendensi penggunaan aset kripto dalam suatu negara. Sistem geopolitik juga mempengaruhi penggunaan *cryptocurrency* di suatu negara. Berbagai alasan di antaranya:

- a) stabilitas nilai *cryptocurrency* dipengaruhi permintaan dan penawaran. Artinya, semakin banyak yang menggunakan awaran. Artinya, semakin banyak yang menggunakan *cryptocurrency* atau semakin besar nilai akuisisi *cryptocurrency* oleh “orang besar” di suatu negara dapat memberikan pengakuan berarti terhadap *cryptocurrency*
- b) penerimaan (*acceptance*) dari entitas pengguna. Artinya, semakin banyak toko ataupun individu yang melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* akan mempercepat pembangunan ekosistem kripto itu sendiri.

Cryptocurrency memang diciptakan untuk menggantikan posisi dari kas ataupun unit moneter. Namun, sebagaimana diketahui bersama bahwa tidak semua negara secara yuridis mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Hanya negara seperti El Salvador yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah (Tidy, 2022, diakses online melalui <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61824735>).

Berikut hasil studi literatur yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan atau berkata kunci *cryptocurrency* dan kas/setara kas ataupun unit moneter:

(lihat lampiran 1, Tabel 4.4.)

Dari hasil studi literatur di atas dapat dipahami bahwa banyak penulis tidak yakin akan keberadaan *cryptocurrency* sebagai kas / setara kas maupun sebagai unit moneter. Penelitian-penelitian terdahulu (tercantum pada table di atas) menegaskan bahwa *cryptocurrency* masih belum memenuhi definisi sebagai kas. Sebagian besar menentukan resistensi *cryptocurrency* menjadi kas/setara kas atau unit moneter adalah otoritas maupun bank sentral. Penolakan di berbagai negara untuk melegalkan *cryptocurrency* menjadi alat pembayaran yang sah, menjadi alasan utama mengapa *cryptocurrency* belum dapat diakui sebagai kas/setara kas atau unit moneter.

Nuraliati (2018) menjelaskan bahwa PSAK 50 pp 03 mendefinisikan kas (mata uang) yaitu aset keuangan karena merupakan alat tukar, sedangkan PSAK 2 pp 07 menyatakan setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk investasi atau tujuan lain. Syaratnya untuk memenuhi kualifikasi kas atau setara kas, suatu investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan, sehingga investasi dikatakan kas/setara kas jika akan segera jatuh tempo dalam waktu singkat, contoh 3 bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka *cryptocurrency* sebenarnya bisa dikategorikan investasi setara kas karena bisa ditukar sewaktu-waktu menjadi kas. Namun, nilai tukar *cryptocurrency* bersifat fluktuatif. Berikut adalah grafik perubahan nilai beberapa *cryptocurrency* terhadap nilai Rupiah Indonesia (IDR).

Bitcoin (lihat lampiran 2, Gambar 4.2.)

Ethereum (lihat lampiran 2, Gambar 4.3.)

Dari kedua contoh di atas, Bitcoin dan Ethereum, dapat dipahami bahwa nilai *cryptocurrency* terhadap mata uang yang resmi berlaku di Indonesia yaitu Rupiah (IDR) mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Pengakuan *cryptocurrency* pada laporan keuangan mengakibatkan ketidakstabilan pada neraca oleh sebab nilainya yang berubah signifikan dalam tempo 3 bulan. Sebagai catatan, perusahaan di Indonesia, khususnya yang terdaftar di BEI diminta mengirim laporan keuangan per triwulan.

Prochazka (2018) memberikan pandangan yang lain sehingga *cryptocurrency* dapat diperlakukan sebagai kas. Dengan melihat pengertian uang dalam suatu pandangan ekonomi yang lebih luas, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum (*generally accepted*) sebagai pembayaran untuk barang dan jasa atau dalam pembayaran utang (Mishkin and Serletis, 2011). *Cryptocurrency* dapat memenuhi syarat tersebut, dan memang secara logika pembayaran, skema pembayaran menggunakan *cryptocurrency* tidak berbeda dengan pembayaran elektronik. Pembayaran melalui *crypto wallet* (akun untuk menyimpan aset kripto) hanya berbeda peran bank sentralnya ketika dibandingkan dengan pembayaran uang digital, yang mana di Indonesia, hal tersebut disebut pembayaran melalui QRIS.

Jika secara hipotetis, sebuah perusahaan menggunakan *cryptocurrency* untuk kegiatan operasional bisnisnya, misal saja untuk pembayran barang dan jasa yang dijual, maka IAS 21 seharusnya dapat diaplikasikan dalam kasus seperti ini (Prochazka, 2018). Menurut IAS 21,

[21.21-22] A foreign currency transaction should be recorded initially at the rate of exchange at the date of the transaction (use of averages is permitted if they are a reasonable approximation of actual)

[21.23] At each subsequent balance sheet date:

- *foreign currency monetary amounts should be reported using the closing rate*
- *non-monetary items carried at historical cost should be reported using the exchange rate at the date of the transaction*
- *non-monetary items carried at fair value should be reported at the rate that existed when the fair values were determined*

Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai valuta asing, sehingga pada laporan keuangan nilainya akan dikonversikan sesuai dengan harga penutupan.

Cryptocurrency dalam halnya sebagai mata uang asing memiliki beberapa faktor untuk diperlakukan sebagai mata uang fungsional. PSAK 10 mensyaratkan perusahaan untuk mengukur transaksinya menggunakan mata uang fungsionalnya

dan membolehkan perusahaan menyajikan laporan keuangannya dengan mata uang apa saja (Nuraliati, 2018). Namun, perlu ada beberapa hal yang diperhatikan mengenai *cryptocurrency* sebagai mata uang fungsional, di antaranya adalah harga jual, kekuatan perundang-undangan, dan pengaruh terhadap biaya-biaya lain. PSAK 10 pun jelas mengatur transaksi mata uang asing. Transaksi dalam mata uang asing diakui sebagai transaksi yang dapat didenominasikan dan diperlukan penyelesaian dalam mata uang asing (Ariefiara & Yanthi, 2017). Transaksi tersebut dapat timbul ketika perusahaan:

- a. Melakukan pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan harga yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing.
- b. Meminjamkan dana ketika jumlah utang atau tagihan dapat didenominasikan dalam mata uang asing.
- c. Memperoleh atau melepas aset dan mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang dapat didenominasikan dalam mata uang asing.

Dari hasil kajian literatur di atas, maka *cryptocurrency* belum seutuhnya memenuhi syarat untuk diberlakukan sebagai mata uang asing karena masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Sebagian yang telah disampaikan di atas (Prochazka, 2018) hanya memberikan gambaran secara hipotetis dan tidak menggambarkan maksud riil dari penerapan *cryptocurrency* oleh perusahaan, baik sebagai kas/setara kas, maupun unit moneter (juga termasuk di dalamnya sebagai mata uang).

Ernst & Young (2021) menambahkan pengandaian jika dalam periode yang akan datang, sebuah aset kripto memperoleh level penerimaan dan stabilitas yang tinggi, maka para pemilik *cryptocurrency* mungkin harus mempertimbangkan apakah aset kripto tersebut mewakili alat pertukaran dan unit sebuah akun hingga dimana hal tersebut dapat menjadi dasar dimana pemilik *cryptocurrency* menganggap dan mengukur semua transaksi dalam laporan keuangannya. Artinya, ada kemungkinan di masa mendatang bahwa perusahaan dapat menjadikan *cryptocurrency* sebagai mata uang fungsional sebagaimana disampaikan di pemaparan sebelumnya (Prochazka, 2018; Nuraliati, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Cryptocurrency berkembang cepat seiring teknologi terus berkembang. Situasi tersebut mempengaruhi jalannya kondisi ekonomi yang kemudian mendisrupsi akuntansi dan pelaporan keuangan. Penulis telah menemukan bahwa *cryptocurrency* secara definisi telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset digital pada akun aset tak berwujud dalam rangka menjawab rumusan masalah pada bab pertama. Hanya saja, perihal pengukurannya masih belum dapat diukur secara pasti karena melibatkan banyak faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dalam mengukur sebuah akun yaitu kondisi ekonomi, faktor politik, dan teori akuntansi itu. Kondisi ekonomi kita melaju kencang oleh disrupsi teknologi tadi, namun jika faktor politik (regulasi pemerintah) dan teori akuntansi (standar-standar akuntansi keuangan) kita masih belum bergerak ke sana, maka pemikiran tentang akuntansi *cryptocurrency* masih menjadi sebatas argumentasi yang diperdebatkan. Namun, jelas bahwa ketika mengaitkan dengan pengukurannya, ada *lag* antara biaya yang dikapitalisasi dari suatu pengembangan aset tak berwujud tadi, dengan nilai wajar. Andaikata pun, diukurkan pada nilai wajarnya, selisih tersebut bukanlah *goodwill* yang dapat diamortisasi, melainkan OCI (*other comprehensive income*). Pemikiran-pemikiran yang dituangkan ini tentunya tidak langsung membuahkan suatu penemuan akan standar yang baku, namun setidaknya memberikan cakrawala berpikir baru yang menambahkan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

5.2 Saran

Karya tulis ini terbatas pada pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency* itu saja. Fenomena-fenomena yang ditangkap oleh penulis terbatas pada kepentingan memperoleh informasi terkait pengakuan dan pengukurannya. Banyak hal yang masih dapat dieksplorasi mengenai akuntansi *cryptocurrency*, sehingga penulis berharap ada penelitian-penelitian selanjutnya yang dapat mengembangkan keilmuan akuntansi *cryptocurrency* menuju arah yang lebih andal dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Alsalmi, N., Ullah, S., & Rafique, M. (2023). Accounting for digital currencies. *Research in International Business and Finance*, 64, 101897. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.101897>
- Bech, M., & Garrat, R. (2017). Central bank cryptocurrencies. *BIS Quarterly Review*.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2022). REGULATION AND THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCY IN INDONESIA. *International Journal*, 6(3).
- Bitpanda. (2023). *The difference between a cryptocurrency and fiat money*. <https://www.bitpanda.com/academy/en/lessons/whats-the-difference-between-a-cryptocurrency-like-bitcoin-and-fiat-money>
- Brown, R., & Lee, N. (2017). The theory and practice of financial instruments for small and medium-sized enterprises. *OECD*.
- Chen, Q., Schipper, K., & Zhang, N. (2019). Measuring Accounting Asset Informativeness. *Accounting Theory - Analytical Models eJournal*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3315505>
- Conotoxia.com. (2023). *Cryptocurrency features | Digital currency wallet information*. Conotoxia.Com. <https://conotoxia.com/cryptocurrencies/what-are-cryptocurrencies/cryptocurrency-features>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). Cryptocurrencies as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Cvetkova, I. (2018). Cryptocurrencies legal regulation. *BRICS Law Journal*, 5, 128–153. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-2-128-153>
- Foley, S., Karlsen, J. R., & Putniņš, T. J. (2019). Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies? *The Review of Financial Studies*, 32(5), 1798–1853. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015>
- FSB. (2022). *Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets*.
- Garanina, T., Ranta, M., & Dumay, J. (2022). Blockchain in accounting research: Current trends and emerging topics. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(7), 1507–1533. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4991>
- Giudici, G., Milne, A., & Vinogradov, D. (2020). Cryptocurrencies: Market analysis and perspectives. *Journal of Industrial and Business Economics*, 47(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00138-6>
- Groenewald, A. (2021). *Applying IFRS Accounting by holders of crypto assets*.

- Gros, M., & Siebenbrunner, C. (2019). Money Creation in Fiat and Digital Currency Systems. *IMF Working Papers*.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/20/Money-Creation-in-Fiat-and-Digital-Currency-Systems-48843>
- Hacioglu, U. (Ed.). (2019). *Blockchain Economics and Financial Market Innovation: Financial Innovations in the Digital Age*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25275-5>
- Handoko, L. B., Tihar Marpaung, A., & Ayuanda, N. (2021). Development of Cryptocurrency in the Indonesian Economy. *2021 7th International Conference on E-Business and Applications*, 54–59. <https://doi.org/10.1145/3457640.3457648>
- Hartley, A. (n.d.). *Financial reporting of cryptocurrency*.
- Hasso, T., Pelster, M., & Breitmayer, B. (2019). Who trades cryptocurrencies, how do they trade it, and how do they perform? Evidence from brokerage accounts. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 23, 64–74. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2019.04.009>
- Hoesada, J. (2021). *TEORI PENURUNAN NILAI ASET*.
- Hyttiä, P., & Sundqvist, E. (n.d.). *ACCOUNTING FOR CRYPTOCURRENCIES – A NIGHTMARE FOR ACCOUNTANTS*.
- IRS. (2023). *Digital Assets | Internal Revenue Service*. <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/digital-assets>
- Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., Suman, R., & Khan, S. (2022). A review of Blockchain Technology applications for financial services. *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, 2(3), 100073. <https://doi.org/10.1016/j.tbench.2022.100073>
- Jeris, S. S., Ur Rahman Chowdhury, A. S. M. N., Akter, Mst. T., Frances, S., & Roy, M. H. (2022). Cryptocurrency and stock market: Bibliometric and content analysis. *Heliyon*, 8(9), e10514. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10514>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting (IFRS edition, third edition)*. Wiley.
- Luo, M., & Yu, S. (2022). Financial reporting for cryptocurrency. *Review of Accounting Studies*. <https://doi.org/10.1007/s11142-022-09741-w>
- McGuire, R., & Massoud, M. (2018). *An Introduction to Accounting for Cryptocurrencies*.
- Li, D., Huang, J., & Wang, L. (2019). The Impact of Digital Currency on the Financial System: Universal Decentralized Digital Currency, Is It Possible? *Journal of Economics and Public Finance*, 5, p203. <https://doi.org/10.22158/jepf.v5n2p203>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan: 37, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Nadiar, R., Nor, W., & Safrida, L. (2023). Cryptocurrency Transaction: Is it Relevant to Indonesian Accounting Standards? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 217–226. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.18523>
- Nofer, M., Gomber, P., Hinz, O., & Schiereck, D. (2017). Blockchain. *Business & Information Systems Engineering*, 59(3), 183–187. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0467-3>
- Nuraliati, A., & Azwari, P. C. (2019). AKUNTANSI UNTUK CRYPTOCURRENCY. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.2885>
- Osho, A. & Ajetunmobi. (2020). *Justifying the Concept of Fair Value as a Theory through International Financial Reporting Standard (IFRS)*.
- Pramana, I. G. G. A., Mayangsari, S., & Oktris, L. (2023). ACCOUNTING ANALYSIS FOR CRYPTO-ASSETS BASED ON IFRS. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 10(1), 19–44. <https://doi.org/10.25105/jmat.v10i1.9637>
- Procházka, D. (2018). Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrencies under IFRS: A Comparison and Assessment of Competing Models. *The International Journal of Digital Accounting Research*, 161–188. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v18_7
- PWC. (2019). *Cryptographic assets and related transactions: Accounting considerations under IFRS*.
- Raharjo, B. (2022). *Uang Masa Depan*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahmawati, E. (2006). Support and Against Historical Cost Accounting: Is it Value Relevance for Decision Making? *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 7(1).
- Raiborn, C., & Sivitanides, M. (2015). Accounting Issues Related to Bitcoins. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 26(2), 25–34. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22016>
- Ram, A., Maroun, W., & Garnett, R. (2016). Accounting for the Bitcoin: Accountability, neoliberalism and a correspondence analysis. *Meditari Accountancy Research*, 24(1), 2–35. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2015-0035>
- Ramassa, P., & Leoni, G. (2022). Standard setting in times of technological change: Accounting for cryptocurrency holdings. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(7), 1598–1624. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2020-4968>
- Shehada, F., & Shehada, M. (2020). The Challenges facing IFRS for Accounting of Cryptocurrencies. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3664571>
- Sony. (2021, December 20). *Peran Akuntan dan Masa Depan Akuntansi dalam Era Transformasi Digital*. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3479-peran-akuntan-dan-masa-depan-akuntansi-dalam-era-transformasi-digital>

- Sony. (2021, December 20). *Peran Akuntan dan Masa Depan Akuntansi dalam Era Transformasi Digital*. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3479-peran-akuntan-dan-masa-depan-akuntansi-dalam-era-transformasi-digital>
- Syamsiah, N. O. (2017). *Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia*. 6(1).
- Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi : Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Tkachuk, N. (2019). Historical Cost and Fair Value: Advantages, Disadvantages, Application. *Journal of History Culture and Art Research*, 8, 173. <https://doi.org/10.7596/taksad.v8i1.2052>
- Vaidya, D. (2022, October 20). Digital Assets. *WallStreetMojo*. <https://www.wallstreetmojo.com/digital-assets/>
- Woebeking, F. (2021). Cryptocurrency volatility markets. *Digital Finance*, 3(3–4), 273–298. <https://doi.org/10.1007/s42521-021-00037-3>
- World Bank. (2017). *Global Financial Inclusion (Global Findex) Database 2017* [dataset]. World Bank, Development Data Group. <https://doi.org/10.48529/FKZS-AT21>
- Xu, J., Khan, K., & Cao, Y. (2023). Conflict and exchange rate valuation: Evidence from the Russia-Ukraine conflict. *Heliyon*, 9(6), e16527. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16527>
- Zed, Mestika. 2014. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor



LAMPIRAN 1
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian (Penulis & Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Utama
1.	<p>Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?</p> <p>(Unggul Dwi Pamungkas dan Amrie Firmansyah, 2021)</p>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan cryptocurrency oleh perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai aset berdasarkan IFRS dan PSAK. 2. Jenis klasifikasi aset yang paling relevan untuk Cryptocurrency adalah inventaris atau aset tidak berwujud, tergantung pada tujuan kepemilikan perusahaan. 3. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan mata uang kripto, badan

No.	Judul Penelitian (Penulis & Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Utama
2.	Cryptocurrency (Juli Meliza dan Isfenti Sadalia, 2021)	Kualitatif	<p>pembuat standar perlu menetapkan standar akuntansi yang jelas dan spesifik untuk membantu mengurangi ketidakpastian dan memberikan panduan yang relevan dan berguna bagi pembuat dan pengguna laporan keuangan.</p> <p>Mengenai karakteristik uang, cryptocurrency dapat diterima, tetapi perspektif ekonomi, cryptocurrency tidak sepenuhnya memenuhi mata uang karakteristik karena volatilitas harga yang tinggi.</p>

No.	Judul Penelitian (Penulis & Tahun)	Metode Penelitian	Temuan Utama
3.	Akuntansi Untuk Cryptocurrency (Ayke Nuraliati dan Peny Cahaya Azwari, 2018)	Studi Literatur	Hasil dari Studi menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan akuntansi untuk transaksi cryptocurrency apakah diperlakukan sebagai uang tunai, aset, atau inventaris.



**Tabel 4.1 Studi Literatur pada Penelitian Terdahulu mengenai
Cryptocurrency sebagai Instrumen Finansial**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Accounting Analysis for Crypto-Assets Based on IFRS	Pramana, dkk	2023	<i>Cryptocurrency</i> belum bisa dikategorikan sebagai instrumen finansial. Entitas masih perlu mengevaluasi hak kontraktual untuk membeli atau menjual aset kripto yang bisa ditetapkan dalam basis murni atau dimana aset kripto tersebut siap diubah menjadi kas
2	Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrency	Prochazka	2018	<i>Cryptocurrency</i> tidak memenuhi definisi dari sebuah aset finansial dalam bentuk instrumen ekuitas ataupun sebuah hak kontraktual untuk menerima kas
3	Menggagas Akuntansi Untuk Cryptocurrencies	Ersa Tri Wahyuni	2018	<i>Cryptocurrency</i> tidak memenuhi hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan, hal ini serupa dengan emas batangan yang juga tidak bisa dianggap sebagai instrumen keuangan walaupun likuid
4	Accounting for cryptocurrencies	ACCA Global	-	<i>Cryptocurrency</i> tidak dapat diakuntansikan sebagai aset finansial karena tidak memenuhi definisi aset finansial seperti dalam IFRS 9, juga tidak bisa disebut sekuritas utang ataupun sekuritas modal karena tidak mewakili kepentingan kepemilikan dalam sebuah entitas

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
5	Financial Reporting for Cryptocurrency	Mei Luo, Shuangchen Yu	2022	Cryptocurrency bukan kas, tetapi itu bisa menjadi aset finansial untuk token sekuritas yang mewakili kepentingan residual dalam ekuitas, atau untuk <i>stablecoins</i> yang memberi pemegang untuk hak yang legal untuk menukar koin menjadi kas
6	An Introduction to Accounting for Cryptocurrencies	Rosemary McGuire, Michael Massoud	2018	pemegang <i>cryptocurrency</i> biasanya tidak memiliki hak kontraktual apapun. Oleh karena itu, <i>cryptocurrencies</i> tidak terlihat memenuhi sebuah aset finansial non-kas sesuai dengan IAS 32 dan IFRS 9.

**Tabel 4.2 Studi Literatur pada Penelitian Terdahulu mengenai
Cryptocurrency sebagai Aset Tak Berwujud**

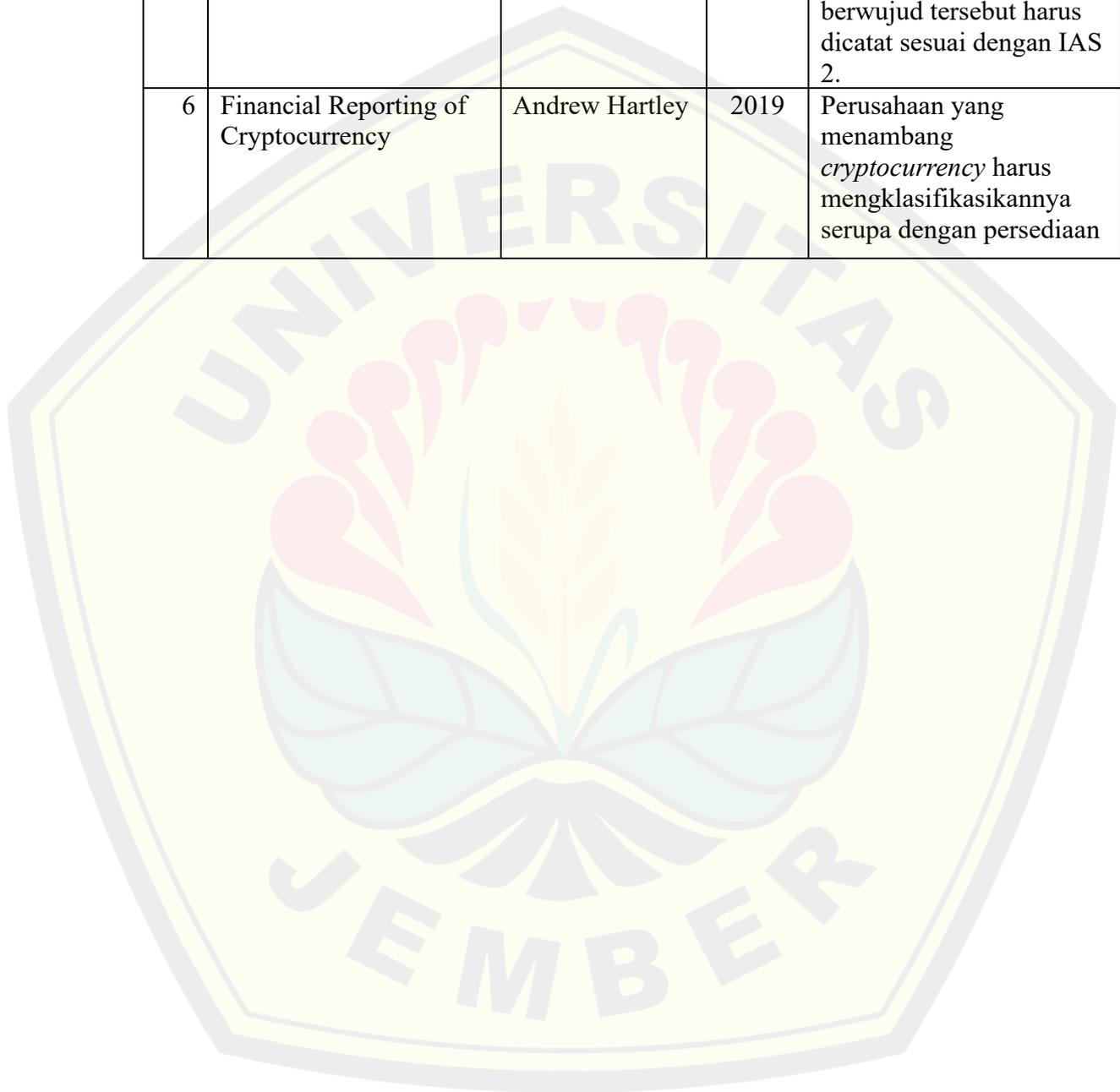
No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Applying IFRS Accounting by holders of crypto assets	EY	2019	Aset-aset kripto secara umum memenuhi definisi luas secara relatif dari aset tak berwujud, sebagaimana mereka bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dikontrol oleh pemegang, dan memberikan kenaikan untuk manfaat ekonomis masa depan untuk pemegang.
2	Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrency	Prochazka	2018	Banyak penulis mendukung <i>cryptocurrency</i> untuk diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Namun, berdasarkan analisis sebelumnya mengenai alasan ekonomi untuk mengakuisisi <i>cryptocurrency</i> , hampir tidak ada situasi yang dapat diidentifikasi di mana entitas akan menggunakan dan dapat menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai aset tidak berwujud.
3	Cryptocurrency Transaction: Is It Relevant to Indonesian Accounting Standards	Nadiar	2022	Cryptocurrency memenuhi kriteria sebagai aset tidak berwujud menurut PSAK 19 karena dapat diidentifikasi meskipun tidak memiliki bentuk fisik

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
4	Reflection of the Cryptocurrencies in the Financial Statements	Buyukkurt	2021	<i>Cryptocurrency</i> memenuhi tiga kriteria utama (yaitu, dapat diidentifikasi, tanpa substansi fisik, dan non-moneter) sebagai aset tidak berwujud.
5	Financial Reporting for Cryptocurrency	Mei Luo, Shuangchen Yu	2022	Tesla dan MicroStrategy mencatat <i>cryptocurrency</i> sebagai aset digital
6	Accounting Analysis for Crypto-Assets Based on IFRS	Pramana, dkk	2023	<i>Cryptocurrency</i> memenuhi empat unsur yang menjadi karakteristik dari aset tak berwujud

**Tabel 4.3 Studi Literatur pada Penelitian Terdahulu mengenai
Cryptocurrency sebagai Persediaan**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	The Challenges facing IFRS for Accounting of Cryptocurrencies	Shehada & Shehada	2020	Alternatif yang memungkinkan untuk memasukkan mata uang kripto ke dalam model akuntansi berkisar dari memperlakukannya sebagai komoditas, inventaris, atau aset tak berwujud.
2	Cryptocurrency Transaction: Is It Relevant to Indonesian Accounting Standards	Nadiar	2022	<i>Cryptocurrencies</i> hanya bisa diklasifikasikan sebagai persediaan jika mereka dimiliki untuk dijual dalam aktivitas bisnis.
3	Akuntansi untuk Cryptocurrency	Nuraliati	2018	Bila perusahaan yang memiliki bitcoin bertindak sebagai <i>trader</i> atau <i>broker</i> dimana <i>bitcoin</i> dibeli dan dijual dalam waktu dekat dan memperoleh laba atau <i>margin</i> , maka bitcoin diperlakukan sebagai persediaan
4	Accounting Analysis for Crypto-Assets Based on IFRS	Pramana, dkk	2023	Entitas yang secara aktif memperdagangkan aset kripto, membelinya dengan tujuan untuk menjualnya kembali dalam waktu dekat dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga atau margin pedagang, dapat mempertimbangkan apakah panduan dalam IAS 2 untuk pedagang pialang komoditas harus diterapkan.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
5	An Introduction to Accounting for Cryptocurrency	Rosemary McGuire, Michael Massoud	2018	IAS 38.3 mencatat bahwa hal ini tidak berlaku untuk aset tidak berwujud yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dan aset tidak berwujud tersebut harus dicatat sesuai dengan IAS 2.
6	Financial Reporting of Cryptocurrency	Andrew Hartley	2019	Perusahaan yang menambang <i>cryptocurrency</i> harus mengklasifikasikannya serupa dengan persediaan



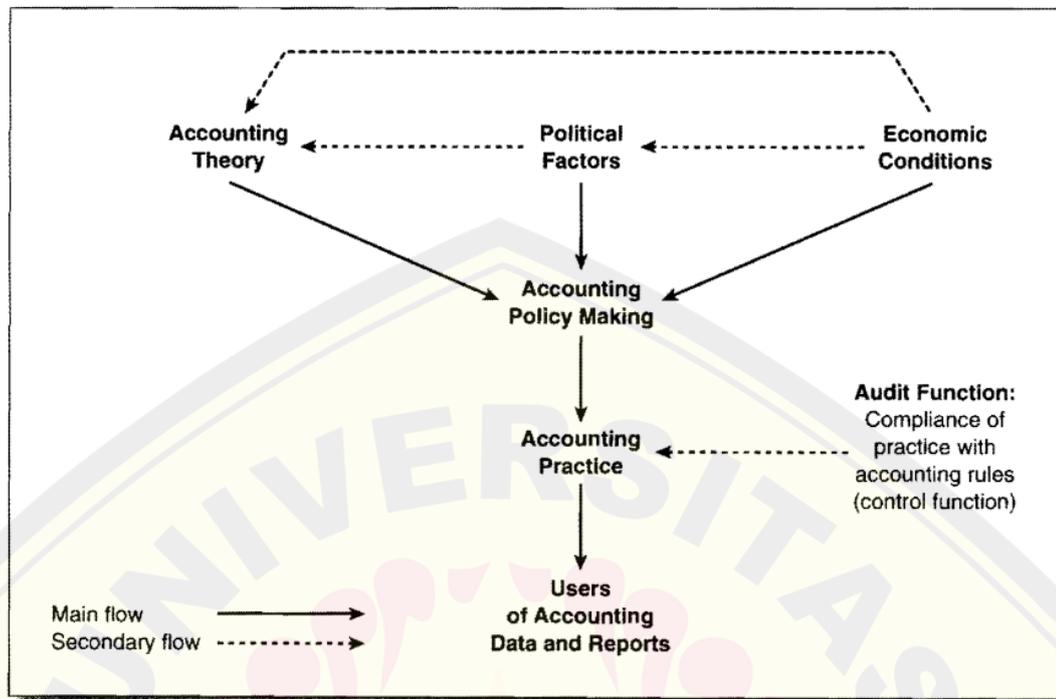
**Tabel 4.4 Studi Literatur pada Penelitian Terdahulu mengenai
Cryptocurrency sebagai Kas/Setara Kas atau Unit Moneter**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Analisis Terhadap <i>Cryptocurrency</i> (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)	Afrizal & Marliyah	2021	Cryptocurrency memenuhi kriteria secara perspektif uang, namun tidak disahkan secara hukum
2	Kajian atas <i>cryptocurrency</i> sebagai alat pembayaran di Indonesia	Nurifa Oktaviani Syamsiah	2017	<i>Cryptocurrency</i> masih banyak dilarang negara-negara sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk Indonesia. Meski begitu, masih ada transaksi-transaksi menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia meskipun dalam jumlah yang masih kecil
3	Crypto Asset Assessment Models in Financial Reporting Content Typologies	Morozova, dkk.	2020	Cryptocurrency tidak dapat dijadikan kas atau setaranya sesuai IFRIC
4	Akuntansi untuk <i>Cryptocurrency</i>	Nuraliati & Azwari	2018	Cryptocurrency memenuhi kriteria PSAK dalam kualifikasinya menjadi kas atau setara kas karena konvertibel dalam jangka pendek menjadi kas
5	The Challenges Facing IFRS for Accounting of Cryptocurrencies	Shehada & Shehada	2020	Cryptocurrency tidak dapat diakui sebagai kas maupun uang
6	Accounting Analysis for Crypto-Assets Based on IFRS	Pramana	2023	Cryptocurrency memang dibuat untuk menggantikan mata uang yang berlaku, tetapi masih kekurangan beberapa properti untuk sebuah kas atau setara kas, salah satunya ketidakmampuan untuk memastikan harga sebuah barang atau jasa



LAMPIRAN 2
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Proses Pembuatan Kebijakan Akuntansi



Gambar 4.2. Nilai tukar Bitcoin terhadap Rupiah (IDR)



Gambar 4.3. Nilai tukar Ethereum terhadap Rupiah





LAMPIRAN 3
WAWANCARA 1

Keterangan :

M : Michael Chandra Gunawan

W : Dr. Wahyu Agus Winarno, M. Si, Ak. CPA.

Baris	M/W	Hasil Wawancara
1 2 3 4 5 6	M	Jadi, sebelumnya saya mau <i>review</i> terkait dengan topiknya dulu, kalau dari hasil sejauh saya meneliti, berangkat dari apa yang disampaikan pembimbing dan penguji sebenarnya saya diminta untuk mencari esensi dari pengakuannya mata uang kripto di mata akuntansi gitu Pak. Cuman sampai saat ini memang, jangankan di Indonesia, tapi di luar saja pun yang lebih maju peradaban akuntansinya, itu juga ribet Pak.
7 8	W	Yang saya tau cuman Tesla, yang saya tahu dia pengungkapan ya
9	M	Yang lainnya belum? Ada pak satu lagi <i>Micro Strategy</i>
10 11	W	Iya, tapi kan yang muncul dan <i>booming</i> memang kan ya Tesla ini, tidak diragukan
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	M	Betul, yang lain pun, di perusahaan-perusahaan lain pun juga masih ribet bahkan sekelas negara pun ada yang menggunakan <i>El Salvador</i> dan <i>Venezuela</i> itu juga pengakuannya juga masih ada enggak tahu bagaimana jelasnya gitu. Akhirnya, saya di tulisan saya itu juga banyak mengutip dari artikel luar jadi tidak terbatas di indonesia bagaimana PSAK mengakui, tapi juga dari IAS maupun IFRS gitu Pak. Meskipun ya pada dasarnya PSAK kan adopsi dari IFRS. Kemarin saya menemukan bahwasanya kripto itu sudah dipandang sebagai aset, jadi juga dari beberapa orang yang saya temui, saya wawancara termasuk pengguna pun juga menyatakan bahwa kripto itu sebagai aset gitu, tetapi gambaran asetnya kan suatu hal yang tidak tampak, artinya dikatakanlah mereka mengatakan aset digital gitu. Baik dari tulisan-tulisan, maupun pengguna-pengguna mengatakan bahwa itu aset, aset digital. Nah kemudian kalau aset digital yang kemarin ada sama pembimbing bincang-bincang, bilanganya gini. Aset digital itu, pasti di akuntansikan nanti sebagai <i>intangibile asset</i> , itu pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya, karena berangkat dari apa yang saya temui bahwasanya sekarang kas, meskipun kas itu ada <i>underlying</i> asetnya, baik itu fiat, uang kertas, maupun uang logam yang nilainya dicadangkan pada emas, itu kan sekarang didigitalkan juga. kemudian, kalau misalkan kita ngomong perusahaan-perusahaan yang jual barang-barang kayak voucher, jual-jual barang kayak tiket, kupon, apa segala macam, atau bahkan sekelas broker saham. Sekarang saham atau voucher-voucher tadi kan dalam bentuk digital Pak, orang sekarang enggak perlu gesek kartu lagi, kalau dulu beli pulsa telkomsel gesek kartu. Sekarang kan langsung pencet Shopee atau media apapun lah ya,

40		jadi ini yang fenomena ini menjadi persediaan tidak sekadar,
41		persediaan tidak lagi sekadar apa yang nampak. Kayak yang kita
42		pelajari di buku gitu tapi persediaan sudah bergerak ke digital,
43		bahkan yang lebih lanjut lagi sebagai instrumen keuangan
44		misalkan, perdagangan-perdagangan di pasar berjangka yang
45		derivatif kemudian <i>future</i> dan sebagainya. itu juga bentuknya
46		kebanyakan digital sekarang. jadi kemarin saya meneliti ke kripto
47		itu padanannya sama empat hal tersebut kas, persediaan,
48		instrumen keuangan, dan juga yang terakhir <i>intangible asset</i> . Dari
49		artikel-artikel ini saya temukan bahwasannya masuknya ke <i>intangible asset</i> secara definisi, tapi tidak secara perlakuan, maksudnya kalau di akuntansi itu kan sebenarnya ada tiga, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Nah, pengakuannya ok secara definisi sudah masuk tapi secara pengukuran enggak masuk pak. Jadi ini yang mau saya gali lagi makanya, bagaimana daripada sudut pandang jenengan sebagai dosen yang seharusnya normatif kemudian sebagai pihak IAI juga.
50	W	jadi gini preambulmu itu dari perspektif kognitif saya sepakat. ini
51		saya berangkat dari yang saya ketahui dari konsepnya, bahwa
52		perkembangan akuntansi itu ditentukan dari tiga sudut pandang,
53		sehingga nanti ini ada praktek standar. yang pertama itu memang
54		yang berhubungan dengan ekonomi. Ekonomi ini kan seperti yang
55		sekarang berjalan, yang kamu tulis itu kan dia sudah lari jauh. di
56		sini ada regulator pemerintah, terus yang satunya lagi ini kalau
57		enggak salah dari perspektif <i>economic standard sector</i> , dari seksi profesi itu, nanti dicek lagi, aku lupa di, kalau yang dua ini pasti
58	M	Ini ada di bukunya pak Suwarjono ya
59	W	Oh iya, kalau pak Suwardjono ngadopsi mungkin ada, tapi ini di
60		buku wolk, dodd, sehingga akhirnya muncul standarnya seperti,
61		tapi pertimbangannya harus dikasih. Contoh, batu akik enggak
62		usah jauh-jauh yang <i>tangible</i> aja, itu kan batu, ketika batu itu
63		menilai atau orang mempunyai nilai atau dia itu menganggap dia
64		itu mempunyai nilai, maka nilai itu akan diekualisasikan dengan
65		transaksi-transaksi, oh ini jadi persediaan, ada yang jadi aset
66		karena nanti dijadikan pajangan, dan lain sebagainya. Nah ini yang namanya <i>intangible</i> .
67	M	itu alasan ekonomi ya pak
68	W	Iya dari perspektif ekonomi, ya enggak usah jauh jauh kan siapa
69		yang lihat dulu itu orang beli batu dari pinggir sungai akhirnya
70		dicari, kan munculnya karena ini, cuma dari perspektif teknologi
71		dia mesti lebih bernilai dibandingkan yang batu yang pokok
72		muncul, aslinya kan cuman itu. nah terus yang kedua ini dari
73		perspektif regulasi pemerintah, tadi kamu nyebutkan bahwa
74		meskipun wujudnya itu <i>e-money</i> atau apa pun dalam konteks
75		rupiah yang beredar ini kan ada regulasi yang mengatur ya beda
76		dengan ini. Ada underlying tadi yang kamu sebutkan emas dan

77		<p>sebagainya, cuma wujudnya saja bentuknya yang dulu ada uang kartal uang giral dan seterusnya itu, sekarang bahkan beredarnya ini bisa jadi ini tuh di <i>keep</i> gapernah dipakai, kemungkinan akan <i>settle</i> di bank kemudian akan jadi <i>e-money</i> semuanya bisa jadi, tapi yang jumlahnya beredar ini didasarkan oleh peredaran uang yang di situ diregulasi oleh bank indonesia dapat diinflasi juga, kalau ini naik turunnya kan tidak ada yang mengontrol. perspektifnya orang kan tidak ada regulasinya, nah dampak kenapa akhirnya pemerintah itu melarang ini yang saya tangkap ya, karena apa, pemerintah itu kan ada hubungan dengan luar negeri yang di situ nanti ada PDB, produk domestik bruto dan lain sebagainya sehingga nanti akan membuat naik turunnya nilai tukar, kemampuan ketika dia investasi, terus dia perusahaannya itu bagus, terus kuat maka dia akan naik kan produk domestik brutonya</p>
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88	M	Iya
89	W	<p>Sehingga dan nilai tukarnya kan menjadi tinggi nah itulah yang menjadikan uang itu bermakna dari satuan yang sudah beredar ini, kenaikan nilainya. nah kalau ini kenaikan nilai ini kan murni sebenarnya ini karena hubungannya dengan <i>supply demand</i> dari para pemegang aset. Sedangkan aset kripto harapannya dia bisa dikonversi menjadi uang yang dihitung munculnya karena regulasi-regulasi ini. Sehingga pemerintah kan akan susah bagaimana mengontrol ini, sedangkan kenaikan produk domestik bruto ini enggak dilihat dan engga bisa dimonitor, dalam konsep kripto kan sudah <i>blockchain</i> enggak mungkin pemerintah akan memonitor naik turunnya di situ.</p>
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98	M	Tidak bisa juga
99	W	<p>Makanya, itu yang repot adalah apakah sebenarnya ini adalah memang dari transaksi riil yang akhirnya PDB nya naik sehingga nanti nilai tukar kita akan semakin kuat atau kan keputusan untuk membuat uang beredar nambah atau tidak, dulu ya tahun 60 70-an itu kan ada yang namanya gunting sukarno itu ya, uangnya misalnya lima ribu jadi dua ribu lima ratusan, itu kan keputusan karena hubungannya dengan inflasi, ini kan yang tidak bisa dikontrol nanti kalau misalnya ini <i>tradable</i> terus akhirnya dikonversi, oh saya berani ketika ditukar menjadi rupiah diubah menjadi sekian. kalau misalnya 1 <i>bitcoin</i> empat ratus juta missal, oh jadi enam ratus endak apa, ini kan dampaknya di sistem perekonomian pemerintah.</p>
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109	M	Iya
110	W	<p>Inflasi yang akan berdampak sedangkan inflasi ini kan kita sudah menjamin misalnya ini kaitannya dengan PDB nya gabisa naik ini underlyingnya sudah cukup ga bisa dinaikkan, jatuhlah, nah ini yang tidak di mau dari sisi pemerintah jadi ketika</p>
111		
112		
113		
114	M	Masuk sebagai alat bayar

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129	W	Iya, meskipun kan memang ada yang mempunyai bitcoin kalau mau dijadikan rupiah kan bisa saja, gaada masalah. memang bisa ditukarkan, ada entitasnya yang dia melayani itu, cuma masalahnya ini nanti mau jadi aset, mau jadi wujud kas aset, persediaan, derivative, tetapi ini berbeda dengan derivative lainnya yang diatur di regulasi. Sehingga untuk memenuhi supaya nanti menjadi standar, komponen ini akan berat, tapi perspektif ekonomi ini saya juga sepakatnya dengan ini, ternyata ketika dia digunakan untuk melakukan pembayaran, CSR pun mengakui, sebagai pembayaran digandeng membayar untuk kendaraan dan sebagainya kan mengakui. bahwa dia itu mengaku nilainya setara dengan nilai kendaran itu, satu atau dua koin, misalnya seperti itu. Ini yang sebenarnya justru malah menjadi pr bagaimana untuk meregulasi ini. bukan regulasi ini nanti menjadi hambatan perkembangan dari proses bisnis dan ekonomi yang sudah berjalan itu, sebelum jauh ke akuntansi makanya ini harus diselesaikan dulu kalau menurut saya. ada suatu buku tapi saya lupa namanya
130 131	M	Saya pakenya buku Deegan, kalau Deegan sangat mudah dipahami, ibarat <i>user interface</i> nya untuk anak S1. Saya adanya buku Scott.
132 133 134	W	jadi sebenarnya dari dulu saya sudah paham perekonomian kita gaakan bisa ngontrol, karena yasudah basisnya <i>block</i> , soalnya kalau pemerintahan kita gamasuk disini ya gak akan bisa, karena urusannya dengan regulator.
135 136 137	M	artinya berarti kan kalau sebagai alat bayar tidak akan bisa tapi kalau sebagai tadi diakui sebagai aset, kan makanya menimbulkan pertanyaan lanjutan itu tadi pak, dijadikan apa gitu?
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153	W	sedangkan ketika berhubungan dengan dia mau menjadikan barang yang nanti akan diperdagangkan, ternyata dia juga mengeluarkan sumber daya yang harapannya di masa yang akan datang dia akan memperoleh <i>benefit</i> -nya jadi yang sama seperti aset. Aset kan sebenarnya pengorbanan sumber daya sesuatu. Dia untuk memperoleh bitcoin itu satu koin dua koin tiga dan seterusnya itu, dia juga mau menggunakan pengprbanan apakah nanti konversi dari pengorbanan itu menjadi wujud yang namanya koin atau aset kripto itu, pengakuannya jadi seperti apa ada hubungannya dengan pengukuran tadi, missal pengakuannya ok tapi pengukurannya? kan kita enggak bisa monitoring naik turunnya gabisa, nilai wajar adalah cara yang paling gampang tapi tidak bisa saat tanggal pelaporan dan sebagainya itu. jadi kamu nanti bisa berangkatnya disitu, dan sebenarnya meluasnya nanti bisa juga dibahas, akhirnya nanti kamu menemukan jawaban kenapa kok akhirnya tidak akan segera muncul standar itu, ada perspektif yang harus dipertimbangkan juga, kalau ini sudah jelas,

		ekonominya sudah diperoleh, orang sudah tau tentang itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali pakai buku itu.
154 155	M	Tulisannya tearney ini, <i>accounting theory : a conceptual and institutional approach</i> ?
156 157 158 159 160 161 162 163	W	Jadi, ini kan dalam rangka untuk masuk di sini <i>accounting policy making</i> ya yang akhirnya nanti menjadi <i>accounting practice</i> dan praktiknya ini harus diatur oleh standar, ada tiga komponen ini <i>economic conditioning</i> ini sudah lari jauh ekonomi kondisinya udah jalan jauh. Nah ini yang tengah tadi, <i>political factor</i> , regulasi <i>government</i> itu dan dan teori akuntansi nah ini yang selama ini dibahas dari fenomena-fenomena yang ada . oh ini jadi aset, oh ini jadi nilai wajar. Ya ini karena yang memwadahi itu entah nanti menggunakan nilai wajar, atau menggunakan apa, dan teori akuntansi apa yang dipakai.
164 165 166	W	Sebentar pak, sebelum kita kebawah, di tiga ini pak, saya ingin tanya kalau ekonomi jalan, regulasi enggak jalan, <i>accounting</i> ininya <i>debatable</i> , apakah bisa berlanjut kesini pak? Ke <i>policy making</i> ?
167	M	Gabisa, <i>standart setter</i> itu masuknya di sini
168	M	jadi tiga ini harus selesai dulu baru bisa ke <i>policy making</i>
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184	W	Betul, makanya itu baca lagi, ini jelas disini diceritakan bagaimana mekanismenya. ini kuncinya di sini, <i>accounting policy maker</i> ini kan gak bakalan, teman saya itu ada kerja di Bea cukai mau diskusi kaya gini nih, dia ditugasi tapi enggak selesai selesai, karena ketika dia nanti mungkin secara regulasi sudah mempunyai konsep dan lain sebagainya tapi dari segi kemenkeu kaitannya dengan perbankan BI, kaitannya dengan inflasi, ga cocok, karena konsepnya adalah uang beredar tuh gini ada underlying itu tadi termasuk emas, dan nanti kalau misalnya munculnya ini akhirnya berdampak pada underlying, ternyata oh iya di akun diakui, ini hancur underlyingnya. Ya gitu, inflasinya tinggi pasti, sehingga gabisa di kontrol. Ini yang menyebabkan kenapa kok gak berani mengadopsi ini karena inflasi yang tidak bisa dikontrol, sedangkan inflasi yang ngatur kan pemerintah. Seperti gunting Soekarno, itu karena untuk mengatasi inflasi yang tinggi. 5000 dulu dapat kerupuk 5, sekarang cuman dapat 1, inflasinya tinggi makanya digunting untuk menyetarakan. Nah kalo ini mau digunting bolak-balik? Ini nanti ketika dari koin banyak terjadi, maka akan menambah uang beredar.
185 186 187 188	M	Eh tapi gini pak, konsepnya di kripto itu, setiap berapa tahun sekali harus dibakar, ibaratnya kaya uang itu digunting. sampai dibatas waktu tertentu, sampai dia dalam jumlah tertentu tidak bisa dibakar lagi. nah, kalo melihat konsep tersebut, artinya gamungkin ada inflasi kan pak?
189 190	W	Tapi periode waktu ini kan setiap tahun ada inflasi. Ini masalahnya adalah <i>short term and long term effect</i> . Sama kaya, kamu

191 192 193 194 195		melakukan proses earning manajemen dengan akrual, akrual itu dengan tataran tertentu di situ sebenarnya periode jangka pendek saja yang benefit, dalam jangka panjang akan sama, cuman inflasinya yang tidak bisa kita kendalikan dampaknya. Contoh misal saya menggunakan metode penyusutan antara garis lurus sama <i>double declining</i> kan sudah pasti ketemu.
196	M	Iya, lebih besar <i>double declining</i> kan.
197 198 199 200 201 202 203 204	W	Yatoh, <i>double declining</i> lebih tinggi maka beban pajaknya lebih rendah, meskipun dalam periode tertentu dia akan ketemu, itu yang namanya beda sementara toh. Beda sementara pasti akan ketemu, makanya ada yang Namanya pajak tanggungan itu. Cuma, tahun ini yang tidak bisa dihindari. Inflasi di tahun, sehingga sampai ketemu tadi katakanlah sampai harus dibakar di tahun 2030 atau 2050 lah, nah 5 tahun kedepan, inikan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Yang berdampak pada ekonomi makro secara keseluruhan.
205	M	Artinya ada kemungkinan 5 tahun negara bangkrut
206 207 208 209 210 211 212 213	W	Ya, ya ini karena ini, yang akhirnya akan menjadi masalah untuk menilai 1 koin, dan fluktuasinya gak main-main. Beda dengan uang 100 ribu mau diwujudkan dengan <i>e-wallet</i> , uang koin logam, atau apapun, selama itu bisa dikendalikan peredarannya untuk menilai itu, maka produk yang ada di lapangan bisa dikendalikan. Yang dinilai, seperti jagung dari 2000 jadi 3000, selesai, dampaknya yang di ekonomi makro apalagi yang di sektor riil. Sedangkan disini secara teknologi, yang dijual bukan teknologinya lagi sekarang, yang dijual adalah produknya, koinnya, kriptonya.
214	M	Iya karena teknologinya sudah <i>settled</i> , orang sudah tau, orang gamau ribet
215 216 217 218 219 220	W	Nahh iya. Makanya misalnya yang disebut <i>intangibile asset</i> ketika nanti dijadikan <i>intangibile</i> , kalau kita kan perspektif teknologinya dia menilai seperti apa sehingga nanti ada goodwill karena dia investasi untuk mengembangkan blockchain, itu ada nilainya, terus diungkapkan, nanti sama investor diminati, terus nanti dikasih goodwill, nah gitu toh. Kalau misalnya ada selisih nanti dia larinya di OCI.
221 222 223 224 225	M	Nahh jadi gini pak, sebelum kesana pak, saya mau ulik dulu di masalah uang. Kalau memang ada ketakutan seperti itu ya pak, tapi kenapa kok bisa selama ini kita percaya sama valas, mata uang asing, artinya kita berani apa ya, kan ada exchanger uang asing, kita berani bertarung sama uang asing itu kenapa pak, kalau crypto kenapa enggak boleh/berani.?
226 227 228 229	W	karena kan di sini kan sudah ada yang, valas itu kan ada underlying, masing masing negara kan ada underlyingnya, yang dipertarungkan itu kan produk riil, kita nanti surplus atau defisit dengan perdagangan ini, lah kalo ini kan ngga ada

230 231 232	M	Jadi pure karena gaada underlyingnya? Nah meskipun kalau dilihat dari beberapa negara misalnya, contoh Zimbabwe, negara juga mata uang anjlok juga.
233 234 235 236 237 238	W	Iyaa, underlyingnya yang jadi masalah sebenarnya. Oke, jadi misal saya dari riil dari rupiah, saya belikan koin, nah koin akan naik turunnya itu tidak bisa dikontrol, kalo masih wujudnya masih rupiah meskipun dia beredar dimana-mana kan masih bisa dikontrol, keluar jadi pembayaran. Uang rupiah ditransfer ke US kan dicatat juga, sedangkan koin tidak dicatat. Nah ini yang Namanya surplus perdagangan, defisit atau surplus itu, ini yang gabisa.
239	M	itu di akuntansi negara dia termasuk dilaporkan ya?
240 241 242 243 244 245 246 247	W	Iya betul, jelas dilaporkan sehingga berapa barang kita itu menyumbang devisa atau enggak, itulah yang akhirnya menurunkan nilai tukar mata uang. Jadi penyebabnya itu, nah ini gabisa, tiba-tiba seperti sulap, gapapa hilang rupiah terus jadi koin, terus nanti tiba-tiba dirupiahkan. Itu di luar devisa, gabisa jadi itu <i>apple to apple</i> dengan pemerintah. Aku juga sebenarnya senang dengan konsepnya, <i>developnya</i> oke, nanti kalau misal perusahaan ya proses <i>blockchain</i> yang dinilai sebagai <i>intangible</i> , bukan produk dari <i>intangible</i> teknologi yang sudah nempel.
248 249 250 251 252 253 254 255 256	M	Jadi yang jadi masalah sebenarnya kan karena otoritas dari BI untuk mengontrol itu ya pak. Akhirnya kan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat itu kan ada permainan <i>printing money</i> dan sebagainya yang mengontrol naik turunnya nilai suatu barang, atau inflasi dan deflasinya. Jadi kecurigaan masyarakat itu kan, loh ini kok tiap tahun harga kok naik trus ya (inflasi) berarti kan ada kecenderungan BI sewaktu-waktu mencetak uang, sedangkan kalau kripto yang <i>market cap</i> lebih besar itu kan, orang lebih percaya karena, teknologi udah canggih, enkripsi aman, dan sebagainya, tidak mungkin ada salah
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271	W	Yang disebut bitcoin itu dengan <i>market cap</i> tinggi dan enkripsi aman, itu bukan berhubungan dengan kemampuan nilai tukar yang dijamin dengan nilai underlyingnya. Tapi disitu adalah keyakinan dia untuk menyimpan, keyakinan personal. Bukan keyakinan bahwa itu akan terjamin oleh underlyingnya itu tadi. Itu kalau misal teknologinya oke dan konsep blokchain siapa yang meragukan juga tidak ada, cuman perubahan kaitannya dengan <i>supply demand</i> itu yang gabisa dikontrol dan itu akan berdampak pada perdagangan internasional yang berhubungan dengan devisa negara, nah ini yang berhubungan dengan pertukaran, terus nyambung dengan dugaan dan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memproduksi uang sendiri, disini letak pemerintah, kenapa dia melakukan keputusan akan mencetak uang atau menggantung uang, ini kan keputusan regulator dalam rangka konteks <i>political factor</i> , atau <i>government</i> kan dia

		melindungi warga negaranya. Nah ini kan tidak bisa dikontrol, makanya kebijakan ini kan <i>government and political factor</i> , yang berat itu memang.
272 273	M	Artinya, secara normatif asumsi masyarakat harusnya pemerintah itu melindungi warga
274	W	Iyaa, <i>trust</i> dengan untuk jaminan nilai saya itu jangan sampai hilang.
275 276	M	Karena kan yang jadi idealisnya para pencipta kripto itu mereka tidak trust kepada <i>goverment</i> , kalau secara normatif itu harusnya <i>trust ke goverment</i>
277 278 279 280 281 282 283	W	Secara konsep, teknologi ini harus lebih <i>trust</i> ini, karena dia kan murni naik turunnya dari kriptonya, jadi kalau 3 faktor tadi tidak selesai gaakan muncul itu. Makanya nanti gatau regulasi mau lewat IFRS ata apapun yang mungkin dia kan menjadi tunggakan dari orang orang disini. Makanya mungkin ada konsep ide bagaimana memunculkan trust pada proses tersebut. Semua yang ada di dunia punya akses disini kan mungkin, tapi kan keluar dari proses <i>blockchain-nya</i> .
284	M	Apa pak kira-kira yang bisa memunculkan trustnya?
285 286 287	W	Ya di sini, sedangkan yang disini kan tidak boleh, kecuali dia itu member of, kan pemerintah gabisa. Berarti kalo pemerintah, masuk disini konsep block nya hilang.
288	M	Ya betul, karena dua hal ini kan bertentangan
289	W	Iya benar
290 291 292 293 294	M	Karena teknloginya hadir untuk melawan political factor tadi. Karena selama ini kalau kita bicara akuntansi juga sama-sama diterima pemerintah oke , ekonomi juga jalan jadi policy makingnya juga gampang dan tinggal menyesuaikan saja, tetapi kalo ini kan berlawanan. Point of view ini yang saya gak dapat.
295 296 297 298 299	W	Sealam ini orang kan melihat gradable atau engga. Tetapi mau dihadap menjadi standart setter, policy making standart setter 3 komponen, makanya berangkat dari itu tadi, saya ngomong kayak gini menggunakan perspektif dari buku tadi. Bahwa selama proses policy making dia menulis didalamnya harus ada 3 kompenen tersebut
300 301 302 303 304	M	Soalnya dari perspektif yang saya pegang bahkan termasuk saya sebagai penulis, kemarin pikirannya adalah yang ini harus ikut ini pak. Gimana caranya goverment ini ngikut keadaan ekonomi yang ada. Kaya kemari nada masalah di PSAK yang baru tentang kontrak kerja kalo ga salah, kayak PSAK 73
305 306	W	Oh iya, ini harusnya masuk ke PSAK 71 nya, tapi tidak bisa dipaksa emang masuk kesitu, ini yang gabisa
307 308 309 310	M	Nah kemarin karena ada kontrak, ada masalah-masalah di kontrak akhirnya munculah PSAK nah maksud saya ini ada masalah teknologi ini, pemerintah sekelas standart setter akuntansi juga ngikut karena ekonomi tidak bisa diberhentikan. Ternyata ada

311		salah satu faktor ya pak, kalo misal ini ngikut ini maka yang satunya meniadakan perannya.
312 313 314 315 316	W	Saya juga mikir pandangan tentang bahasamu tentang meniadakan perannya, nah atau saya berfikir tebalik, mungkin triggernya dari teknologi dan sebagainya, ada satu sisi yang disini juga ada political nya juga, “aku kok di atur atur”. dia kuat saat ini karena warga negaranya percaya dengan pemerintahnya gitu.sekarang sampai sejauh mana regulasi tersebut
317	M	Maksudnya merasa aku kok di atur-atur, governmentnya merasa seperti itu?
318 319 320 321 322 323 324 325	W	Iya nanti dengan ini dia akan mengatur. Saya itu kadang mikir sampai jangka panjang gitu ya. Ketika nanti kelemahan pemerintah, regulator, dan lain sebagainya itu, terus nantinya dia malah akan mendominasi secara global yang berhubungan dengan perekonomian. Ini kan kuatnya karena dia masih memegang regulasi yang sampai sekarang warga negara masih percaya dengan pemerintahnya. Nah sekarang sampai sejauh mana pemerintah itu sampai sekarang masih mempunyai trust bahwa dia membuat regulasi itu untuk melindungi warga negaranya.
326 327	M	Berarti ada pemikiran liar kalau warga tidak percaya lagi sama pemerintah gitu, karena ini juga tidak bisa diberhentikan.
328 329 330	W	Iyaa, soalnya begitu booming <i>crypto</i> langsung ingat, misalnya bahkan misalnya seperti tesla dia menginisiasi terus nanti dia nyambung dengan yang lain itu juga bagian dari pioner atau mengawali
331	M	McD pun juga sempat, McD yang kita makan sehari hari itu
332 333	W	Nahh iya, kalo semisalnya dia akhirnya semua entitas itu nantinya mendorong itu nantinya juga hilang
334 335	M	Karena ini menyesuaikan dengan ini. Ya bukan meniadakan dalam arti badannya ditidakan, tapi kewenangannya gak sekuat itu.
336 337 338 339 340	W	Kan itu tidak massive dalam konteks sebagai alat tukar karena masih ada pegangan kalua kita beli-beli masih harus menggunakan rupiah, malaysia ringgit, tetapi kalau misalnya, “yasudah gapapa 1 koin” dan terus semuanya sampai tataran dengan level masyarakat yang paling bawah pakai seperti itu, apa boleh buat pemerintah, yang dipegang kan adalah itu.
341 342 343 344 345 346 347	M	Nah saya mau bawa agak sedikit melenceng ya pak. Pertukaran tadi kan mirip dengan bertukar aset. Seperti kita jual rugi atau jual untung yang sama dengan bertukar aset, ditukarkan sama kas. Atau memang yang pure pertukaran aset seperti bangunan ditukar dengan mesin, atau kendaraan ditukar sama peralatan. Nah itu bagaimana, saya belum bisa menggambarannya pengukurannya itu gimana, cuman untuk secara konsep kan seperti itu ya pak penukarannya

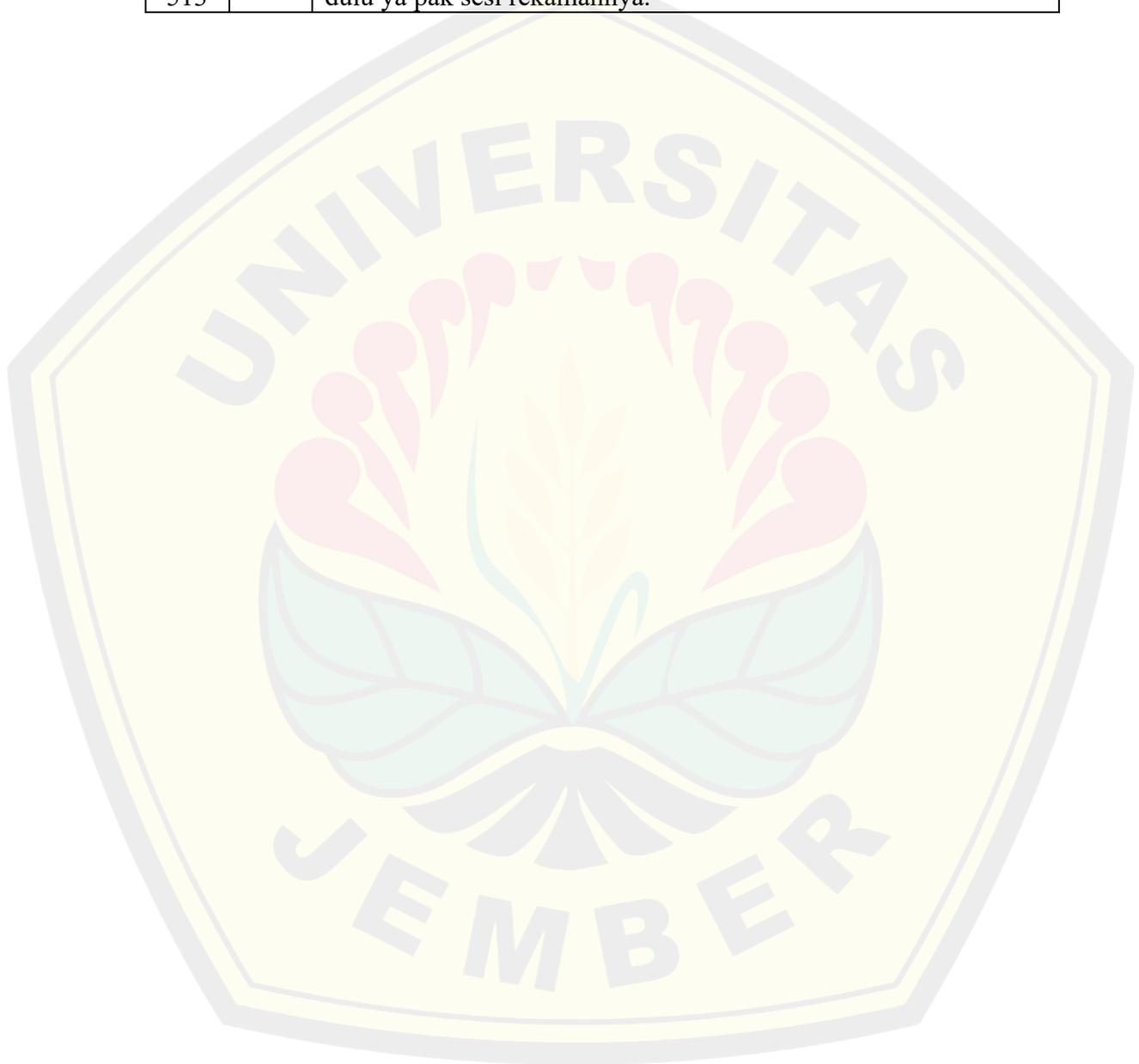
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357	W	Iya sama kayak dia dilarikan di sektor riil sama kaya, gausah jauh jauh menggunakan <i>crypto</i> , kamu punya hp saya ada pipa dari gading, ketika kamu cocok, semacam barter, ini akan berlaku umum ketika handphone itu bernilai 1 pipa ini atau misal 1 coin, nah itu akhirnya makanya saya bilang ketika ini menjadi <i>massive</i> dan akhirnya masyarakat trust dengan ini artinya mengabaikan rupiah, makanya itu yang dijaga pemerintah jangan sampai uang alat tukar yang ada di berbagai negara itu sebagai jaminan itu, kan itu orientasinya <i>single currency</i> kan aslinya dia mengarahnya, nah ketika semua bisa dibarter, ini yang tidak diinginkan pemerintah untuk mengontrol neraca perdagangan antar negara, ini hilang kan sudah lintas ini.
358 359	M	Karena orang langsung ya, mau ngambil HP langsung tukar itu aja kan, tergantung saya punya gading berapa gitu kan
360	W	Iya betul, ini yang pemerintah gabisa lepas
361 362 363 364 365 366 367 368	M	Nah sekarang enak kan berarti pak, kalau kita ngomongin aset, oke gampang saya punya mesin tik itu mau saya tuker dengan 2 gading pipa, nah mesin tadi mau dituker sama 2 gading tapi kan diukur ke rupiah kalau kita di akuntansi Indonesia, ekualisasi nilai misal mesin TKD nilainya 1,5 jt dan ternyata 2 pipa harganya juga 1,5 juta berarti kan ada dua langkah, jadi ini asetnya apa di rupiahkan dulu dan satunya juga dirupiahkan dulu, ketemu harganya bisa ditukarkan, nah sekarang kalau misalkan <i>crypto</i> diberlakukan seperti itu nilainya gimana ?
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383	W	Makanya gini, ekualisasi rupiah, makanya rupiah itu masih dipakai kan memandang 1 koin 2 koin, 1 gading 2 gading, ini yang melakukan transaksi masih melihat dan memegang rupiah dalam ekualisasi perhitungannya, nah makanya ini nanti mungkin juga, ini pemikiran jangka panjang saya, ketika orang sudah tidak mengekualisasi dan menganggap uang ini sudah tidak berlaku di suatu negara, tapi ini susah ya karena ada regulator itu. Nanti ini akan menjadi <i>single currency</i> , dugaanku seperti itu. Makanya pemerintah ketika tetap bertahan menggunakan ini sebagai alat tukar dan nanti dia ada neraca perdagangan dengan yang lain ini, dan akan ada naik turun kurs, nah ini masih membutuhkan yang dijamin oleh negara, ini kalau diteruskan, kemungkinannya akan merusak nilai yang dijamin <i>underlying</i> ini, trus muncul inflasi, atau sebaliknya ini justru akan semakin melemahkan <i>trust</i> -nya dan kemudian tidak menghasilkan devisa, tidak ada keluar masuk, dan sekarang yang terjadi juga sebenarnya sudah seperti ini, cuman tidak <i>massive</i> masalahnya kan
384	M	Iya sekitar 0,1% dari seluruh transaksi di dunia
385 386 387	W	Makanya kan saya bilang dalam jangka panjang ya pemerintah ini yang meregulasinya, kan selama ini kamu selalu berimajinasi ketika dengan barang dengan koin disini adalah nilai mata uang

388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400	M	Jadi misalkan mau beli satu ruangan 400 jt ya 1 bitcoin karena 1 bitcoin 400 jt nah yang jadi pertanyaan tadi kan agak sedikit berbeda, Pak Wahyu bilang, oh kalo bitcoin itu kita harus liat risetnya berapa, kemudian cost modelnya. Nah tapi kan ada yang menggantungkan sama <i>fair value</i> -nya ada juga yang menggantungkan sama nilai di marketnya, harga penutupan, <i>closing rate</i> , dan sebagainya. Kira-kira kita harus berangkat dan liat dari segi mana dulu pak? Karena banyak sekali metode, yang paling jelas aja kalau di artikel-artikel yang saya baca, sebagai aset tak berwujud sudah ada cost model dan revaluation model dan ini adalah dua hal yang bercabang sangat jauh, dan kemudian kalau kita lihat sebagai instrumen keuangan itu harus pake fair value atau profit or loss, kalau persediaan harus masuk OCI, nah itu kita harus berangkat dari mana dulu supaya kita tidak memandang ini suatu hal yang <i>overprice</i> dan <i>underprice</i>
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414	W	Kalau masalah over sama lower itu karena kriteria underlyingnya tidak terpenuhi kan juga gabisa aslinya, itu fungsinya aslinya, misalkan pas closing kita kira-kira itu kan akhinya ada trade off antara relevan dan reliable dalam struktur rangka konsep, kita kan akan memberikan informasi akuntansi jangan sampai disitu mengandalkan pengukuran tapi tidak relevansi dalam pengambilan keputusan. Ketika disitu ada revaluasi atau cost model itu kan relevan sesuai dengan timenya, tapi apakah andal karena tidak ada aturannya. Makanya di buku itu ada, tapi sepertinya di Scot juga ada nanti dibaca dulu ya, <i>trade off</i> , relevan dan <i>reliable</i> . Makanya kita mengejar reliabel, zaman dulu kita mengejar perolehan yang jelas bisa dibuktikan dan seterusnya tapi tidak relevan akhirnya mereka mengejar fair value, dari dua konsep ini akhirnya kita mengarah ke relevansi tetapi reliablenya jangan ditinggalkan. Nah realibilitas untuk mengukur itu kan yang kita tidak bisa peroleh untuk kasus ini kan.
415 416 417 418 419 420	M	Saya kerucutkan dulu ya pak, kita gak membahas yang beredar, karena kalau membahas yang beredar ya benar, tidak ada keandalan disana karena based on supply and demand. Jadi gimana kalo kita bahas yang ditambang, kan ditambang ada biaya untuk elektrik, kemudian hardware perangkat, dan pasti ada tenaga kerja meskipun disana sudah <i>by system</i> , kemudian juga biaya overhead lain, kita kerucutkan kesana dulu aja pak
421 422 423 424 425 426 427	W	Itu sebenarnya sama dengan, contoh ya, kamu punya aset biologis, dia itu kan by nature itu kan tidak bisa langsung kita ukur by processnya yang selama di kapitalisasi, ada elektrik dan lain- lain, itu kan yang akhirnya akan menentukan nilai, terus setelah itu geser ke gading misalnya, hanya sampai disitu saja kita bisa mengukur, tapi setelah itu apa yang diukur? Mungkin nanti itu larinya ke fair value, Ketika larinya disana ini yang tidak bisa di

		kontrol. Sedangkan ini nanti jadinya langsung di equal kan dengan mata uang.
428 429	M	Berarti ada bagian yang hilang di antara jeda sampai jadi. Misal jadinya 100 dipasar jadi 400 ada 300 yang hilang ya pak
430 431	W	Iya itu yang gabisa. Kalau ini kan sudah equal, angkanya ya jelas, diukur beres dan juga nilainya dari sektor riil, tapi setelah ini yang gabisa
432 433	M	Ini gaboleh diakui sebagai goodwill pak? Kan kayak perpindahan hak paten, sama kaya perpindahan aset apapun lah
434 435	W	Tapi kan goodwill, dia kan tidak bernilai rupiah, maksudnya kalo ini kan nilai riil misal dijual ada yang mau yaudah jadi nilai rupiah.
436	M	Kenapa goodwill gaboleh rupiah pak?
437 438	W	Dia kan amortisasi, dia kan menilai berdasarkan valuenya bukan rupiah meskipun satuannya mata uang. Nah kan kalo itu riil ini
439 440	M	Kalau goodwill kan di amortisasi sampai habis, kalo crypto gabisa di amortisasi sampai habis ya pak
441 442	W	Tidak usah di amortisasi, kamu naikan lalu jual, itu yang masalah. Nah kalo value itu kan riil, meskipun di awal tidak riil kalo tidak segera jadi mata uang
443	M	Iya kalo di masa depan masih ada kemungkinan riil
444 445 446	W	Lah ya iya, kalo goodwill itu hanya perlakuan saja untuk memberikan informasi ke pemegang saham bahwa ini loh ada nilai goodwill, tapi tetap bukan rupiah, dan tidak tradable.
447 448	M	Jadi intinya masuk fair value ya, tetapi masuk digital asset dan terima bayar pakai itu pak
449 450 451 452 453 454	W	Artinya itu kan dalam perpespektif <i>informativeness</i> nya masih belum tercapai. Padahal kan ini informasi untuk diberikan pengguna supaya dia sesuai dengan yang disampaikan. Meskipun dia mencatat di digital aset tapi ada lag dengan yang ditetapkan, kesulitannya disitu. Kan kita berharap bahwa memang benar-benar informatifness muncul, relevan, reliabel, terpenuhi, termasuk asimetri, tesla itu asimetri, terus mau gimana lagi kan akhirnya.
455 456	M	Asimetri dalam artian yang mengakui digital aset tapi dia memperoleh value yang lebih
457 458 459 460 461 462	W	Nah itu yang tidak dapat diliat sama calon investor dan pemegang saham juga pun tidak tau, kalo goodwill kan jelas tau di kan ada di amortisasi dampaknya dimana. Kalo ini kan gatau dampaknya dimana makanya jadi asimetri dan trade off. Ya asik sebenarnya, tapi aku sendiri belum kepikiran harus bagaimana, karena sudah ada judge diawal tadi, bagaimana kalau gini dan lain sebagainya
463 464	M	Jadinya secara pengakuan boleh-boleh aja diakui ya pak, tapi secara pengukuran yang akhirnya asimetri ya pak

465 466	W	Loh ya secara pengukuran akhirnya asimetri, padahal kan kita gak muncul asimetri.
467	M	Secara pelaporan asimetri, tapi secara pengukuran gak bisa diukur
468 469 470 471 472 473	W	Nah iya, kan harus ada pelaporan. Ya akhirnya pokok punya laporan. Terus kalau misal lanjut ke dampak financial report terus <i>auditable</i> , lah dia bukan termasuk yang <i>auditable</i> , auditornya juga ga bisa untuk masuk kesana. Kalo yang diliat ya emang aset digital saja, gasampe ke yang tadi dampaknya. Padahal kalo yang persediaan, dia ada <i>obsolescence</i> , akhirnya ada impairment, nyambungnyanya kesana juga, jauh.
474 475	M	Di laporan tesla kayaknya juga gaada ya pak laporan itu, yang dilaporkan senilai itu, senilai digital aset sekian.
476 477	W	Nah standart setter ya tujuannya ya untuk itu dan akhirnya tidak terpenuhi kan.
478	M	Kalau yang ini pak, yang 71 ini
479	W	Ini kan instrumen keuangan ini
480 481 482	M	Kan gini, kalau instrumen keuangan kan gak masuknya karena dia gaada kontrak atau dia gaada perjanjian apapun untuk menerima suata manfaat di masa yang akan datang
483 484	W	Ya karena itu kan yang tidak bisa ditentukan oleh <i>time</i> -nya, kalau kontrak kan jelas, dia ditentukan oleh <i>time</i> -nya
485 486	M	Iya misalkan instrumen keuangan obligasi, jelas ada tenornya, ada itunya, dan sebagainya
487 488 489	W	Jelas, kalau ini kan ya cuma suka-suka pemegang, tapi gapapa ungkapan ungkapan itu, siapa tahu nanti muncul pemikiran dari tulisanmu, yang punya insight itu. Karena memang itu gabisa dibendung.
490	M	Tapi mungkin highlight sebenarnya kembali ke political factor ini ya pak
491 492 493 494 495	W	Kalau saya memandang, ini dari ilmu dalam konsep teori akuntansi yang saya pahami, sehingga saya menyampaikan tadi itu karena saya dari proses normatif yang saya peroleh, bahwa teori akuntansi akan berpengaruh pada penyusunan standar itu tidak lepas dari standart setter yang disana ada peran dari regulator.
496 497 498 499 500 501 502 503	M	Tapi ada hubungannya juga dengan goal ke single currency, karena ada kemungkinan kalau currency ini akan menjadi alat tukar ketika semua sudah menerima. Dari sudut pandang bisnis, kita menukar aset, misal 1 mobil dengan 1 koin kripto, misal innova dengan kripto, mungkin 1 pair padan. Nah bitcoin tadi saya simpen, andai kata naik ya saya untung disitu, andai kata rugi, saya pegang, saya punya aset, itu pandangan sebagai business man. Jadi saya gak rugi karena saya punya aset. Nah kalau nilai naik, ya saya punya keuntungan di gain value itu.
504 505	W	Iya terus nanti kalau kita misalnya memaksa untuk masuk terus akhirnya ya jadi OCI itu tadi kan. Nah nanti bagaimana dari 3

506 507		komponen iki akhirnya muncul, kembali ke tujuan itu tadi, jadi basicnya nanti ini menilai standar, setelah itu di compare, cari di chapter 6 buku Tearney.
508 509	M	Kalau misal saya kembali ke aset tukar aset itu, kelemahannya di keandalan ya pak?
510 511	W	Iya, keandalan. Karena tidak bisa dipersepsikan dengan barang pada umumnya.
512 513	M	Iya saya sudah dapat gambaran, tinggal di tulis saja. Saya akhiri dulu ya pak sesi rekamannya.





LAMPIRAN 4
WAWANCARA 2

Keterangan :

M: Michael Chandra Gunawan

K: Drs. Ketut Indraningrat, M.Si

Baris	M/K	Hasil Wawancara
1	K	Jadi Sejarah kripto itu karena ditemukannya teknologi blockchain.
2		Crypto sendiri sebenarnya ilmunya ada jauh sebelum ada
3		blockchain itu. Crypto itu kan dari bahasa Yunani, ilmunya
4		kriptografi, penyandian. Sehingga, ketika kemudian muncul
5		teknologi blockchain, lalu salah satu fungsi dari blockchain ini
6		digunakan untuk mengcreate atau mendevlop crypto, maka
7		crypto itu adalah penyandian-penyandian. Jadi, crypto ini tidak
8		mewujud, tidak ada wujudnya. Dia barang digital, full digital. Lalu
9		nilainya berapa? Nilainya ini awal-awal sulit kita memberikan
10		nilai, karena para ahli crypto itu, di awal itu, nilainya seperti daun
11		saja. Tergantung sudah daun itu dipakai untuk apa. Misal dipakai
12		sebagai pupuk, maka daun itu bernilai. Crypto diciptakan itu
13		bermula dari untuk mempermudah permainan <i>game</i> . Munculnya
14		game-game itu karena teknologi tadi, kemudian ada kompetisinya,
15		game itu. Bahkan kompetisi dunia itu, dunia per-game-an itu. Di
16		sana ada transaksi, transaksi untuk beli apa? Transaksi untuk beli
17		koinnya untuk main game itu. Lalu terpikir oleh orang-orang yang
18		Namanya anonym, Satoshi Nakamoto itu. Ini siapa juga gak jelas,
19		katanya orang jepang, katanya orang Amerika, tapi enggak
20		muncul. Dia anonim betul itu. Dia menciptakan ini untuk yang
21		pertama mempermudah para gamer-gamer ini dalam bertransaksi.
22		Kenapa? Karena itu kalau beli koin, karena ini kompetisinya antar
23		negara, mata uangnya kan beda-beda. Nah, dari situ dimunculkan
24		crypto ini supaya mudah. Jadi, dia beli cryptonya, yang namanya
25		Bitcoin itu, untuk kemudian dia belikan untuk koinnya dia main
26		game itu. Sehingga, dia kalau kehabisan, dia nggak perlu repot-
27		repot lagi. Gini, dia punya stok berapa bitcoinnya, tinggal tuker
28		aja, sret. Jadi terus main game, dia bisa. Jadi dari transaksi ini
29		terciptalah sebuah sarana yang namanya Bitcoin tadi. Nah nilainya
30	M	Akhirnya nilainya naik terus
31	K	Iya, Akhirnya apa, itu di awal-awal banyak yang beli. Lalu masuk
32		di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an. Itu ditawarkan hanya
33		dengan harga Rp1000,-, satu koin.
34	M	Itu sekitar 2010 mungkin ya Pak

35	K	Iya, sekitar itu lah, tahun 2000an berapa gitu yah. Itu 2007 apa gitu ya, Rp1000,-. Tapi orang waktu itu, "ini apa ya ini", enggak ada yang beli. Tapi orang-orang yang mungkin ya, spekulasi ya, beli. Beli simpan. Mungkin ada yang beli karena pertemanan, ya taruh aja. Kemudian, karena jumlahnya terbatas, dia Cuma dicetak berapa juta gitu. Saya lupa, pokoknya limited. Karena ada yang beli-beli, akhirnya harganya up terus. Di exchanger, di bursa kripto, namanya exchanger, naik terus, sampai akhirnya orang menjadi terkaget-kaget. Saya punya temen itu beli di harga Rp4000,-an. Dia sudah nggak mikir. Kemudian dia ditelepon sama temennya. "eh bitcoin mu ada?" , "ada". Dia nggak ngelihat pasar, nggak tahu, beli 4000. "ya wes tak tukune 10000", "loh, serius kamu?", "iya". "Gawe opo?", "ya tak simpen aja". Ngomong gitu, harganya sudah Rp25.000,- di market. Akhirnya ya dijual Rp10.000. Kemudian dia tahu harganya dalam perkembangan, tahu harganya gitu. Waduh. Padahal seratus, 100 bitcoin.		
49			M	Wah itu sudah kaya sekarang
50			K	Lhoo, itu kemarin yang kaya-kayanya pada waktu all high time, angka tertingginya
51				
52			M	Iya itu 2019
53			K	Kemarin sebelum covid itu. Itu 900 juta itu 1 coin. Temen saya itu punya, anggota Dprd banyuwangi itu, begitu selesai dilantik, ditawarkan bitcoin sama temennya. Ya, karena temen, harganya waktu itu sekitar Rp5.000-an. "ya wes beli ae wes lah". Beli berapa, beli sejuta dia gitu. Ditaruh, lupa passwordnya segala macem, lupa sudah. Begitu harganya 900 juta kemarin, panik dia gitu. "Mana bitcoinku?". Ternyata kemudian, saya analisis dia beli dari perusahaan di Indonesia yang jualan bitcoin. Ketika perusahaan ini mengendalikannya lewat websitenya dia, sebenarnya dia kan bisa tarik semua bitcoin ke perusahaan. Dalam perkembangannya, ketika melihat fenomena itu, banyaklah kemudian para kreator, yang di crypto ini disebut developoer, men-develop, membuat crypto turunan dari bitcoin, termasuk yang sukses adalah Ethereum, kemudian yang heboh kemarin, itu punya Elon Musk itu...
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65	M	Doge		
66	K	Wah Doge itu, kemudian yang paling penting dari pelajaran itu bahwa instrumen ini sangat-sangat high risk. Tapi juga sangat high return. Kuncinya apa? Kuncinya kalau main Crypto, (1) beli crypto yang sudah established. Crypto yang established itu crypto yang sudah mapan di market, seperti, seperti apa Namanya, seperti Bitcoin, Ethereum. Itu sudah mapan. Tapi kalau ditawarkan crypto yang baru di-develop, udah jangan percaya. Kemudian yang kedua (2), harus uang dingin. Uang dingin itu uang nggak kepakai. Daripada ditaruh di bank, yang kaya pemilik bank. Betul to?		
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74	M	Jadi lebih baik beli ya pak?		

75	K	Iya, lebih baik anda beli crypto, anda simpan, karena ada prediksi di tahun 2025 ini, crypto akan bangkit lagi. Kenapa? Karena pemerintah Amerika sendiri, ternyata, diduga menyimpan Bitcoin paling banyak. Karena dia sudah mempersiapkan, ada banyak negara mulai sadar, lalu melakukan gerakan-gerakan de-dolarisasi, mau menghilangkan dolar. Kalau dollar nanti dapat tantangan serius dari BRICS, kemudian dolar nilainya terdepresiasi atau turun terus. Maka pemerintah Amerika, saya yakin akan bergeser ke Bitcoin, ke crypto. Nah crypto itu ada 2 macam, satu disebut token, satu disebut coin. Kalau token itu blockchainya developer lain, jadi dia numpang, nyewa. Kalau coin, dia punya blockchain sendiri, seperti Bitcoin itu punya penyandian sendiri di blockchain, Ethereum juga punya sendiri dan itu dia sewakan. Disewakan bagi developer-developer crypto yang ingin mencoba peruntungannya membuat crypto.
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85	M	Atau artinya token nempel sama coin itu ya pak?
89	K	Iya, ada biaya "gas"-nya gitu ya, ada biaya transaksi lah di situ. Berapa gitu. Kalau ethereum paling mahal sekitar \$0,4. Yang lain ada yang \$0,2.
90		
91	M	Itu dalam Dollar ya pak?
92	K	Iya, kursnya tetap pakai dollar. Seperti sejarahnya, jadi sekarang itu, sampai pun ada orang Indonesia yang menangkap peluang ini sangat bagus, yaitu oscar darmawan itu.
93		
94		
95	M	yang punya Indodax itu...
96	K	Dia mendirikan market, yang disebut Indodax. Itu market/exchanger crypto pertama di Indonesia, Indodax. Makanya, dia mendapat kepercayaan yang luar biasa. Hampir semua crypto utama diperdagangkan di sana. Dan itu biayanya sangat efisien karena enggak perlu nggaji karyawan seperti di bursa saham. Dia itu digital semua. Itu hebatnya Oscar Darmawan sehingga dia menjadi kaya raya, karena berhasil menangkap peluang ini. Kemudian kembali ke masalah akuntansinya. Kalau akuntansi di sebuah perusahaan yang memiliki crypto. Itu ya, perlakuannya seperti aset. Aset, long-term. Tapi bisa juga asset short-term. Misalkan untuk, ada idle fund. Kan di perusahaan ada idle fund.
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106	M	Ada...
107	K	Nah kalau dia berani, mainkan aja di crypto. Daripada nganggur duitnya, amati, kalau dia ngerti itu, belikan bitcoin, tunggu naik, jual. Walaupun spread-nya sekarang mungkin tidak setinggi kemarin-kemarin, tapi selalu berfluktuasi. Fluktuatif inilah yang dimanfaatkan oleh trader-trader yang berspekulasi di sana. Menurut saya, spekulasi boleh. Tapi yang enggak boleh judi. Tau bedanya?
108		
109		
110		
111		
112		
113	M	Kalau judi tidak ada perhitungan, kalau spekulasi mestinya...

114 115 116 117 118 119 120	K	Enggak, judi ada perhitungan. Yang membedakan, kenapa judi diharamkan banyak agama itu karena ada orang yang untung, ada orang yang rugi. Judi. Ya, berempat judi, aku menang narik, tiga rugi. Tapi kalau spekulasi enggak. Ya to? Spekulasi. Aku sekarang misalkan beli semangka, beli semangka. Aku spekulasi dari sawah dengan harga sekian. Kalau kemudian aku jual untung. Tapi ketika aku beli sudah diangkut, kendaraannya ngguling, banyak yang pecah, aku sendiri yang rugi. Orang lain enggak ada yang rugi.
121	M	Ooo. Begitu
122 123 124	K	Kerugian itu ditanggung sendiri, kompensasi dari peluang keuntungan. Makanya itu boleh spekulasi. Semua pedagang spekulasi. Buat cilok, buat bakso, spekulasi. Laku enggak? Kalau enggak laku?
125	M	Dimakan sendiri, kalau enggak dibuang
126 127 128	K	Ibaratnya hujan deres... Nah itu bedanya. Rugi sendiri. Tidak merugikan orang lain. Tapi kalau judi merugikan orang lain. Karena aku menang aku tarik duitmu. Rugi kan?! Kemudian, berapa banyak trader rugi?
129 130	M	Tapi kembali ke kasusnya, seperti yang kemarin sempet heboh, LUNA ya Pak. LUNA kan sempat ditarik semua sama yang punya.
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	K	Nah iya, jadi di seluruh model-model seperti itu, selalu ada orang-orang yang memiliki moral hazard. Saham sama aja. Cuma kalau di crypto lebih dahsyat lagi memang. Kenapa? Karena ini bisa (1) literasi kripto ini terutama di Indonesia, negara berkembang, literasinya kan lemah banget. Itu dimanfaatkan oleh banyak orang yang ingin mencari di air keruh. Dia ingin mendapatkan keuntungan secara cepat dan kemudian merugikan orang lain. Iya, gitu. Karena ketidakpahaman. Hanya diiming-imingi untung besar dan sebagainya, itu dia lalu membeli aja, tanpa paham ini apa, bagaimana resikonya. (2) Banyak sekali kemudian para developer ini di dalam menjual crypto nya itu, atau koinnya itu, atau tokennya itu menggunakan skema ponzi. Skema ponzi itu seperti skemanya multilevel. Bahwa ini kalau kamu bisa mengajak orang juga membeli / bergabung gini, kamu dapat komisi begini-begini. Ya, mirip-mirip multilevel. Cuman produknya kripto.
143 144	M	Yang membedakan apa, Pak, kalau ponzi sama multilevel? Kalau multilevel itu kan masih halal dan diperbolehkan.
145 146 147 148 149 150 151 152 153	K	Kalau multilevel itu, ada produk yang sebanding dengan uang yang anda keluarkan. Anda itu Cuma meng-switch aja, dari jual beli konvensional menjadi jual-beli yang seperti berjenjang. Sama, yang penting ukurannya adalah ketika seseorang mengeluarkan uang, sepadan enggak dengan uang yang ia terima. Kalau sama, it's clear. Tapi, kalau tidak sepadan, itu namanya skema ponzi, yang ujung-ujungnya akan murka. Orang bergabung 10 juta, hanya mendapat barang yang nilainya 1 juta atau 500 ribu, kemudian barang itu tidak bisa dijual, seperti dulu kasus misalkan, bukan

154		kasus ya, tapi banyak multilevel jual pendant. Pendant itu apa ya? Tanah dipadatkan gitu, katanya punya energi begini, begini, begini, blablabla, dimultilevelkan, waktu itu 7,5 juta, tapi kamu kalau berhasil mengajak orang kamu akan bonusnya kamu ngajak 2 orang aja udah balik modal. Nah ini kan sangat merugikan. Inilah yang disebut skema ponzi. Jadi, pertama kali orang bergabung, orang sudah rugi. Tapi kalau multilevel yang bener, itu adalah beli produk yang sepadan. Jadi, gak ada rugi. Tapi kalau kamu mereferensikan kepada orang, kamu akan komisi, bonus. Semua orang punya sifat itu. Michael misalkan makan enak di mana, cerita pada temannya, "Ooo, enak ini ini...". Bahkan rela-rela "Ya wes tak traktir kamu", diajak, ingin membuktikan bahwa betul-betul enak. Tapi, sama pedagangnya kan gak dikasih apa-apa Michael. Tapi ini kalau di multilevel, bahwa suatu produk bagus, ya dapat komisinya. Nah ini berjenjang, dari member, member, member. Ini yang membedakan. Nah ini yang mudah-mudahan temen-temen paham. Jadi jangan ditebyah kuwi. Yah... karena sistem itu tergantung <i>man behind the gun</i> -nya kan. Orang di belakang sistem itu. <i>You</i> kalau mau nipu, jangankan pakai itu. Pakai Al-Quran dipake nipu juga bisa. Buat jimat-jimat. Pakai injil sama aja kan gitu. Iya... sama aja, seperti itu. Nah kembali ke soal crypto. Perlakuan Akuntansinya ya asset. Di Indonesia sekarang, pemerintah kan sudah dirilis apa belum, akan membuat bursa kripto Indonesia. Wamendag waktu itu berkali-kali dengar pendapat dengan anggota DPR ya, untuk itu. UU nya sudah ada sih, peraturannya sudah ada untuk membuat. Kalau untuk melindungi, ini tadi, masyarakat Indonesia, sebab crypto dengan teknologi ini sebuah keniscayaan. Dan beberapa negara latin dan negara-negara Skandinavia itu sudah menggunakan crypto mata uang. Di Swedia, sudah ada ATM-nya, segala macam.
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178	M	ATM-nya Bitcoin itu ya. Kartu VISA Bitcoin
179	K	Iya, kemudian di negara latin, Kolombia
180	M	El Salvador sudah... Venezuela...
181	K	Iya sudah menggunakan sebagai alternatif juga untuk keuangan. Nah di Indonesia belum diakui sebagai uang. Di Indonesia, masih dianggap sesuai aturan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, itu masih mengakui <i>crypto</i> sebagai aset. Aset yang bisa diperdagangkan, dijual-belikan. Sehingga, kemendag juga mengeluarkan lisensi-lisensi, persetujuan-persetujuan approve, untuk <i>crypto-crypto</i> yang didaftarkan di kemendag itu mendapat pengakuan bahwa itu legal di Indonesia untuk diperjual-belikan. Yang kedua, <i>crypto</i> sendiri itu kan sebenarnya harus berbasis project, kalau mau ngelihat itu. Dari mana kita lihatnya? Dari <i>white paper</i> -nya. Jadi, <i>white-paper</i> itu seperti, apa namanya, kayak di saham, penawaran saham perdana,
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191	M	Ooo ini kayak waktu mau IPO...

192	K	Prospektus. Kalau di sini namanya <i>white-paper</i> . Jadi di <i>white</i>
193		<i>paper</i> itu dijelaskan ya <i>crypto</i> itu token maupun koin, untuk apa,
194		projectnya apa. Itu harus jelas di situ. Kemudian, berapa yang
195		dicetak. Karena begitu sekali dicetak, dia gak bisa ditambah.
196		Langsung dikunci itu di <i>blockchain</i> , gak bisa nambah. Misalkan
197		cetak 1 miliar koin, ya udah 1 miliar. Nah kemudian, developernya
198		akan berusaha menjual ini, menjual, menjual, tentunya di awal
199		pasti dengan harga rendah karena gak mungkin dia langsung harga
200		tinggi, Sulit. Kecuali kalau projectnya sangat-sangat nyata, riil,
201		dan project masa depannya itu cerah banget. Seperti itu. Nah
202		secara akuntansinya ya itu tadi. Kaya kalau pribadi, ya, diakui
203		sebagai aset, pengakuannya. Nah, Menkeu bahkan sudah membuat
204		peraturan, ada pajaknya. Ada pajak transaksi, ada pajak apalagi,
205		banyak itu item pajaknya. Saya sudah ingatkan teman-teman dari
206		awal, dari dulu, coba pelajari, ini kok arahnya kayaknya akan
207		mendapat pengakuan di setiap negara. Ternyata betul, kurang lebih
208		1 tahun yang lalu, Menkeu itu mengeluarkan permenkeu ada
209		pajak. Tadinya kan gak ada. Kan banyak orang untung, seperti
210		Oscar Darmawan tuh berapa pajak yang harus dibayar karena
		belum tersentu peraturan, gimana mau mungut. Begitu ada
		peraturan itu, transaksi tarik ada pajaknya semua. Ya, pemasukan
		bagi negara juga, sumber penghasilan dari pajak yang baru.
211	M	Meskipun diharamkan sebagian kalangan.
212	K	Yang mengharamkan karena nggak ngerti. Karena ini lo, ketika ini
213		barang baru, selalu ada oknum-oknum yang mencoba
214		menggunakan kesempatan ini untuk melakukan moral hazard itu.
215		Ya gimana ya? Semuanya gitu. Tapi cryptonya sendiri menurut
216		saya sih halal. Bahkan negara Islam seperti Iran pun
		membolehkan, mendvelop kripto.
217	M	Lebih aman untuk bertransaksi yang berkaitan dengan senjata.
218	K	Iya, karena itu kan nggak terdeteksi. Lalu orang, sisi negatifnya
219		dilihat. "Wah itu dipakai untuk pencucian uang, gini, gini". Loh,
220		pencucian uang bukan hanya di crypto, yang lainnya banyak.
221		Sekarang misalkan nih, aku punya kewenangan ini, yaitu pejabat
222		negara. Ya, ada orang proyek, aku nggak minta uang kontan. <i>You</i>
		bangunkan hotel di Banyuwangi.
223	M	Pencuciannya pakai hotel sebagai asset.
224	K	Bangunkan hotel, diatasnamakan. Gimana mau ngelacaknya,
225		orang bangun hotel? Makanya jangan heran, tiba-tiba ada hotel
226		bintang 5 berapa banyak itu. Kemudian yang kedua fenomenanya,
227		begitu banyak pertumbuhan <i>homestay-homestay</i> . Ya itu boleh lah
228		untuk mengantisipasi perkembangan pariwisata. Tapi saya duga
		itu pencucian uang. Banyak. Ya itu tadi.
229	M	Karena uang yang harus dilarikan ke suatu aset ya Pak.
230	K	Iya, kalau aku pilih proyek, dikasi proyek. Dapat misalkan
231		katakanlah 100 miliar. Aku nggak mau terima 100 miliar,

232		bangunkan hotel, tanah, dilihat cocok, ya wis, atas nama, nggak tau nama...
233	M	Makanya si owner nya nggak mikir kalau homestaynya sepi
234	K	Iya, biarin ae... wong duit begitu kok.
235	M	Kalau beneran bisnis di sana, bingung pasti ya Pak
236	K	Iya, nangis. Makanya banyak sepi-sepi gitu, tenang-tenang aja,
237		masih tetap berdiri. Gitu... Itu dia, kita duga. Tapi kan ndak bisa
238		buktikan ke KPK, gimana mau mbuktikan? Kecuali kayak yang
239		nyuap ini ngomong. Tapi, dia ngomong kena juga kan, ya jadi
240		sama-sama diam. Crypto juga begitu, lebih canggih lagi, soal mau
241		dipakai transaksi teroris, bisa aja, tinggal aparat kan harus lebih
242		canggih lagi. Nggak bisa ditolak itu. Kalau anda blokir,
243		Kemenkominfo mblokir, ya pakai VPN. Kalau VPN kan satelit,
244		nggak bisa kamu halangi. Kamu pakai satelit langsung, gimana
245		kamu mau mblokir satelit Amerika, Ngamuk Amerika, iya to? Iya,
246		pakai VPN. Situs porno, iya diblokir iya, tapi kalau orang yang
247	seleranya emang porno, pakai VPN, bisa akses video porno kan	
248	sangat banyak, kan gitu? Kembali ke negara memperkuat basis	
		moralnya kan begitu. Bukan dengan menghalang-halangi begitu,
		teknologi itu nggak bisa dihalangi. Anda lawan teknologi, anda
		nggak akan menang.
249	M	Karena terus maju..
250	K	Iya, karena di-update terus, teknologinya. Kita harus mengikuti,
251		termasuk crypto. Jangan dimusuhi. Keliru, pelajari dia, ambil
252		manfaatnya. Bahkan UNEJ bisa kalau mau mbuat crypto.
253	M	Asal ada yang mendanai
254	K	Lo iya... FEB mbuat projek apa, pakai crypto. Jual cryptonya di
255		antara dosen-dosen ini, coba transaksikan, masukkan di
256		exchanger. Cuma kan masuk di exchanger punyanya Oscar, itu kan
		8 miliar.
257	M	Iya nggak gampang juga
258	K	Iya, duit 8 miliar yang harus
259	M	Izinnya lewat exchanger-exchanger yang kecil dulu, merayap,
		naik.
260	K	Iya, nah sebetulnya bisa juga kan, kita punya ilmu komputer. Kita
261		buat exchanger sendiri dong. Hehehe. Loh kan harus ke sana
262		arahnya, apalagi sebuah perguruan tinggi, banyak pemikir. Tapi
263		pemikiran itu kan harus diejawantahkan. Harus direalisasikan,
264		diwujudkan. Kalau semua pemikiran terus, ya nggak jadi apa-apa,
		jadi pemikiran kemudian hilang.
265	M	Tapi belum ada ya pak, riset ke arah sana, temen-temen dosen?
266	K	Belum ada
267	M	Termasuk mahasiswanya kayaknya belum banyak berani
		menyentuh ke sana

268 269 270	K	Iya karena apa ya, semangat / spirit untuk menghasilkan hal yang baru, menjadikan sebuah <i>challenge</i> itu nggak muncul. Tantangan itu, kan begitu harusnya. Kalau enggak, ya angel, wah yo susah lah gitu.
271 272 273 274 275 276 277	M	Iya pak, coba saya mau kembalikan ke personalnya pak Ketut ya pak. Kalau Pak Ketut sendiri, ketika menilai suatu <i>crypto</i> itu harganya berapa, tadi kan sempat disebutkan, kalau permintaanya naik, pasti naik harganya, tapi kalau untuk individu, Pak Ketut sebagai individu, penilaiannya itu apa Pak Ketut menganggap "oh saya belinya sekian, maka nilainya sekian". Seperti saya punya rupiah, rupiah pun kan naik turun nilainya kalau kita bandingkan terhadap US dollar
278	K	Iya dollar, mata uang semua bergerak
279 280 281 282 283	M	Seperti saya punya uang Rp10.000 sekarang, dibanding Rp10.000 dulu bisa beli apa dulu, kan lebih banyak dapatnya daripada Rp10.000 sekarang. Nah, apakah <i>cryptocurrency</i> itu di matanya seorang individu Pak Ketut itu apakah seperti itu juga atau tetap sebagai aset yang tadi, suatu hal yang dimiliki, saya nggak peduli berapa nilainya?
284	K	Bagi saya, <i>crypto</i> itu lebih fair daripada mata uang fiat.
285	M	Oh kok bisa begitu pak?
286 287 288	K	Kenapa tadi Michael cerita uang saya Rp10.000 yang lalu, dengan Rp10.000 sekarang itu nilainya rendah. Orang ngomong karena inflasi, inflasi karena apa? Karena jumlah uang tambah banyak.
289	M	<i>Printing money...</i>
290	K	Nah, siapa yang <i>printing money</i> ?
291	M	Bank Sentral
292 293	K	Negara. Kamu simpan uang, sementara negara <i>printing money</i> terus. Kita kan nggak tahu negara ini <i>printing money</i> berapa?
294	M	Nggak tahu.
295 296 297	K	Nah itu, makanya, nasehat para investor dunia "lu jangan simpan uang lu di bank, tambah miskin", "kenapa?", "you simpen uang di bank, sementara negara cetak uang terus"
298	M	Uangnya tetap uang, nilainya turun.
299 300 301 302 303 304 305	K	Iya, terus bagaimana? Ya, investasikan dong, putar dong. Kalau kamu nggak bisa berbisnis blablabla, investasi di saham, emas, perak. Perak bahkan sekarang, nasihat Robert T. Kiyosaki, beli perak sekarang. Kenapa? Karena harga perak sekarang seperti di tahun 60. <i>Next</i> , ini. Tapi kan jarang orang paham investasi. Orang selalu milihnya emas. Padahal perak juga bagus, untuk instrumen investasi. Nah <i>crypto</i> itu lebih fair. Karena <i>crypto</i> itu sekali dicetak nggak bisa dicetak lagi, sehingga jumlahnya tetap.
306	M	Blockchain yang sudah terisi itu nggak bisa dipakai lagi
307	K	Hmm... nggak bisa berubah
308	M	Cuma bisa ditransferkan berarti ya Pak?

309	K	Iya, hanya bisa dipindah-pindahkan aja, diperjual belikan.
310		Jumlahnya tetap. Kalau jumlahnya tetap, kemudian transaksinya
311		tinggi, otomatis dia kan naik terus harganya. Sesederhana itu
312		sebetulnya. Dia lebih fair. Nggak mungkin, bitcoin itu ditambah
313		lagi karena harganya segini, terus dicetak lagi. Nggak bisa.
314	M	Kalau seperti itu apa nggak nanti suatu saat misalkan 50, 100 tahun
315		lagi akan menimbulkan deflasi yang dahsyat, Pak?
316	K	Iya, kalau soal deflasi tergantung penggunaannya kan. Karena
317		bitcoin itu kan cuma berapa ya, berapa juta itu?
318	M	Kalau pengetahuan saya, sekitar 120 juta
319	K	Nah kan jumlahnya <i>limited</i> di situ. Kemudian, banyak orang yang
320		mengoleksinya / membelinya, kan otomatis harganya naik.
321		Kemarin itu, harganya hancur-hancuran (1) karena faktor covid,
322		(2) karena pemerintah Amerika ingin membeli sebanyak-
323		banyaknya. Makanya dia kerahkan, Amerika itu kan negara
324		swasta. Dia kerahkan para pengusahanya yang pegang-pegang
325		Bitcoin itu, suruh jual. Jual, jual, jual. Yang beli, pemerintah. Balik
326		lagi ke dia. Jadi, ini sebuah game ya. Orang nggak tahu, ketika,
327		loh, kok jual, loh jual. Pernah lihat exchanger? Itu kan ada harga-
328		harga, berapa permintaannya kan ada itu. Nah, kan <i>fair</i> itu. Kalau
		ini sudah kejual kan tek, tek, tek...
329	M	<i>Bid offer</i> -nya jalan terus
330	K	Iya jalan terus, otomatis ini, match ini. Ini mesin, nggak bisa
331		direkaya. Nah, pemilik exchanger juga bisa "curang"
332	M	Tinggal manipulasi bid offer-nya ya
333	K	Karena begini, dia punya kekuasaan untuk melakukan, ban
334		market, exchanger. Di-Suspend. Alasannya apa, sedang ada
335		maintain. Ketika harga sedang turun, dia ban. Itu dicurigai begitu
336		Oscar Darmawan itu. Dia ban, dia beli. Orang kadang nggak tahu,
337		dia beli, beli. Ketika harganya naik, dia buka exchanger-nya.
		Tung...
338	M	Langsung gap up...
339	K	Nah, dicurigai begitu. Tapi membuktikannya sulit. Karena alasan
340		maintain. Maintain kita nggak tahu, dia kekuasaannya punya
341		exchanger. Dia bisa memilih <i>crypto</i> mana. Itu jauh lebih kaya lagi
342		dari yang dia dapat dari biaya transaksi exchanger. Cerdas...
343	M	Berarti dalam waktu ke depan, Pak Ketut yakin buat <i>crypto</i> jadi
		alat transaksi?
344	K	Iya, itu sebuah keniscayaan, mungkin berdampingan, sebagai
345		alternatif pembayaran, seperti kita mata uang fisik dan digital.
346		Kalau digital kan tidak ada angka fisik, tinggal mindah angka aja.
347		Nah, arahnya kesana. Kenapa? Karena efisiensi aja. Makanya
348		negara ini berusaha membangun BTS-BTS. Sayang, kemarin
349		dikorupsi sekian triliun. Itu dalam rangka, supaya internet ini
350		merata seluruh Indonesia, dalam rangka digitalisasi. Sekarang
351		bayangkan berapa biaya cetak uang fisik. Bayar pegawainya

352		demikian banyak di percetakan Perum Peruri itu. Belum lagi risiko
353		dipalsu. Penyediaan kertasnya, impor itu mahal. Mesinnya,
354		maintain mesinnya. Banyak sekali biayanya. Kalau udah digital,
355		itu dipotong. Pindahkan angka aja, ya kan dari angka yang dari
356		negara dilindungi diberi nama rupiah. Angkanya kan sama aja toh.
357		Jadi kamu ke pasar di Cina itu, ke pasar, gak bawa. Semua pasar
		punya barcode. Angkanya pindah. Apa terus jadi aneh kalau
		kemudian <i>crypto</i> juga begitu, angka doang? Fisiknya nggak ada
358	M	Iya wajar ya Pak...
359	K	Fisiknya nggak ada, makanya dipikir-pikir, <i>gendeng</i> ... beli sesuatu
360		nggak ada fisiknya. Ya Cuma angka-angkanya
361	M	Lama-lama jadi wajar
362	K	Iya coba. Saya punya pegang 7 miliar koin... saya beli waktu harga
363		di Rp50.000
364	M	7 Miliar biji babydoge
365	K	Iya token ini, baby doge. Sudah sekarang Rp157.000. Sudah 3x
366		lipat. Ini naik 0,7%. Ini 1 rupiah jadi harganya, itu kan saya punya
367		duit hampir 8 Miliar. Hehehe... Gitu ya. Belum lagi yang di
368		market, saya punya VidyX, dari harga Rp12.000, sekarang terjun
369		jadi Rp10. Jadi 1,2 miliar, cuma jadi berapa ratus ribu. Itu memang
370		resiko volatilnya sangat tinggi. Belum ini saya punya 1 triliun,
		1000 milyar.
371	M	(SHIBK)
372	K	Kapan hari saya punya beli ethereum, dirayu-rayu sama temenku.
373		Akhirnya, 5 ethereum saya kasi dia. Lumayan, 25 juta kali 5, 125
		juta.
374	M	Keuntungannya berapa itu pak?
375	K	Nggak, waktu itu, temen wes... itu kari babydoge itu. Ya rugi. Tapi
376		ya berharap siapa tahu, kita nggak tahu. Seperti juga tidak ada
377		seorang ahli pun memprediksi dengan tepat, harga saham akan
378		naik sekian. Biasanya Cuma naik, turun. Turunnya berapa, naiknya
379		berapa? Hanya Tuhan yang tahu. <i>Crypto</i> lebih dahsyat lagi. Karena
		lebih <i>high risk</i> dia.
380	M	Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau memungkinkan
381		suatu saat menjadi alat bayar, kemudian meniadakan fungsinya
		sebagai aset digital.
382	K	Jadi dua fungsinya nanti, sebagai aset dan alat bayar.
383	M	Jadi tetap diakui sebagai asset digital tadi, tapi juga digunakan
384		sebagai alat bayar. Hanya saja tinggal menunggu waktu ya Pak.
385	K	Iya. Jadi misalkan begini, Michael pebisnis. Kalau transaksi hari
386		ini, Michael jual barang ke saya, saya bayar Ethereum. Ethereum
387		sekarang kita lihat misal harganya berapa. Ethereum itu harganya,
388		oke kita sepakat, seharga sekarang. Ethereum itu di harga
389		Rp25.511.000. Lalu saya bayar dengan 10 Ethereum, berarti
390		transaksinya sekitar Rp250 juta sekian. Begitu bayar selesai,
391		transaksi di-send sudah, saya pindah Ethereum saya ke anda. Lalu

392		1 detik kemudian dia naik jadi Rp26.000.000, anda untung lo. Saya rugi? Nggak. Wong saya dapat barang.
393	M	Oh iya.. pemikiran ini yang nggak ada, nggak biasa dicari.
394	K	Nggak bisa itu di saham, nggak bisa. Makanya itu, <i>exciting</i> banget untuk pebisnis.
395		
396	M	Cuma belum semua pebisnis berani ya Pak
397	K	Iya. Loh Pak, kalau turun ke Rp21.000.000, ya lu sebagai pebisnis tahan dong. Jangan dijual. Kalau dijual ya rugi. Ya Namanya bisnis, ada untung ada rugi. Mana ada bisnis untung terus. Wong kemarin Raffi Ahmad 700 miliar sama Rudy Salim. Apple rugi berapa, kena strategi Cina. Apple, 300 Triliun. Masa dia mau nangis
398		
399		
400		
401		
402	M	Cuma akumulasinya lebih besar profit dong pak, setahun. Dalam <i>time-frame</i> yang lebih lama, lebi profit
403		
404	K	Iya, kalau enggak kan tutup. Nah itu, menariknya kan di situ. Tapi di Indonesia belum mengakuinya sebagai alat bayar. Namun, di dalam praktek individual, itu kan nggak bisa dihalang-halangi.
405		
406		
407	M	Karena anonim tadi
408	K	Iya, karena nggak kelacak. Saya beli mobilnya michael. Katakanlah harganya 1 miliar. 'Ini mic, tak bayar bitcoin ya'.
409		
410	M	2 bitcoin gitu Pak
411	K	Mau? Lalu Bitcoin harganya Rp430 juta. Berarti kebayar 2,5 coin. "You mau nggak?", "Iya wes Pak", Tak bayar 2,5, sret. Nah saya dapat mobil 1 miliar itu. Aku sebagai pembali kan udah nggak ada untung rugi, ya to? Udah beli barang 1 miliar. Tapi ketika anda terima itu, 1 jam kemudian naik menjadi Rp440juta, <i>you</i> untung. Asik ya?
412		
413		
414		
415		
416	M	Iya, itu yang cuma belum dipahami, karena kan takutnya ya, saya nggak ngerti kenapa kok belum disah-sahkan. Apa karena takut de-rupiah?
417		
418	K	Nggak, apa namanya? Literasinya ke masyarakat yang masih lemah. Dikuatirkan goncang ekonomi. Tapi kalau goncang kan, akui aja dua. Orang boleh menggunakan <i>crypto</i> , boleh menggunakan Rupiah. Masyarakat nanti akan dengan sendirinya akan belajar, mencari. Pemerintah menyediakan saja kurs system yang dibangun tadi, exchanger, market, pasar kripto Indonesia. Itu aja, <i>you</i> regulasi penuh, jangan pemain. Kamu regulator, kamu pemain, ya wasit ya pemain, kan repot. Mendirikan BUMN untuk anu kripto, kan repot lagi. Ya pemain ya wasit, regulator ya pemain, kan susah. Mati kita UMKM. Mati pengusaha-pengusaha, kecuali yang dekat dengan mereka. Jadi BUMN itu, ya, dia wasit dia pemain, kan repot. Nah menarik.
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428	M	Kalau berkaitan dengan ini...
429	K	Lalu begini Michael, ada sebenarnya pemikiran saya yang tidak sempat di... Karena aku nggak punya channel dengan pemerintah.
430		
431		Seharusnya, setiap <i>developer crypto</i> , misalkan dia mencetak 1

432		miliar koin atau token, <i>you</i> mau jual berapa di <i>market</i> . Kan
433		sebelum ke market, <i>you</i> pasti lakukan pre-sale. Seperti kemarin,
434		Raffi Ahmad yang membuat kripto heboh. Kan dia belum berizin
435		sudah dijual dulu. Namanya artis, akhirnya kan heboh. Akhirnya
436		ndak tahu, gimana ini. Itu karena kesalahan dari timnya si Raffi
		Ahmad, terlalu bernafsu.
437	M	Kayaknya bukan Raffi Ahmad, tapi Anang Hermansyah, ASIX
438	K	Iya, terlalu bernafsu gitu lo. Mestinya kan izinnya dulu dipenuhi,
439		baru. Akibatnya terlalu besar itu, warganya nyungsep. Kan gitu?
440		Orang sudah terlanjur beli di harga sekian ketika di ICO (initial
441		coin offering), sebelum initial exchanger (IEO). Tahapannya kan
442		dari ICO ke IEO. Pertama itu, initial konsumen offering. Lalu nanti
443		kalau sudah orang-orang yang dekat mau beli, lalu masukkan ke
444		market, ke exchanger, di situlah IEO. Jadi ada 2 tahap. Saham juga
445		bisa gitu. Sebelum di IPO dia di ICO dulu kan bisa, orang-orang
446		tertentu yang mau beli, dia dulu. Kemudian, di-launching di
447		market, dapat untung dia. Nah, kalau saham itu jelas, saham itu dia
448		jual kepada publik, itu ada garansinya, yaitu sebuah perusahaan,
449		yang punya ada aset, ada value-nya. Crypto nggak ada. Nah
450		pemikiran saya, pemerintah harusnya mengeluarkan regulasi
451		sekaligus untuk melindungi masyarakat. Apa itu? Developer yang
		mendevlop <i>crypto</i> kemudian dijual, itu wajib hukumnya
		menjamin dengan emas. Misalkan dia buat 1 miliar koin.
452	M	Jadi sama kayak uang dong Pak?
453	K	Misalkan 1 miliar koin, jual harga seratus, maka <i>you</i> harus jamin
454		dengan emas senilai 100 Miliar. Emasnya letakkan di bank, jadi
455		pemerintah mendirikan bank seperti di Swiss, ada khusus bank
456		emas. Isinya orang yang menjamin emas, emasnya taruh situ.
457		Karena ini institusi negara, ini aman. Taruh di situ emasnya.
458		Misalkan PT. Michael Jaya Selamanya mendevlop <i>crypto</i> , taruh
459		emas di situ, ada sertifikat dari negara. Sehingga orang yang
460		membeli <i>crypto</i> -mu aman. Ada jaminannya emas. Maka terjadi di
461		Singapore kan barusan ini, lari dia kan, kan ketangkap, karena
		moral hazard. Tapi kalau ada emasnya, <i>you</i> main-main, nggak bisa,
		emasmu? Pemerintah harus melakukan ini
462	M	Kalau di negara besar seperti di Amerika aja belum jalan seperti
		itu Pak.
463	K	Kenapa kita harus menunggu negara besar kalau untuk melindungi
464		rakyat. Sehingga sekaligus rakyat membentengi <i>crypto</i> - <i>crypto</i> dari
465		luar. Pengusaha-pengusaha dalam negeri buat <i>crypto</i> , jual keluar.
466		Jangan dari luar aja membanjiri Indonesia. Transaksinya di sini
467		besar, karena ada jaminannya, emas. Kan pajaknya masuk ke
468		Indonesia, karena diperjualbelikan di <i>exchanger</i> Indonesia.
469		Projeknya jelas, kemudian jaminannya ada emas, menarik.
470		Misalnya projeknya nanti untuk apa, apa riset apa, kan dari situ
		developernya dapat duit banyak itu

471 472	M	Kalau seperti itu, nanti timbul pertanyaan, lalu nilai <i>crypto</i> -nya didasarkan supply demand aja atau atas dasar nilai emas?
473 474 475 476 477 478 479	K	Jaminan itu kan sekaligus untuk menjamin nilainya. Kalau secara teori nggak mungkin nilainya di bawah nilai emas ini. Wong ada garansinya kok emas. Orang daripada jual harga di bawah emas, ngapain? Biarin aja tahan, wong ada jaminannya emas. Nggak akan mungkin developernya lari. Lari pun emasnya ada. Ya sudah emasnya dijual oleh negara, lalu orang yang mau menukarkan <i>crypto</i> -nya. Layani oleh negara, dibeli. Dengan harga kembali pada waktu IEO.
480 481	M	Jadi IEO itu didasarkan pada harga aset emasnya itu tadi, tapi entah itu nilai pasarnya mengikuti supply demand
482 483 484	K	Iya mengikuti nanti, begitu orang mulai tertarik, apalagi yang pertama. Orang kan beli, tertarik. Ketika banyak orang yang cari demand supply-nya jalan sudah. Naik otomatis, banyak yang beli karena kan naik terus begini.
CUT SESSION		
485 486 487 488 489	M	Nah, di Indonesia setahu saya belum ada memang yang berani trading. Di laporang keuangan itu nggak ada. Tapi kalau di balik layar saya nggak tahu juga. Apa yang membedakan sama perusahaan yang jual-beli biasa? Misal Ace Hardware, dia jualan kursi meja, sama perusahaan yang trading bitcoin tadi menggunakan idle cash?
490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510	K	Kalau yang menjual barang-barang berwujud, barangnya kan kelihatan. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan yang trading di <i>crypto</i> itu intangible. Kita mengakui ada tangible dan intangible. Jasa intangible juga. Apalagi <i>crypto</i> , intangible. Apakah itu jasa? Bukan. Kalau selama ini kan dibagi dua, barang ini kan tangible, yang intangible kan jasa. Nah, barang ini jadi dipecah lagi jadi <i>tangible goods</i> dan <i>intangible goods</i> . Wujudnya apa, ya nggak ada, angka-angka aja. Sebenarnya kan sudah ada itu perkembangannya. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang menggunakan idle money, itu kan jangka waktunya tergantung di perusahaan, apakah itu dalam setahun atau berapa. Kemudian yang kedua, dia tipe apa. Kalau dia risk-averse ya jangan ke <i>crypto</i> . Kalau dia risk-taker bagus di situ. Sesuai dengan karakternya. Kalau perusahaan risk averse nggak mungkin ya berani idle moneynya buat <i>crypto</i> . Kan kembali ke situ. Kalau kemudian karakternya risk taker, idle money ada nganggur 1 miliar, ayo main, lihat perkembangan, kan mudah mempelajarinya. Ada semua di exchanger itu, setiap koin ada semua pergerakannya. Nah sudah, belikan saja itu, amati, naik jual, turun beli lagi. Loh ternyata turun lagi, ya tahan. Saham juga begitu. Yang kedua, <i>you</i> kalau beli saham, apalagi <i>crypto</i> , jangan dibuka-buka, beli 5-10 tahun lagi baru buka. Bahasa sederhananya begitu. Kalau anda mau lihat-lihat, jangan tiap hari lihat, stress

		nanti. Artinya, itu benar-benar uang nganggur daripada uang di bank, anda nggak bisa kaya dari situ.
CUT SESSION		
511 512 513 514	M	Ini saya punya pertanyaan terakhir pak. Kalau <i>crypto</i> adalah suatu asset digital, apa yang menjadi pembeda dengan aset-aset tak berwujud lain, seperti dalam perusahaan tech itu ada software, atau mungkin hasil mineral, yang kita nggak ngerti. Biasanya aset-aset seperti itu kan perlu ada R&D
515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529	K	Kalau asset mineral itu kan berwujud ya, misal minyak, emas, paladium, hasil tambang itu berwujud. Kalau misal yang dimaksud dengan yang pertama, aset tak berwujud kan bisa juga hak cipta, <i>copyright</i> , bedanya yang ini nggak bisa diperdagangkan di <i>market</i> . Tapi dengan teknologi NFT itu sebenarnya bisa. Di sana bisa jual lukisan, yang nilainya bisa fantastis. Itu di-digitalkan lagi. Yang kedua, itu nggak bisa dipalsu, jaminan dari teknologi. Tapi namanya teknologi, ada foto biasa saja, tapi masyarakat di jagad virtual, jadi mahal. Nah yang <i>crypto</i> itu bisa diperjualbelikan secara umum. Nah kalau di market kan kita nggak tahu siapa yang mau beli. Karena di exchanger sendiri, <i>unidentified</i> . Kode saya tidak merujuk ke identitas saya. Itu yang dicurigai untuk pendanaan-pendanaan teroris. Tapi sebenarnya adalah teknologi untuk melacak sampai ke pemilik <i>crypto</i> itu. Ya namanya teknologi kok. Tidak semua perusahaan bisa punya itu, karena mahal. Pemiliknya itu kode, tidak bisa disangkutpautkan dengan nama-nama tertentu. Karena itu penyandian, kecuali dengan ilmu penyandian juga, cuma kan langka.
530	M	Itu pun masih sulit ya pak
531 532 533 534	K	Iya, orang yang tahu teknologi aja belum tentu. Angka yang sangat panjang itu. Lebih dari 20 kombinasi angka dan huruf, bayangin. Hebatnya lagi, teknologi blockchain itu misal dikunci dengan 8 lapis ya, begitu diterobos yang kedua, ini yang pertama akan ngunci lagi.
535	M	Jadi dia akan aman terus
536 537	K	Secara teknologi mungkin loh ya, 8 lapis ini harus dipecahkan bersamaan. Kan susah, wong 1 aja setengah mati lah.
538	M	Bagaimana kasus kalau kayak Solana kena hacker?
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548	K	Kalau hacker ini ada dua versi. (1) Benar-benar kena, karena itu hampir mustahil, (2) dicurigai ada orang dalam. Ya itu karena ada moral hazard, ya ngerampok lah. Ya kalau gitu, sesistem kayak apapun pasti jebol. Sama sistem perbankan, ya kalau ada orang dalam, jebol juga. Cuma di <i>crypto</i> lebih sulit. Kalau exchanger itu kan bukan bagian dari blockchain, market biasa aja, tidak dioperasikan dengan blockchain. Tapi <i>crypto</i> -nya aman, karena dia dilindungi teknologi blockchain itu. Sampai sekarang belum ada orang berhasil meng-hack blockchain. Kalau berhasil, bitcoin

		itu pasti hilang kabeh. Itu ada <i>smart contract</i> , terlindungi oleh ini. Wong memecahkan kombinasi enam punyanya BCA aja susah.
549	M	Kalau bukan alatnya yang canggih, orang dalam ya pak.
550	K	Iya...
551	M	Itu yang ingin saya tanyakan, saya banyak belajar, terutama optimisme.
END SESSION		

